



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAROS



LPPD

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MAROS TAHUN 2024**

TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena hanya dengan berbagai limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Maros Tahun 2024 tahun anggaran 2025 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa beberapa kewajiban Kepala Daerah antara lain adalah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD serta menginformasikan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat.

Selain itu, laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

- a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros
- b. Data Geografis Kabupaten Maros
- c. Jumlah Penduduk
- d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah
- f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024



- 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah
 - b. Visi dan Misi
 - c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD 2021-2026
 - d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RKPD Tahun 2024
- 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 2.1. Capaian Kinerja Makro
 - a. Indeks Pembangunan Manusia
 - b. Angka Kemiskinan
 - c. Angka Pengangguran
 - d. Pertumbuhan Ekonomi
 - e. Pendapatan Per Kapita
 - f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)
- 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 - 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)
 - 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)
 - 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
- 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
 - a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun 2024
 - d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah
 - e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan



Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

- f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

- 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

- 4.1. Urusan Pendidikan
4.2. Urusan Kesehatan
4.3. Urusan Pekerjaan Umum
4.4. Urusan Perumahan Rakyat
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4.6. Urusan Sosial

BAB V PENUTUP

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Oleh karena itu, sangat beralasan jika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi bahan evaluasi, informasi, dan referensi bagi pemerintah pusat serta sebagai acuan dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian demi pengembangan daerah dimasa yang akan datang. Di sisi lain, penyusunan LPPD ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Maros untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.



Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Maros tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan, semoga dapat memberi manfaat dalam terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik di Kabupaten Maros. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh Masyarakat dan berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Maros.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BUPATI MAROS,

H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.IP., M.H

**DAFTAR ISI**

| | Halaman |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.1.1 Penjelasan Umum..... | 2 |
| a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros..... | 3 |
| b. Data Geografis Pembentukan Kabupaten Maros..... | 6 |
| c. Jumlah Penduduk..... | 7 |
| d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan..... | 10 |
| e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah..... | 24 |
| f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024..... | 33 |
| 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah..... | 56 |
| a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah..... | 59 |
| b. Visi dan Misi..... | 59 |
| c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD 2021-2026..... | 61 |
| d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RKPD Tahun 2024..... | 82 |
| 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal..... | 86 |
| BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | 91 |
| 2.1. Capaian Kinerja Makro..... | 91 |
| a. Indeks Pembangunan Manusia..... | 92 |
| b. Angka Kemiskinan..... | 92 |
| c. Angka Pengangguran..... | 93 |
| d. Pertumbuhan Ekonomi..... | 93 |
| e. Pendapatan Per Kapita..... | 94 |
| f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)..... | 95 |



| | |
|--|------------|
| 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..... | 95 |
| 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)..... | 97 |
| 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Usuran Pemerintahan..... | 131 |
| 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah..... | 136 |
| a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 208 |
| b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 210 |
| c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Tahun 2023..... | 211 |
| d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah..... | 213 |
| e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai..... | 214 |
| f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja..... | 220 |
| BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN..... | 242 |
| 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros..... | 243 |
| 3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros..... | 243 |
| 3.3...Permasalahan dan Kendala..... | 245 |
| 3.4...Saran dan Tindak Lanjut..... | 246 |
| BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL..... | 317 |
| A. Urusan Pendidikan..... | 317 |
| B. Urusan Kesehatan..... | 330 |
| C. Urusan Pekerjaan Umum..... | 338 |
| D. Urusan Perumahan Rakyat..... | 342 |
| E. Urusan Trantibun Linmas..... | 346 |
| F. Urusan Sosial..... | 356 |
| BAB V PENUTUP..... | 374 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja Pemerintah Daerah antara lain dapat dinilai dari tertibnya administrasi laporan penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah, dan sebagaimana tercantum pada Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, LPPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanahkan kewajiban Kepala Daerah menyampaikan LPPD sebagai upaya pertanggungjawaban publik untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah yang sejalan dengan cita-cita menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*), bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang baik (*good governance*). Kewajiban yang dimaksud disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Masyarakat.

Respon dan kepekaan Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanah Undang-Undang tersebut sangat dibutuhkan. Kabupaten Maros sebagai salah satu Kabupaten Daerah Otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.1.1 Penjelasan Umum

Kabupaten Maros dengan ibukota kabupaten adalah Kota Maros yang



berperan sebagai pusat pemerintahan dengan segala aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan politik terletak di Kecamatan Turikale. Jika dilihat dari geografis wilayah yang lebih mikro, Kota Maros terbagi atas 3 (tiga) segmen kawasan yang merupakan bagian dari pusat-pusat pemerintahan Kabupaten Maros dan dihubungkan oleh jaringan jalan arteri. Sedangkan ditinjau dari perkembangan wilayah, juga terjadi pada arah jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan dengan wilayah Kabupaten Bone, yang meliputi wilayah Kecamatan Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba dan Mallawa.

Secara umum, wilayah Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat besar terhadap pembangunan regional dan nasional melalui peranannya dalam berbagai aspek, yakni :

1. Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mandai yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kota Makassar. Pertumbuhan pelayanan bandar udara Hasanuddin yang begitu pesatnya, sehingga dilakukan pengembangan bandar udara baru dengan luas lahan pengembangan 554,6 Ha. Bandar udara Hasanuddin merupakan wilayah pintu gerbang Sulawesi Selatan dan KTI yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Maros adalah gerbang utama pembangunan regional dan nasional.
2. Pusat Penelitian Pertanian, yakni dengan adanya pengembangan Balai Penelitian Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan yang berlokasi di Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan serangkaian penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus mendiseminasikan secara terarah guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya kawasan riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal ini sangat mendasar karena wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir dengan kontribusi pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan cukup besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan wilayah Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, kegiatan



perikanan yang diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Maros adalah perikanan budidaya air payau yang mencapai luas tambak 9.581,50 Ha.

4. Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang dijadikan sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI-AD, yaitu dengan adanya kawasan pelatihan dan pendidikan Kostrad TNI-AD. Lokasi kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja Kecamatan Bantimurung dan Kariango Kecamatan Tanralili. Disamping itu, Kecamatan Mandai juga di jadikan sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin.
5. Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW, jamaah Halwatiah Sammang bersatu melakukan zikir akbar yang berlokasi di Patte'ne Kecamatan Marusu. Asal jamaah Halwatiah Sammang tersebut telah tersebar diseluruh nusantara, bahkan ada yang berasal dari Malaysia.
6. Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata, yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama di KTI, dimana sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan tersebut. Wilayah Kecamatan yang masuk dalam pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Bontoa. Dari luas wilayah pengembangan Kawasan Mamminasata sebesar 2.462 Km², wilayah Kabupaten Maros yang menjadi bagian kawasan pengembangan tersebut adalah 1.039 Km² atau 42,20%. Hal ini tentunya sangat memberi manfaat bagi wilayah Kabupaten Maros ditinjau dari segi penyediaan dan pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, PAD dan lain sebagainya.

a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros

Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama



lain daerah ini yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, yang memuat sejarah Kabupaten Maros. Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa, yang mana pada waktu itu, Maros memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh duasuku, yakni Suku Bugis dan Suku Makassar.

Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros sebagai sebuah Onderafdeling dengan 16 buah distrik, masing-masing :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Distrik Turikale | Dipimpin oleh Karaeng |
| 2. Distrik Marusu | Dipimpin oleh Karaeng |
| 3. Distrik Simbang | Dipimpin oleh Karaeng |
| 4. Distrik Bontoa | Dipimpin oleh Karaeng |
| 5. Distrik Lau' | Dipimpin oleh Karaeng |
| 6. Distrik Tanralili | Dipimpin oleh Karaeng |
| 7. Distrik Sudiang | Dipimpin oleh Gelarang |
| 8. Distrik Moncongloe | Dipimpin oleh Gelarang |
| 9. Distrik Bira | Dipimpin oleh Gelarang |
| 10. Distrik Biringkanaya | Dipimpin oleh Gelarang |
| 11. Distrik Mallawa | Dipimpin oleh Arung |
| 12. Distrik Camba | Dipimpin oleh Arung |



- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 13. Distrik Cendrana | Dipimpin oleh Arung |
| 14. Distrik Laiya | Dipimpin oleh Arung |
| 15. Distrik Wanua Waru | Dipimpin oleh Arung |
| 16. Distrik Gantarang Matinggi | Dipimpin oleh Arung |

Keenam belas distrik di atas merupakan pusat-pusat pemerintahan di Kabupaten Maros pada masa lampau yang kemudian berkembang seiring dengan kemajuan pembangunan secara lokal maupun regional, maka sebagian wilayah Kabupaten Maros terintegrasi ke wilayah administrasi Kotamadya Ujung pandang (Ujung pandang berubah nama menjadi Kota Makassar). Adapun wilayah distrik Kabupaten Maros tersebut yang terintegrasi di wilayah administrasi Kota Makassar tersebut adalah Distrik Bira, Suding dan Biringkanaya. Pelepasan wilayah Bira, Sudiang dan Biringkanaya tersebut dari wilayah Kabupaten Maros terjadi pada tahun 70-an.

Wilayah Kabupaten Maros dalam sejarahnya telah mengalami pemekaran wilayah. Pada tahun 1963, Kabupaten Maros terbagi atas 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Maros Baru, Bantimurung, Mandai, dan Camba. Memasuki tahun 1989, diadakan pemekaran wilayah kecamatan dengan dibentuknya 3(tiga) kecamatan perwakilan, yakni Kecamatan Perwakilan Tanralili, Maros Utara, dan Mallawa, yang hingga saat ini saat ini terdapat 14 wilayah kecamatan. Masing-masing wilayah kecamatan tersebut memiliki potensi tersendiri dalam menunjang pembangunan wilayah. Disamping itu, Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat berarti dalam pembangunan Kota Makassar sebagai ibukota provinsi dan sekaligus sebagai pusat pengembangan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Peluang inilah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Maros, terutama wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kota Makassar. Sedangkan rencana pembangunan wilayah secara eksternal, sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam pengembangan Kawasan Mamminasata sebagai kawasan kota metropolitan.

Setelah menjalani titian sejarah selama lima abad dimulai dengan berdirinya Kerajaan Marusu pada awal abad XV yang selanjutnya terjadi kehidupan yang berdinamika bagi setiap kerajaan mulai dari sistem Monarki



menjadi daerah Regentschap kemudian menjadi daerah Adat Gemeenschap sampai dekade terakhir menjadi distrik, maka dalam sebuah masa peralihan antara fase pemerintahan klasik/tradisional dengan pemerintahan konstitusional lahir Undang-undang No. 29 Tahun 1959 (14 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945). Maros kemudian berdiri sendiri menjadi Daerah Tingkat II Maros berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

b. Data Geografis Kabupaten Maros

1. Batas Administratif

Secara geografis, kabupaten Maros terletak antara $40^{\circ} 45'$ - $50^{\circ} 07'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 205'$ - $129^{\circ} 12'$ Bujur Timur yang berbatasan dengan:

Di sebelah Utara : Dengan Kabupaten Pangkep;

Di sebelah Timur : Dengan Kabupaten Bone;

Di sebelah Tenggara : Dengan Kabupaten Gowa;

Di sebelah Selatan : Dengan Kota Makassar;

Di sebelah Barat : Dengan Selat Makassar.

Jika dilihat dari posisinya terhadap Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Karena posisinya tersebut, Kabupaten Maros termasuk dalam bagian wilayah pengembangan konsep kota terpadu Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Wilayah kecamatan yang termasuk dalam pengembangan ini adalah kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Bontoa.

2. Topografi

Topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi, mulai dari wilayah datar sampai wilayah pegunungan. Luas daerah kondisi datar sekitar 70.882 Ha atau 43,80% dari luas Kabupaten Maros. Sedangkan, daerah yang mempunyai



kemiringan lereng diatas 40% atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai luas 49.869 Ha atau sebesar 30,80% dari luas wilayah Kabupaten Maros.

Ketinggian wilayah Kabupaten Maros berkisar antara 0 sampai 881 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi di atas 700 meter terdapat pada kecamatan Camba dan Mallawa, sedangkan daerah terendah terdapat padakecamatan Maros Baru, Marusu, Turikale, dan Bontoa.

Jenis air permukaan berasal dari sungai-sungai yang berjumlah 12 sungai, yaitu sungai Maros, Parang Pakku, Marusu, Puse, Boringkaluku, Batu Pute, Matturunge, Marana, Campaya, Pattumanagasae, Bontotenga dan Tanralili.

Iklm Kabupaten Maros termasuk iklim tropis basah, dengan curah hujan rata-rata sekitar 395 mm setiap bulannya dengan jumlah hari hujan berkisar 148 hari Interval suhu udara antara 23,4⁰C sampai 33,3⁰C, dengan kelembaban rata- rata 75,55%. Adapun kecepatan angin antara 2 knot sampai dengan 10 knot.

c. Jumlah Penduduk

Hingga akhir tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Maros tercatat sebanyak 414.406 jiwa yang terdiri dari laki-laki **206.548** jiwa, perempuan **207.858** jiwa dan tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 53.268 jiwa yang terdapat pada Kecamatan Mandai. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Mallawa dengan jumlah penduduk 13.125 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2024 telah mencapai **25,94** jiwa per km². Kecamatan Turikale adalah Kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan yang sudah mencapai 1.653,39 jiwa per km², sedangkan Kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Mallawa yaitu 55,63 jiwa per km².

Adapun Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Maros untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



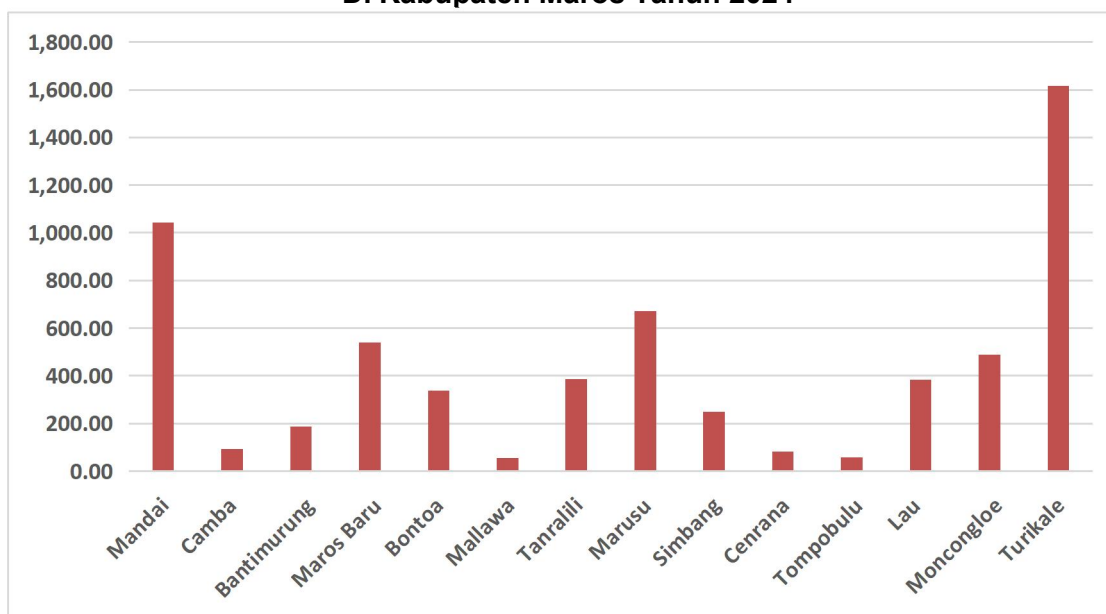
Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2024

| No. | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) | | | Luas Wilayah (Km ²) | KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km ²) |
|---------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Mandai | 26.627 | 26.641 | 53.268 | 49.11 | 1.084,66 |
| 2 | Camba | 6.581 | 6.986 | 13.567 | 145.36 | 93,33 |
| 3 | Bantimurung | 16.582 | 17.074 | 33.656 | 173.70 | 193,75 |
| 4 | Maros Baru | 15.064 | 14.935 | 29.999 | 53.76 | 558,01 |
| 5 | Bontoa | 16.153 | 16.329 | 32.482 | 93.52 | 347,33 |
| 6 | Mallawa | 6.504 | 6.621 | 13.125 | 235.92 | 55,63 |
| 7 | Tanralili | 18.576 | 18.244 | 36.800 | 89.45 | 411,40 |
| 8 | Marusu | 19.072 | 19.246 | 38.318 | 53.73 | 713,16 |
| 9 | Simbang | 13.499 | 13.559 | 27.058 | 105.31 | 256,94 |
| 10 | Cenrana | 7.419 | 7.693 | 15.112 | 180.97 | 83,51 |
| 11 | Tompobulu | 8.952 | 8.644 | 17.595 | 287.66 | 61,17 |
| 12 | Lau | 14.419 | 14.603 | 29.022 | 73.83 | 393,09 |
| 13 | Moncongloe | 12.560 | 12.358 | 24.918 | 46.87 | 531,64 |
| 14 | Turikale | 24.541 | 24.945 | 49.486 | 29.93 | 1.653,39 |
| JUMLAH | | 206.548 | 207.858 | 414.406 | 1.619,12 | 25,94 |

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025

Untuk melihat perbandingan tingkat kepadatan penduduk pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Tingkat Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Di Kabupaten Maros Tahun 2024



**Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2024**

| No. | KECAMATAN | JUMLAH KEPALA KELUARGA | KETERANGAN |
|--------------|-------------|------------------------|------------|
| 1 | Mandai | 15.822 | |
| 2 | Camba | 4.852 | |
| 3 | Bantimurung | 10.537 | |
| 4 | Maros Baru | 8.976 | |
| 5 | Bontoa | 9.891 | |
| 6 | Mallawa | 4.589 | |
| 7 | Tanralili | 11.748 | |
| 8 | Marusu | 11.775 | |
| 9 | Simbang | 8.612 | |
| 10 | Cenrana | 5.094 | |
| 11 | Tompobulu | 5.565 | |
| 12 | Lau | 8.921 | |
| 13 | Moncongloe | 7.614 | |
| 14 | Turikale | 14.815 | |
| TOTAL | | 128.811 | |

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025

**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Maros Tahun 2020 – 2024**

| Kelompok Umur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 – 4 | 27.791 | 31.961 | 32.907 | 33.770 | 34.295 |
| 5 – 9 | 37.589 | 37.532 | 37.961 | 38.646 | 40.161 |
| 10 – 14 | 36.955 | 35.693 | 36.854 | 37.758 | 38.803 |
| 15 – 19 | 29.233 | 34.697 | 31.227 | 26.639 | 30.541 |
| 20 – 24 | 34.291 | 34.239 | 34.135 | 35.236 | 35.589 |
| 25 – 29 | 32.473 | 32.598 | 32.351 | 33.218 | 33.951 |
| 30 – 34 | 30.953 | 30.757 | 30.974 | 31.582 | 32.620 |



| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 35 – 39 | 28.418 | 28.631 | 28.684 | 29.619 | 25.446 |
| 40 – 44 | 26.372 | 26.295 | 26.371 | 26.870 | 27.713 |
| 45 – 49 | 24.835 | 24.850 | 24.424 | 24.836 | 25.446 |
| 50 – 54 | 22.337 | 22.244 | 23.264 | 24.076 | 24.198 |
| 55 – 59 | 16.049 | 15.971 | 17.022 | 18.554 | 19.993 |
| 60 – 64 | 12.854 | 12.467 | 13.095 | 13.762 | 14.567 |
| 65 – 69 | 8.205 | 8.095 | 8.723 | 9.443 | 10.041 |
| 70 – 74 | 5.761 | 5.446 | 5.794 | 6.439 | 7.057 |
| 75+ | 6.319 | 7.262 | 7.703 | 8.418 | 8.918 |
| Jumlah | 388.330 | 388.738 | 391.489 | 398.866 | 414.406 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk tahun 2024 dengan kelompok umur, jumlah tertinggi pada kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah penduduk sekitar 40.161 orang atau 9,69 % dari total jumlah penduduk, posisi kedua pada kelompok umur 10-14 tahun dengan persentase penduduk sebesar 9,36 % atau 38.803 orang, kemudian diikuti oleh kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah penduduk 35.589 orang atau 8,58 % dari total jumlah penduduk.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Maros tahun 2024 sebanyak 296.080 orang. Dari seluruh penduduk usia kerja tersebut, jumlah penduduk usia 15-64 tahun mencapai 280.105 orang atau 67,59% dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja produktif di Kabupaten Maros cukup memadai.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif Kabupaten Maros terdiri dari 14 kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 1.619,12 km². Berdasarkan data yang ada, diketahui kecamatan terluas adalah kecamatan Tompobulu



dengan luas 287,66 km² atau 17,77 % dari luas Kabupaten Maros. Adapun Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Turikale dengan luas 29,93 km² atau hanya 1,85 % dari luas wilayah Kabupaten Maros.

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Maros

| NO | KECAMATAN | JUMLAH | | LUAS (Km ²) |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | DESA | KELURAHAN | |
| 1 | Mandai | 4 | 2 | 49,11 |
| 2 | Moncongloe | 5 | 0 | 46,87 |
| 3 | Maros Baru | 4 | 3 | 53,76 |
| 4 | Lau | 2 | 4 | 53,73 |
| 5 | Turikale | 0 | 7 | 29,93 |
| 6 | Marusu | 7 | 0 | 73,83 |
| 7 | Bontoa | 8 | 1 | 93,52 |
| 8 | Bantimurung | 6 | 2 | 173,70 |
| 9 | Simbang | 6 | 0 | 105,30 |
| 10 | Tanralili | 7 | 1 | 89,45 |
| 11 | Tompobulu | 8 | 0 | 287,66 |
| 12 | Camba | 6 | 2 | 145,36 |
| 13 | Cenrana | 7 | 0 | 180,97 |
| 14 | Mallawa | 10 | 1 | 235,92 |
| Total | | 80 | 23 | 1.619.12 |

Sumber data: Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2025

Adapun untuk mengetahui jumlah bangunan rumah (tempat tinggal) di Kabupaten Maros menurut kecamatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Bangunan Rumah Layak dan Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan Tahun 2024

| NO | KECAMATAN | JUMLAH RUMAH (UNIT) | | TOTAL RUMAH (UNIT) |
|----|------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | | LAYAK HUNI | TIDAK LAYAK HUNI | |
| 1 | Turikale | 11.763 | 554 | 12.307 |
| 2 | Maros Baru | 3.853 | 2.869 | 6.722 |
| 3 | Mandai | 4.964 | 2.072 | 7.036 |
| 4 | Moncongloe | 3.808 | 3 | 3.811 |
| 5 | Camba | 1.322 | 1.558 | 2.880 |



| | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | Cenrana | 1.538 | 64 | 1.602 |
| 7 | Bantimurung | 2.527 | 2.579 | 5.106 |
| 8 | Simbang | 2.500 | 2.811 | 5.311 |
| 9 | Marusu | 4.889 | 1.791 | 6.680 |
| 10 | Lau | 3.275 | 215 | 3.490 |
| 11 | Bontoa | 2.709 | 1.306 | 4.015 |
| 12 | Tanralili | 3.467 | 2.375 | 5.842 |
| 13 | Tompobulu | 2.007 | 114 | 2.121 |
| 14 | Mallawa | 1.574 | 1.616 | 3.190 |
| JUMLAH | | 50.196 | 19.917 | 70.113 |

Sumber data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2025

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah bangunan terbanyak terdapat pada Kecamatan Turikale dengan jumlah 12.307 unit rumah tempat tinggal, dimana 11.763 unit rumah diantaranya layak huni dan 554 unit rumah tergolong tidak layak huni. Salah satu hal yang mempengaruhi banyaknya jumlah rumah tempat tinggal di kecamatan Turikale adalah karena letaknya berada di ibukota Kabupaten sehingga dipandang cukup strategis dan menguntungkan bila bermukim di Turikale karena kantor-kantor Pemerintahan di Kabupaten Maros sebagian besar berada di Kecamatan ini. Selain itu, umumnya kegiatan perekonomian berpusat di wilayah ini.

Adapun kecamatan lain dengan jumlah rumah tempat tinggal yang cukup besar adalah kecamatan Mandai dengan 7.036 unit rumah. Salah satu hal yang mempengaruhi banyaknya jumlah rumah tempat tinggal di Kecamatan Mandai adalah karena letaknya yang merupakan kecamatan dekat dengan kota Makassar yang dilalui secara langsung oleh jalan provinsi sehingga banyak masyarakat yang bekerja di Makassar memilih bertempat tinggal di kecamatan ini.

Kabupaten Maros merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah sehingga dengan curah hujan dan tingkat penyinaran sinar matahari yang cukup menjadikan wilayah Kabupaten Maros sangat potensial untuk kegiatan pada 12 sektor-sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Produksi padi keseluruhan di kabupaten Maros tahun 2024 sebesar **297.028,6** ton yang dipanen dari areal sawah seluas 49,875 Ha atau rata-rata



produktivitas 60,57 Kwintal/Ha. Selain padi, potensi unggulan lain di Kabupaten Maros adalah jagung dengan luas panen sekitar 12.685 Ha dan jumlah produksi sebesar **99.753,64** ton, kacang kedelai dengan produksi sebesar **243,20** ton dari luas panen 150 Ha, kacang tanah dengan produksi **2.281,3** ton dari luas panen 991 Ha, Kacang Hijau dengan produksi **10,53** Ton dengan luas panen 102 Ha, ubi kayu dengan produksi sebesar **21.820,36** ton dari luas panen 546 Ha, dan ubi jalar dengan luas panen 58 Ha yang mampu menghasilkan produksi sebesar **2.183,70** ton. cabe rawit dengan jumlah produksi **239,6** ton, cabe besar dengan produksi **539,1** ton. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, populasi ternak terbesar di Kabupaten Maros adalah sapi potong dengan populasi mencapai **43.544** ekor. Selain sapi potong ternak lain yang memiliki populasi cukup besar adalah kambing dengan populasi **2.981** ekor, kuda dengan populasi **588** ekor dan kerbau dengan populasi **752** ekor. Adapun produksi daging sapi untuk sapi potong tahun 2024 sebesar **184.706,60** Kg, Kerbau **1.120,50** Kg, Kuda **829,54** Kg, Kambing 42.400 kg, Babi 196,32 Kg, ayam buras 140.130,90, ayam petelur 4.180,26 Kg, Ayam pedaging **45.245.179,20** Kg, dan itik **3.002,00** Kg, serta itik manila **132** Kg. Selain itu produksi telur untuk ternak dengan jenis unggas adalah ayam buras dengan jumlah **370.345,95** Kg, ayam ras petelur dengan jumlah **67.298,42** Kg dan itik dengan jumlah **33.780,40** Kg, serta produksi telur itik manila **1.207,80** Kg.

Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Maros merupakan kontribusi dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Maros Baru, Marusu, Lau, dan Kecamatan Bontoa dengan produksi sebesar **33,548,8** ton dan perikanan budidaya dengan produksi sebesar **30,711,7** ton. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di Kabupaten Maros berjumlah 1 TPI yaitu TPI Labuang berlokasi di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maros juga memberikan Bantuan Hibah Barang kepada masyarakat berupa Bibit ikan nila kepada kelompok Pembudidaya ikan yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros yang terdiri dari 20 Kelompok Pembudidaya ikan dan masing-masing kelompok mendapatkan bantuan bibit ikan nila sebanyak 10.000 ekor. Selain itu Dinas Perikanan Kabupaten Maros juga memberikan hibah bibit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Maros, bantuan yang diberikan yaitu ikan bandeng sebanyak 3



kelompok masing-masing 40.000 ekor, ikan lele sebanyak 2 kelompok masing-masing 12.000 ekor, udang sebanyak 8 kelompok masing-masing 20.000 ekor.

Potensi sumberdaya alam (SDA) unggulan kabupaten Maros lainnya adalah potensi wisata alam Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang menjadi tempat tujuan wisata di Sulawesi Selatan. Lokasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan adalah air terjun Bantimurung, kolam renang Bantimurung, dan Taman Pra Sejarah Leang-Leang. Selain ketiga lokasi wisata tersebut, masih banyak lagi lokasi wisata lainnya, namun secara umum potensi-potensi wisata alam tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Adapun potensi wisata alam lain yang belum dimaksimalkan adalah taman wisata alam Pattunuang, cagar alam Karaenta, air terjun Bonto Somba, taman safari Pucak, sungai Pute, dan permandian air panas Reatoa.

Kawasan permandian alam Bantimurung. Terletak di lembah bukit kapur dengan jarak tempuh kurang lebih 12 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Lokasi ini mudah dicapai karena kendaraan umum dari dan ke lokasi selalu tersedia. Dengan kondisi alam tropis yang subur menjadikan daerah ini sebagai pemukiman ideal dari berbagai jenis kupu-kupu dimana saat ini tercatat sekitar 150 jenis yang di daerah lain sudah amat sulit ditemui. Goa mimpi merupakan goa terletak di dalam kawasan permandian alam Bantimurung. Di dalam goa ini terdapat stalaktit yang mempunyai kumpulan kristal yang indah.

Taman wisata alam Pattunuang (Biseang Labboro'). Di kawasan ini selain terdapat stalaktit yang indah juga terdapat beberapa jenis flora dan fauna yang dilindungi. Serta menawarkan panorama alam pegunungan yang menawan. Untuk menuju lokasi ini hanya ditempuh jarak kurang lebih 18 km dari Ibukota Kabupaten Maros.

Cagar alam Karaenta. Merupakan salah satu cagar alam nasional dan kawasan hutan yang dilindungi karena disamping dapat mempertahankan kelestarian cadangan air di bawah tanah juga merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna sebagai sumber daya hayati serta aset lingkungan hidup nasional. Dalam kawasan ini terdapat beberapa goa, salah satu diantaranya adalah Goa Salikang Kallang. Selain itu, terdapat sungai yang indah membelah gunung sampai ke Danau Toakala. Di kawasan ini terdapat pula kera jenis Maccala Maura yang sudah langka.

Air terjun Bonto Somba Terletak di desa Bonto Somba Kecamatan



Tanralili. Untuk menuju ke lokasi tersebut ditempuh dengan jarak kurang lebih 25 km arah dari ibukota Kabupaten Maros atau sekitar 55 km dari Kota Makassar. Air Terjun Bonto Somba telah dipersiapkan sebagai kawasan objek wisata yang diharapkan akan setara dengan objek wisata alam Bantimurung sehingga dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya masyarakat desa Bonto Somba.

Taman safari Pucak. Terletak di Desa Pucak Kecamatan Tanralili. Perjalanan menuju lokasi ini ditempuh dengan jarak kurang lebih 20 km dari Ibukota Kabupaten Maros dan sekitar 50 km dari Kota Makassar. Dengan luas areal 150 Ha yang dipersiapkan sebagai lokasi kebun binatang terbesar di Kawasan Timur Indonesia.

Sungai Pute (Batu Napara). Terletak di Desa Salenrang Kecamatan Maros Utara dengan jarak sekitar 5 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Dengan air yang jernih dan latar belakang jejeran pegunungan yang indah, ditambah pohon bakau dan nipa yang hijau sepanjang sungai menjadikan lokasi ini sangat potensial untuk menjadi tempat transit bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah-daerah, utamanya wisatawan mancanegara.

Permandian air panas Reatoa. Terletak di Dusun Rea Toa Kecamatan Mallawa dengan jarak tempuh menuju lokasi sekitar 60 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Kawasan objek wisata ini memiliki potensi besar sehingga perlu untuk segera dikembangkan.

Taman prasejarah Leang-Leang. Terletak pada deretan bukit kapur yang curam di Kelurahan Kallabirang Kecamatan Bantimurung dengan jarak tempuh sekitar 17 km dari Ibukota Kabupaten Maros dengan luas kawasan 5.498 m². Para arkeolog berpendapat bahwa beberapa goa yang terdapat disana telah dihuni sekitar 8000-3000 tahun sebelum masehi. Selain itu di Kabupaten Maros banyak juga terdapat situs, benda dan kawasan cagar budaya yang bisa dijadikan tujuan wisata.

Daftar Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

| No | NAMA OBYEK | KATEGORI | LOKASI |
|----|------------|----------|-------------------|
| 1 | Jarie | Situs | Kecamatan Simbang |



| | | | |
|----|--------------|-------|-----------------------|
| 2 | Tampuang | Situs | Kecamatan Simbang |
| 3 | Saripa | Situs | Kecamatan Simbang |
| 4 | Karrasa | Situs | Kecamatan Simbang |
| 5 | Kado | Situs | Kecamatan Simbang |
| 6 | Burung 1 | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 7 | Burung 2 | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 8 | Pangie | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 9 | Sampeang | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 10 | Ulu Leang | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 11 | Ambe Paco | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 12 | Elle Pusae | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 13 | Bettue | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 14 | Uluwae | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 15 | Pajae | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 16 | Pettae | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 17 | Pettakere | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 18 | Tinggi Ada | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 19 | Baratedong 1 | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 20 | Baratedong 2 | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 21 | Alla Birang | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 22 | Pallenge | Situs | Kecamatan Bantimurung |



| | | | |
|----|---------------|-------|-----------------------|
| 23 | Bara Jarang | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 24 | Pabbuno Juku | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 25 | Lompoa | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 26 | Bembe | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 27 | Timpuseng | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 28 | Batu Karope | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 29 | Bulu Tungke'e | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 30 | Barugayya | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 31 | Pa'limukang | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 32 | Tanre | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 33 | Balang | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 34 | Jing | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 35 | Sengkae | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 36 | Bata-battae | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 37 | Pacce-pacce | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 38 | Bulu Buttue | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 39 | Boddong | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 40 | Canggoreng | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 41 | Samongkeng 1 | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 42 | Samongkeng 2 | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 43 | Samongkeng 3 | Situs | Kecamatan Bantimurung |



| | | | |
|----|-----------------|-------|-----------------------|
| 44 | Samongkeng 4 | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 45 | Lambatorang | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 46 | Pucu | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 47 | Wanue | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 48 | Tenggae | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 49 | Bulu Kamase | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 50 | Panampu 1 | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 51 | Panampu 2 | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 52 | Bungaeja 1 | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 53 | Bungaeja 2 | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 54 | Maddauseng | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 55 | Botto | Situs | Kecamatan Bantimurung |
| 56 | Batu Tianang | Situs | Kecamatan Bontoa |
| 57 | Karama/Akkarasa | Situs | Kecamatan Bontoa |
| 58 | Pasaung | Situs | Kecamatan Bontoa |
| 59 | Sipong 1 | Situs | Kecamatan Bontoa |
| 60 | Sipong 2 | Situs | Kecamatan Bontoa |
| 61 | Sipong 3 | Situs | Kecamatan Bontoa |
| 62 | Monroe | Situs | Kecamatan Bontoa |
| 63 | Cempae | Situs | Kecamatan Bontoa |
| 64 | Wajan Raksasa | Situs | Kecamatan Turikale |



| | | | |
|----|---------------------------|--|-----------------------|
| 65 | Beduk tertua | | Kecamatan Turikale |
| 66 | Pedang V.O.C | | Kecamatan Turikale |
| 67 | Kerangka Manusia Leang | | Kecamatan Simbang |
| 68 | Bendungan Batu Bassi | | Kecamatan Simbang |
| 69 | Gudang mesiu | | Kecamatan Simbang |
| 70 | Prasasti Jepang | | Kecamatan Simbang |
| 71 | Bunker Jepang | | Kecamatan Mandai |
| 72 | Makam La Makkulau Arung | | Kecamatan Bantimurung |
| 73 | Makam Arung Macege | | Kecamatan Camba |
| 74 | Makam Karaeng Bontoa | | Kecamatan Bontoa |
| 75 | Makam Kareang Lalang | | Kecamatan Bontoa |
| 76 | Makam Nahkoda | | Kecamatan Bontoa |
| 77 | Balla Lompoa | | Kecamatan Turikale |
| 78 | Kantor Pengadilan Lama | | Kecamatan Turikale |
| 79 | Kantor Kejaksaan Lama | | Kecamatan Turikale |
| 80 | Rumah Sakit Lama | | Kecamatan Turikale |
| 81 | Penjara Lama | | Kecamatan Turikale |
| 82 | Rumah Kodok | | Kecamatan Turikale |
| 83 | Kantor Pemerintah Belanda | | Kecamatan Turikale |

Sumber data :Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2025

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Maros telah berhasil menarik investor untuk berinvestasi dalam bidang pariwisata di Kabupaten Maros. Hal ini ditandai dengan terbangunnya sebuah tempat wisata baru yang dikelola oleh



swasta yaitu Maros Waterpark. Tempat wisata ini sangat mudah untuk dicapai karena jaraknya yang tidak jauh, hanya berjarak sekitar 1 km dari Taman Wisata Alam Bantimurung. Pemerintah Daerah kabupaten Maros juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan tempatwisata baru yang dikelola bersama dengan Pemerintah Desa seperti tempat wisata Doli di Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung dan Lambe-Lambe yang berada di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung.

Perhelatan Akbar Tahunan sebagai Ajang Promosi Potensi dan Investasi unggulan bertajuk Apkasi Expo 2024 (AOE2024) terselenggara sebanyak 1 kali yang dilaksanakan di Jakarta

Daftar Penvelenggaraan Expo

| No | Nama Kegiatan | Jumlah | Ket. |
|----|--|---------------|---------------|
| 1. | Pameran Apkasi Otonomi Expo (AOE 2024) | 1 (satu) kali | Tidak Diikuti |

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2025

Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Maros bukan hanya wisatawan lokal melainkan dari Luar Negeri pun banyak yang berkunjung menikmati panorama alam Kabupaten Maros.

DAFTAR KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2019-2024

| TAHUN | TARGET KUNJUNGAN | REALISASI KUNJUNGAN | PERSENTASE |
|-------|------------------|---------------------|------------|
| 2019 | 391.700 | 518.635 | 132% |
| 2020 | 402.000 | 238.456 | 59,32% |
| 2021 | 282.033 | 65.507 | 23,22% |
| 2022 | 500.000 | 584.016 | 116,80% |
| 2023 | 550.000 | 598.526 | 108,00% |
| 2024 | 700.000 | 841.952 | 120,00% |

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2025



JUMLAH PROMOSI EVENT DAERAH YANG TERLAKSANADI DALAM NEGERI TAHUN 2024

| No. | Nama Kegiatan | Jumlah | Keterangan |
|-----|--|---------------|------------|
| 1. | MTQ TkKabupaten | 1 (Satu) Kali | |
| 2. | Gerakan Maros Sehat | 1 (Satu) Kali | |
| 3. | Karst day | 1 (Satu) Kali | |
| 4. | Peringatan Isra Mi'raj | 1 (Satu) Kali | |
| 5. | Dardar Talk | 1 (Satu) Kali | |
| 6. | Gerakan Maros Sehat | 4 (Satu) Kali | |
| 7. | Pasar Murah | 1 (Satu) Kali | |
| 8. | Indonesia Fashion Week | 1 (Satu) Kali | |
| 9. | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kretaif | 1 (Satu) Kali | |
| 10. | MTQ Tingkat Desa | 1 (Satu) Kali | |
| 11. | Festival dan Kongres Anak | 1 (Satu) Kali | |
| 12. | Ramadhan Fest PTB Week | 1 (Satu) Kali | |
| 13. | Sekolah Geopark | 1 (Satu) Kali | |
| 14. | Safari Ramadhan Pemda Maros | 2 (Satu) Kali | |
| 15. | Peringatan Nuzulul Qur'an | 1 (Satu) Kali | |
| 16. | Wira Usaha Pemuda Pemula | 1 (Satu) Kali | |
| 17. | Mappalili Tudang Sipulung | 1 (Satu) Kali | |
| 18. | Workshop Culture Heritage | 1 (Satu) Kali | |
| 19. | Workshop UMKM 14 Kecamatan | 2 (Satu) Kali | |
| 20. | Pemilihan Pemuda Pelopor | 1 (Satu) Kali | |
| 21. | FestivalLomba Seni Siswa Nasional | 1 (Satu) Kali | |
| 22. | Olimpiade Olah raga Siswa Nasional | 1 (Satu) Kali | |
| 23. | Olimpiade Sains Nasional | 1 (Satu) Kali | |
| 24. | Ubur-Ubur Trail Wisata | 1 (Satu) Kali | |



| | | | |
|-----|--|---------------|--|
| 25. | Pekan Olahraga Pelajar daerah | 1 (Satu) Kali | |
| 26. | Porkab KONI | 1 (Satu) Kali | |
| 27. | One Day Adventure Keren Part III | 1 (Satu) Kali | |
| 28. | Gelar Hasil Olahhan Perikanan | 1 (Satu) Kali | |
| 29. | Half Marathon 2024 | 1 (Satu) Kali | |
| 30. | Workshop Dongeng Daerah | 1 (Satu) Kali | |
| 31. | Pemilihan Duta Wisata Dara Daeng | 1 (Satu) Kali | |
| 32. | Dialog Pemuda | 1 (Satu) Kali | |
| 33. | Aksi Kolektif Pencegahan Kekerasan dan Perkawinan Anak | 1 (Satu) Kali | |
| 34. | Hari Keluarga Nasional | 1 (Satu) Kali | |
| 35. | Youth Camp Generasi Pesona Indonesia Kab. Maros | 1 (Satu) Kali | |
| 36. | Youth Marine Camp | 1 (Satu) Kali | |
| 37. | Indonesia Geopark Run Series/Fun Run | 1 (Satu) Kali | |
| 38. | Job Fair | 1 (Satu) Kali | |
| 39. | Hari Kesiapsiagaan Bencana | 1 (Satu) Kali | |
| 40. | Nusantara FUN Walk Experience | 1 (Satu) Kali | |
| 41. | Turnamen Sepak Bola | 1 (Satu) Kali | |
| 42. | Pagelaran Seni Budaya | 1 (Satu) Kali | |
| 43. | Duta Genre | 2 (Satu) Kali | |
| 44. | Mobile Legend (AFK Cup) | 1 (Satu) Kali | |
| 45. | Lomba Olimpiade dan Olahraga Seni (O2SN) | 1 (Satu) Kali | |
| 46. | Turnamen E-Sport | 1 (Satu) Kali | |
| 47. | Panen Pesta Katto Bokko | 1 (Satu) Kali | |
| 48. | Geopark Go To School | 1 (Satu) Kali | |
| 49. | Perayaan tahun Baru Islam 1446 H | 1 (Satu) Kali | |
| 50. | Lomba Gerak Jalan Indah | 1 (Satu) Kali | |



| | | | |
|-----|---|---------------|--|
| 51. | Turnamen Futsal Bupati Cup 2024 | 1 (Satu) Kali | |
| 52. | Pemilihan Duta Demokrasi | 1 (Satu) Kali | |
| 53. | Lomba Balap Perahu Tradisional | 1 (Satu) Kali | |
| 54. | Lomba Motor Cross Transportasi Gaba | 1 (Satu) Kali | |
| 55. | Hari Olah Raga Nasional | 1 (Satu) Kali | |
| 56. | Pesta Panen | 1 (Satu) Kali | |
| 57. | Pekan Literasi | 1 (Satu) Kali | |
| 58. | Pemilihan Duta Anti Narkoba | 2 (Satu) Kali | |
| 59. | Maudu Ada' | 1 (Satu) Kali | |
| 60. | Maudu Parang Cikoang | 2 (Satu) Kali | |
| 61. | Maudu Lompoa | 1 (Satu) Kali | |
| 62. | Pemilihan Dara Daeng Cilik | 1 (Satu) Kali | |
| 63. | Lomba Maudu Jolloro Rammang-Rammang | 1 (Satu) Kal | |
| 64. | Maulid Tarekat Khalawatiah | 1 (Satu) Kal | |
| 65. | Maulid Nabi Muhammad SAW | 1 (Satu) Kal | |
| 66. | Lomba Cipta Menu | 1 (Satu) Kal | |
| 67. | Seminar Pemuda | 1 (Satu) Kal | |
| 68. | Peringatan Hari Santri | 1 (Satu) Kal | |
| 69. | Peringatan hari Sumpah Pemuda | 1 (Satu) Kal | |
| 70. | Hari Kesehatan Nasional | 1 (Satu) Kal | |
| 71 | Milad taurungkana dan Kallolona MKT Maros | 1 (Satu) Kal | |

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2025

**JUMLAH LOKASI YANG MEMPEROLEH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMBINAAN KEMITRAAN USAHA
MASYARAKAT**

| No. | Uraian | Jumlah Yang Terlibat | Keterangan |
|---------------|---------------------------------|----------------------|------------|
| 1. | Kawasan Wisata Kuliner PTB | 98 | Pedagog |
| 2. | Kawasan Wisata Alam Bantimurung | 67 | Pedagog |
| JUMLAH | | 165 | |

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2025

Berkat kreatifitas dan ide cemerlang dari Pemerintah Kabupaten Maros, berawal pada tahun 2012 Kabupaten Maros memiliki sebuah ikon baru yaitu Pusat Kuliner Maros. Pusat kuliner ini terletak tepat di pusat kabupaten Maros dan merupakan hasil dari penataan pedagang kaki lima yang dilakukan secara kekeluargaan dan hingga saat ini Pusat kuliner Maros terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan karena adanya inovasi-inovasi kreatif dari Kepala Daerah untuk menghadirkan suatu kawasan yang bisa mendorong pertumbuhan perekonomian bagi Masyarakat Sosial Kabupaten Maros.

Potensi kehutanan di Kabupaten Maros dapat dilihat dari Jenis hasil hutan yang terproduksi tiap tahunnya, seperti kayu jati, kayu bakar dan bambu mengalami yang pertumbuhan tiap tahunnya. Ketiga jenis hasil hutan ini memiliki keterkaitan langsung dengan orientasi usaha yang berkembang di Kabupaten Maros maupun daerah sekitarnya, terutama Kota Makassar. Kayu Jati merupakan bahan baku bagi industri furniture, kayu bakar memenuhi kebutuhan kegiatan masak, baik oleh penduduk maupun usaha-usaha lainnya, dan untuk bambu dipergunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk kegiatan bangunan yang banyak dilaksanakan. Selain itu juga Kabupaten Maros memiliki potensi Tegakan Pinus yang terdapat di 4 kecamatan yakni, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba dan Kecamatan Mallawa.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk



mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2024, telah menyusun program dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi. Keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan dari masing-masing urusan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maros untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2024**

| OPD KABUPATEN | NAMA PERANGKAT DAERAH | JUMLAH PERSONIL (PNS) |
|----------------------|--|------------------------------|
| Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah Kabupaten Maros | 180 |
| Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD Kabupaten Maros | 58 |
| Inspektorat | Inspektorat Kabupaten Maros | 72 |
| Dinas Daerah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3.156 |
| | Dinas Kesehatan | 982 |
| | Dinas Sosial | 45 |
| | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 61 |
| | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | 19 |
| | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian | 54 |
| | Dinas Kebakaran dan Penyelamatan | 46 |



| | | |
|------------------------|---|-----|
| | Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perhubungan Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 130 |
| | Dinas Lingkungan Hidup | 75 |
| | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 75 |
| | Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan | 58 |
| | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 202 |
| | Dinas Perikanan | 64 |
| | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 48 |
| | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 63 |
| | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan | 56 |
| | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 50 |
| | Dinas Perhubungan | 45 |
| Rumah Sakit Daerah | RSU La Palaloi | 425 |
| Kecamatan | Kecamatan Mallawa | 22 |
| | Kecamatan Cenrana | 25 |
| | Kecamatan Camba | 15 |
| | Kecamatan Simbang | 26 |
| | Kecamatan Bantimurung | 26 |
| | Kecamatan Turikale | 24 |
| | Kecamatan Maros Baru | 22 |
| | Kecamatan Lau | 21 |
| | Kecamatan Bontoa | 27 |
| | Kecamatan Mandai | 30 |
| | Kecamatan Marusu | 30 |
| | Kecamatan Moncongloe | 23 |
| | Kecamatan Tanralili | 28 |
| | Kecamatan Tompobulu | 30 |
| Lembaga Teknis Lainnya | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 50 |
| | Badan Kesbang dan Politik | 28 |
| | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 55 |



| | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | Badan Keuangan dan Asset Daerah | 62 |
| | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 39 |
| | Badan Pendapatan Daerah | 52 |
| | Satuan Polisi Pamong Praja | 68 |
| TOTAL | | 6.915 |

Sumber data : Data BKPSDM Kab. Maros dan Data Kepegawaian OPD terkait, 2025

Adapun pencapaian-pencapaian Pemerintah Kabupaten Maros yang diperoleh dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2024 berupa prestasi / penghargaan yang telah diterima adalah sebagai berikut :

1. Piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih atas dukungan pelaksanaan JKN – KIS atas tercapainya Cakupan Semesta Kabupaten Maros tahun 2019;
2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori PRATAMA;
3. BKN Award, Kategori Penilaian Tingkat Kabupaten / Kota Tipe B;
4. APDESI Award;
5. TPAKD sebagai Percepatan Akses Pembiayaan KUR melalui Data SIKP, Sebagai Penggerak Percepatan Akses Keuangan;
6. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Lima kali berturut- turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014 s/d 2019;
7. Penghargaan Swasti Saba Wistara (Pengembangan) Penghargaan tertinggi Kab/Kota Sehat dengan cakupan Wilayah sebanyak 14 Kecamatan 103 Desa/Kelurahan;
8. Piagam penghargaan sebagai Kategori Humas Kab/Kota dengan Publikasi Media Internal terbaik pada Event Humas Sul – Sel Expo 2019;
9. Pelayanan Publik Terbaik 2019;
10. Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;
11. Penghargaan Atas Prestasi dan Kinerja Pengolahan Sistem Informasi dan Program (SIKP) selama Periode 2019 se- Sulawesi Selatan;
12. Adiwiyata Mandiri 2019;
13. Bantimurung Bulusaraung National Park;
14. Kabupaten yang melaksanakan Percepatan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan sebagai Desa Percontohan Percepatan Pembangunan Ketahanan Keluarga;



15. Pemenang Lomba Kelembagaan Kelompok Kerja Operasional Posyandu Berprestasi.
16. Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)
17. Piagam penghargaan atas pelaksanaan pembelajaran tatap muka berbasis digital dalam era pandemi covid-19
18. Piagam penghargaan sebagai kabupaten penerima anugerah parahita ekapraya tahun 2020 kategori utama.
19. Penghargaan atas partisipasi dalam kegiatan "literacy camp" pada tanggal 27-28 agustus 2021
20. Piagam penghargaan terbaik 1 dalam pengelolaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) Prov. Sulawesi Selatan tahun 2020 pada tahun 2021
21. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 pada tahun 2021.
22. Piagam penghargaan sebagai kabupaten layak anak peringkat PRATAMA tahun 2021.
23. Piagam Penghargaan pemerintah kabupaten dengan implementasi Qris dalam Rangka mendukung ekosistem Transaksi digital.
24. Keterbukaan Informasi badan publik tahun 2021 kategori pemerintah kabupaten/kota sebagai badan publik CUKUP INFORMATIF dalam Implementasi UU no. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
25. Piagam Penghargaan atas dukungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pegawai non ASN pemerintah kabupaten Maros.
26. Penghargaan Penyelesaian Program Masterplan Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2022.
27. Sebagai Provinsi dengan desa Wisata Terbanyak Pada Anugerah desa Wisata Indonesia 2022.
28. KPID Award 2022, sebagai kepala daerah peduli Penyiaran
29. Penghargaan FKPTPI (Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Indonesia) dalam kiprahnya Mendukung Percepatan Pembangunan Pertanian Daerah.
30. LPM Award 2022, Sebagai Kepala daerah Kontributif terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
31. Penghargaan tertinggi Nugra jasa Dharma Pustaloka kategori Pejabat Publik, atas dedikasi dan peran aktif terhadap pengembangan perpustakaan.
32. Terbaik III Nasional Komunitas Peduli Sungai (Komunitas Anak Sungai Ramang2 Sulawesi selatan BBWS Pompengan Jeneberang).



33. SMART CITY
34. Satya Lancana Dharma Aditya karya Mahatva Yodha, Atas Karya bakti dan pengabdian sosial yang telah dilakukan bersama2 dan berkolaborasi dengan karang taruna.
35. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik , Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kabupaten Maros sebagai Badan Publik Cukup Informatif.
36. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022
37. GenPI (Gerakan Pesona Indonesia) Pada Kegiatan *Leader Talks- Digital Transform & digital Innovation Four Tourism* dalam Rangka rakornas Gerakan Pesona Indonesia 2022
38. PKH AWARD Kategori penghargaan bagi pemerintah Daerah Kab/ kota atas dukungan Alikasi Dana Sharing APBD II Tertinggi IV Untuk Pelaksanaan PKH Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022
39. Anugerah Meritokrasi, Penghargaan atas Keberhasilan Menerapkan sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat BAIK
40. Penghargaan Piala ADIPURA Kategori Kota Kecil Tahun 2022 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
41. Penghargaan dari Kemenkumham Republik Indonesia atas Dukungan dan Bantuan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian Pada Wilayah Kerja Kabupaten Maros dengan memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat pada Tahun 2023
42. Piagam Penghargaan Bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Tahun 2023
43. Piagam Penghargaan dari Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan terhadap Prestasi Kabupaten Maros yang mencapai target Non AFP (Acut Flacid Polio) Pada tahun 2023
44. Penghargaan dari BPJS Kesehatan dalam pencapaian UHC (Universal Health Coverage) Tahun 2023
45. Penghargaan Piala ADIPURA 2022 pada Tahun 2023
46. Piagam atas Prestasi Penyelenggaraan Evaluasi Pemerintahan Daerah



(EPPD 2022) dengan Skor 2,68 pada tahun 2023

47. Piagam Penghargaan sebagai Lokus Visitasi Kepemimpinan Nasional Pada Pelatikan Kepemimpinan Nasional Tk. II dari LAN pada tahun 2023
48. Opini WTP yang ke 11 Atas laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 pada Tahun 2023
49. Juara Harapan II Atas Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten /Kota Lokus Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
50. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 (Desa wisata Rammang- Rammang kecamatan Bontoa kabupaten Maros sebagai Desa Wisata Terbaik Dunia Pada Acara Penganugerahan Desa
51. Kabupaten Layak Anak tahun 2023, kategori NINDYA
52. Piagam Penghargaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tentang Peran Aktif dalam Membangun dan Melindungi Serta Mendukung Program Kekayaan Intelektual di Provinsi Sulawesi Selatan
53. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan harapan II Kabupaten Maros, Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023
54. Juara V (Lima) Besar sebagai Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) kategori Daya Tarik Pengunjung Desa Wisata Terbaik.
55. Penghargaan Atas Dukungan Dalam Pelaksanaan Integritas Pelayanan Kesehatan Primer dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2023
56. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan Atas Inovasi POS PHBS (Pengolahan Data dan Informasi Perilaku Hidup Bersih dan sehat Pada Tatanan Rumah Tangga Berbasis Aplikasi KOBO Collect Di Puskesmas Moncongloe) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023
57. Unesco Global Geopark Maros - Pangkep (as Global Geopark Network Institutional Member For the Period 2023 -2026



58. Penghargaan Kepala Perpustakaan Republik Indonesia Atas Inovasi dan Kreasi Pelibatan Masyarakat Terbaik Tahun 2023 Pada Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial TPBIS
59. Penghargaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagai For Outstanding Support Of Indonesia Literature ang The Digital Library Movenment For Young Indonesians Tahun 2023
60. Penghargaan Proklamasi Kategori Proklamasi Lestari dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Tahun 2023
61. Piagam APKASI
62. STUNTING AWARD 2023, Kategori Kawasan Tanpa Rokok, Atas Kontribusi dalam mendukung Pencapaian Bebas Stunting di kabupaten Maros dari Kementerian Desa PDDT , BKKBN, ADINKES
63. Piagam Gubernur Sulawesi Selatan sebagai ategori Kabupaten dengan Komitmen Tinggi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender, Anak, dan Disabilitas
64. Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Kategori Swasti Saba Wiwerda dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2023
65. Penghargaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) pada tahun 2023
66. Penghargaan Atas Partisipasi, Kolaborasi dan Dukungan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Sensus Pertanian 2023 dari Kepala BPS Sulsel
67. Penghargaan ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) TAHUN 2023, KATEGORI MADYA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
68. Penghargaan Sebagai Partisipasi Mitra Terbanyak, pada Seminar Nasional dan Expo Program Matching Fund Kedaireka dari Universitas Hasanuddin Tahun 2023
69. Penghargaan Kemenag Sulsel Atas Perhatian dan Dedikasinya dalam layanan Pendidikan keagamaan di Kabupaten Maros Tahun 2023



70. Penghargaan Anugerah IQRO IKA BKPRMI Mosque Literacy Award Dengan Kategori Muwahid Utama Literasi Masjid dari Pangdam XIV Hasanuddin Tahun 2023
71. Piagam dari Ketua Umum Pimpinan Paripurna Dewan Koperasi Indonesia Sebagai Tokoh Penggerak Koperasi Madya, Atas jasa Kepedulianya terhadap Pengembangan Koperasi.
72. Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia, Atas Rekor Kompetisi Domino Oleh Peserta Terbanyak dari Museum Rekor Dunia Indonesia Tahun 2023
73. Piagam Kepala balai Pengelola Kereta api Sulawesi Selatan atas Dukungan dan Komitmen dalam percepatan pembangunan Kereta Api Sulawesi Selatan tahun 2023
74. Penghargaan Ketua Yayasan dana Islamic Centre IMMIM Sebagai Tokoh Literasi atas jasanya dalam mendorong Kecakapan Literasi tahun 2023
75. Piagam Ketua KPID Sulawesi Selatan atas Anugerah Penyiaran Sulawesi Selatan XVIII KPID Award 2023, Digitalisasi Penyiaran Menopang Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan, Sebagai Kepala Daerah Penggerak FMPPS KPID AWARDS 2023
76. Piagam Lentera Independen Pemerhati Aspirasi Nusantara (LIPAN INDONESIA) Sebagai Pemerhati Bidang Pengembangan Infrastruktur Pertanian di Kabupaten Maros
77. Penghargaan Atas Peran Aktif dalam Membangun, Melindungi dan Mendukung Kekayaan Intelektual SulSel Pada Agenda Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kemenkumham RI
78. Penghargaan Kinerja Berupa alokasi Intensif Fiskal Kinerja Tahun berjalan TA.2023 Kategori Percepatan Belanja Daerah dan Penggunaan Produk dalam Negeri Pada Rapat Koordinasi Nasional (P2DD) tahun 2023
79. Piagam Kementrian Agama Republik Indonesia Atas Partisipasi dan Kontribusi dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam Tahun 2023



80. Anugerah Penghormatan dan Penghargaan Atas Kontribusi, Dedikasi dan Loyalitasnya Pada Organisasi Darul Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Tahun 2023.
81. Kepala Daerah Peduli Media (SMSI AWARD Tahun 2024
82. BAZNAS Award 2024 (Bupati Pendukung Utama Dalam Pengelolaan Zakat)
83. Penghargaan Piala ADIPURA pada Tahun 2024
84. Kategori BAIK Keberhasilan Menerapkan Sistem Merit dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2024 untuk 2023
85. CNN Indonesia Award , Kabupaten Maros sebagai Child Friendly District
86. Piagam Kerjasama Pengembangan Program Literasi
87. Internalisasi Core Value Budaya Kerja ASN berAKHLAK
88. 100 Besar ADWI 2024 (Anugerah Desa Wisata Indonesia)
89. Bupati Maros sebagai Tokoh Pencetus Perda Literasi dan Penggerak Perpustakaan Desa
90. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2023
91. Sebagai Kabupaten/Kota terbaik Tingkat Nasional dalam rangka Kewaspadaan Dini dan Respon terhadap Penyakit yang menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah
92. Manggala Karya Kencana (MKK) terhadap Program Pengendalian Penduduk
93. Pemerintah Daerah Terbaik dalam Penerapan Ecological Fiscal Transfer (EFT)
94. Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024 Kategori Utama
95. Proklamasi Kategori Utama Tahun 2024

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Maros telah melaksanakan program dan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Hal tersebut merupakan implementasi



pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros sebesar Rp. 1.578.958.624.331,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.557.279.562.311,88 atau sebesar 98,63%. Adapaun rincian target dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut :

f.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

f.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta Lain-lain PAD yang Sah. Target peningkatan PAD harus diikuti dengan analisis yang tepat terutama dampaknya terhadap kegiatan- kegiatan perekonomian pada masyarakat secara menyeluruh. Meskipun kontribusi PAD terhadap pendapatan keseluruhan dalam APBD masih tergolong sangat kecil. namun PAD masih merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dari waktu ke waktu masih sangat potensial untuk bisa mengalami peningkatan.

Pada perubahan APBD tahun anggaran 2024, PAD dianggarkan sebesar Rp. **307.957.767.197,00** terealisasi sebesar Rp. **302.023.839.689,88** atau mencapai 98,07% dari target yang ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi PAD Kabupaten Maros tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 307.957.767.197,00 | 302.023.839.689,88 | 98,07 |
| 1 | Pajak Daerah | 182.880.000.000 | 186.964.321.884 | 102,23 |
| 2 | Retribusi Daerah | 20.950.000.000 | 13.891.702.590 | 66,31 |
| 3 | Hasil | 10.514.263.237 | 10.514.263.237,80 | 100,00 |



| | | | | |
|---|---|----------------|-------------------|-------|
| | Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | |
| 4 | Lain-lain PAD yang Sah | 93.613.503.960 | 90.653.551.978,08 | 96,84 |

Sumber : BPKAD, 2025

Dari keempat komponen PAD Retribusi Daerah dan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang capaiannya 100 persen . Melihat belum mencapainya target 100 persen secara keseluruhan realisasi PAD Kabupaten Maros tahun anggaran 2024, maka perlu adanya optimalisasi pemenuhan target pendapatan yang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, diantaranya dengan menggali obyek potensial yang baru

a. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian PAD Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2024 meliputi: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Mineral bukan Logam; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 182.880.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 186.964.321.884,00 atau 102,23%. Pencapaian Pajak Daerah yang mencapai target tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang berangsur baik dari tahun ke tahun. Hal ini memicu semua sektor perekonomian mengalami peningkatan karena tidak adanya lagi pembatasan kepada Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Kondisi tersebut diatas juga dipicu oleh kerja maksimal yang dilakukan oleh Aparat Pemerintahan yang secara maksimal memanfaatkan kondisi yang ada untuk melaksanakan tugas dalam mengelola pajak daerah. Rincian anggaran dan realisasi hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|---|------------------------|---------------------------|---------------|
| | Pendapatan Pajak Daerah | 182.880.000.000 | 186.964.321.884,00 | 102,23 |
| 1 | Pajak Hotel | 3.400.000.000 | 3.098.453.292 | 91,13 |
| 2 | Pajak Restoran | 21.000.000.000 | 22.902.498.840 | 109,06 |
| 3 | Pajak Hiburan | 1.000.000.000 | 1.224.606.953 | 122,46 |
| 4 | Pajak Reklame | 1.500.000.000 | 1.623.335.823 | 108,22 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 34.500.000.000 | 37.728.656.258 | 109,36 |
| 6 | Pajak Parkir | 5.500.000.000 | 5.725.966.286 | 104,11 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 900.000.000 | 990.403.700 | 110,04 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 30.000.000 | 7.610.000 | 25,37 |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 18.700.000.000 | 10.124.502.015 | 54,14 |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 38.500.000.000 | 37.665.336.454 | 97,83 |
| 11 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 57.850.000.000 | 65.872.952.263 | 113,87 |

Sumber: BPKAD, 2025



Sebagian besar jenis pajak daerah yang direncanakan dapat direalisasikan diatas target, kecuali Pajak Sarang Burung Walet sebesar (25,37%), dan Pajak Mineral bukan Logam sebesar (54,14%), dan pajak daerah lainnya dapat melampaui target yaitu Pajak Hiburan sebesar (122,46%) kemudian diikuti oleh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar (113,87%), Pajak Air Tanah sebesar (110,04%), Pajak Penerangan Jalan sebesar (109,36%), Pajak Restoran sebesar (109,06), Pajak Parkir sebesar (104,11%) serta Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan persentase realisasi sebesar (97,83%).

b. Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian PAD Kabupaten Maros meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan Retribusi Izin Trayek.

Pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 20.950.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.13.891.702.590 atau 66,31 %. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran Rp | Realisasi Rp | Persen (%) |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Pendapatan Retribusi Daerah | 20.950.000.000 | 13.891.702.590 | 66,31 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 150.000.000 | 109.056.000 | 72,70 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 100.000.000 | 102.850.000 | 103,85 |



| No | Uraian | Anggaran Rp | Realisasi Rp | Persen (%) |
|----|---|---------------|---------------|------------|
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 150.000.000 | 153.450.000 | 102,30 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar | 3.400.000.000 | 2.354.433.320 | 69,25 |
| 5 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 0 | 89.640.000 | 0 |
| 7 | Retribusi Tempat Pelelangan | 300.000.000 | 298.815.000 | 99,61 |
| 8 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 1.150.000.000 | 926.780.000 | 80,59 |
| 8 | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa | 250.000.000 | 0 | 0 |
| 9 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 300.000.000 | 302.560.000 | 100,85 |
| 10 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga | 6.500.000.000 | 3.838.096.000 | 59,05 |
| 12 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | 8.000.000.000 | 5.546.672.270 | 65,25 |

Sumber: BPKAD, 2025

Retribusi tempat parkir khusus yang hanya ditargetkan sebesar Rp. 1.150.000.000 terealisasi sebesar Rp. 926.780.000 atau sebesar 0,59 %. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000, dan terealisasi sebesar Rp. 5.546.672.270 atau 65,25 %. Sedangkan retribusi dengan realisasi tertinggi adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 dan terealisasi sebesar 102.850.000 atau 103,85 %.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang penerimaannya menjadi bagian dari PAD. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 100%, dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 10.514.263.237 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.



10.514.263.237 atau terealisasi 100%.

Tabel 1.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.514.263.237 | 10.514.263.237 | 100,00 |
| 1 | Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 10.514.263.237 | 10.514.263.237 | 100,00 |

Sumber: BPKAD, 2025

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-Lain PAD Yang Sah terdiri dari: Penerimaan Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah; Pendapatan BLUD; Lain-lain PAD yang Sah Lainnya; dan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah pada tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 93.613.503.960 dan terealisasi sebesar Rp. 90.653.551.978,08 atau sekitar 96,84 persen. Adapun rincian anggaran dan realisasi dari Lain-lain PAD Yang Sah Kabupaten Maros tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|---|-----------------------|--------------------------|--------------|
| | Lain-lain PAD Yang Sah | 93.613.503.960 | 90.653.551.978,08 | 96,84 |
| 1 | Penerimaan Jasa Giro | 4.000.000.000 | 3.495.945.742,69 | 87,40 |
| 2 | Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan | 550.000.000 | 8.091.500 | 1,47 |
| 3 | Hasil Pemanfaatan | 830.000.000 | 712.450.000 | 85,84 |



| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|---|----------------|------------------|------------|
| | BMD yang tidak dipisahkan | | | |
| 4 | Pendapatan dari Pengembalian | 1.300.000.000 | 3.315.041.922,46 | 255 |
| 5 | Pendapatan BLUD | 81.783.503.960 | 81.494.761.828 | 99,65 |
| 6 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 5.150.000.000 | 1.627.260.984,93 | 31,60 |

Sumber : BPKAD, 2025

Capaian realisasi atas Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar 3.315.041.922,46 dari 1.300.000.000 yang ditargetkan atau 255%. realisasi lain-lain PAD yang sah tersebut dikarenakan sumber pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan tidak terealisasi. Pendapatan BLUD terealisasi sebesar 99,65%. Sedangkan Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan terselasisasi hanya sebesar 1,47% atau Rp. 8.091.500 dari target sebesar Rp. 550.000.000.

f.1.2 Pengelolaan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer initerdiri dari: Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antardaerah.

Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik. Rincian pendapatan dana perimbangan dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.



Tabel. 1.6
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | Dana Perimbangan | 1.093.827.181.000 | 1.098.562.992.232 | 100,43 |
| 1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | 14.192.893.000 | 17.341.699.928 | 122,19 |
| 2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 755.528.069.000 | 769.741.955.543 | 101,88 |
| 3 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 133.305.709.000 | 130.286.597.699 | 97,74 |
| 4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 190.800.510.000 | 181.192.739.062 | 94,96 |

Sumber : BPKAD, 2025

1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

a. Bagi Hasil Pajak

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Kabupaten Maros pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 14.192.893.000 dan terealisasi sebesar Rp. 17.341.699.928 atau sekitar 122,19%. Penerimaan bagi hasil pajak diperoleh dari penerimaan Bagi hasil pajak bumi dan pembangunan sektor pertambangan yaitu sebesar Rp.812.265.000 atau 100 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 812.265.000. Sedangkan Bagi Hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak terealisasi sebesar Rp. 215.867.000 atau sebesar 100%. Bagi Hasil cukai tembakau terealisasi sebesar Rp 1.316.318.000 atau sebesar 107,30 %. Rincian anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 1.7
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak
Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Dana Bagi Hasil Pajak | 16.201.266.115 | 19.455.112.163 | 120,08 |



| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|---|---------------|----------------|------------|
| 1 | pajak bumi dan pembangunan sektor pertambangan | 812.265.000 | 812.265.000 | 100 |
| 2 | Bagi Hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pajal 29 Wajib Pajak | 215.867.000 | 215.867.000 | 100 |
| 3 | Dana Bagi Hasil Pasal 21 | 8.118.241.000 | 8.118.241.000 | 100 |
| 4 | Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau | 1.226.756.000 | 1.316.318.000 | 107,30 |
| 5 | DBH Minyak Bumi | 49.000 | 3.059.293.928 | 6.243.457 |
| 6 | DBH Gas Bumi | 385.506.000 | 385.506.000 | 100 |
| 7 | DBH Mineral dan Batu Bara (Landrent) | 20.372.000 | 20.372.000 | 100 |
| 8 | DBH Mineral dan Batu Bara (Royalty) | 2.177.316.000 | 2.177.316.000 | 100 |
| 9 | DBH Kehutanan | 21.589.000 | 21.589.000 | 100 |
| 10 | DBH Perikanan | 1.214.932.000 | 1.214.932.000 | 100 |

Sumber: BPKAD, 2025

b. Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi hasil bukan pajak terdiri atas lima komponen yaitu; Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi.

Penerimaan dari Bagi bukan Hasil Pajak Kabupaten Maros pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp **3.819.764.000** dan terealisasi sebesar Rp **6.879.008.928** atau sebesar 180,08 %. Rincian pendapatan dari bagi hasil bukan pajak adalah sebagai berikut :



Tabel. 1.8
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak
Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 3.819.764.000 | 6.879.008.928 | 180,08 |
| 1 | Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan | 21.589.000 | 21.589.000 | 100 |
| 2 | Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan | 1.214.932.000 | 1.214.932.000 | 100 |
| 3 | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi | 49.000 | 3.059.293.928 | 6.243.457 |
| 4 | Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi | 385.506.000 | 385.506.000 | 100 |
| 5 | Bagi Hasil dari Mineral dan Batu Bara Royalty | 2.177.316.000 | 2.177.316.000 | 100 |
| 6 | Bagi Hasil dari Mineral dan Batu Bara Landerent | 20.372.000 | 20.372.000 | 100 |

Sumber: BPKAD, 2025

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Maros yang bersumber dari DAU pada tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 755.528.069.000 dan terealisasi sebesar Rp. 769.741.955.543 atau 101,88 %. Rincian anggaran dan realisasi DAU Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel. 1.9
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | Dana Alokasi Umum | 755.528.069.000 | 769.741.955.543 | 101,88 |
| 1 | Dana Alokasi Umum | 755.528.069.000 | 769.741.955.543 | 101,88 |

Sumber: BPKAD, 2025

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

a. DAK Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah.

Untuk Tahun 2024 DAK Fisik Kabupaten Maros terdiri dari DAK fisik terdiri dari DAK Bidang Jalan, DAK Bidang Irigasi, DAK Bidang Air Minum, DAK Bidang Sanitasi, DAK Bidang Kesehatan (Kesehatan, Rumah Sakit dan Keluarga Berencana), DAK Bidang Pendidikan (PAUD, SD, SMP dan Perpustakaan), DAK Bidang Perhubungan, DAK Bidang Perumahan, DAK Bidang Pertanian, DAK Bidang Perikanan, DAK Bidang Industri Kecil dan menengah, dan DAK Bidang Lingkungan Hidup. Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik Kabupaten Maros tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel. 1.10
Anggaran dan Realisasi DAK Fisik
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | Dana Alokasi Khusus Fisik | 133.305.709.000 | 769.741.955.543 | 101,88 |
| 1 | Dana Alokasi Khusus Fisik | 133.305.709.000 | 769.741.955.543 | 101,88 |

Sumber : BPKAD, 2025

b. DAK Non Fisik

Untuk Tahun 2024 DAK Non Fisik Kabupaten Maros terdiri dari DAK Bantuan operasional PAUD, DAK tunjangan porfesi guru, DAK tambahan penghasilan guru, DAK Bantuan Operasional Kesehatan, DAK Bantuan Operasional KB, DAK tunjangan khusus guru, DAK dana pelayanan Administrasi kependudukan, DAK Non fisik bidang pariwisata, DAK Non fisik bantuan operasional Pendidikan kesetaraan. Rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik Kabupaten Maros tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 1.11
Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|--------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 190.800.510.000 | 181.192.739.062 | 94,96 |
| 1 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 190.800.510.000 | 181.192.739.062 | 94,96 |

Sumber : BPKAD, 2025

f.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Maros yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel. 1.12

**Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024**

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 1.314.000.000 | 1.302.000.000 | 99,09 |
| 1 | Pendapatan Hibah | 1.314.000.000 | 1.302.000.000 | 99,09 |
| | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 1.314.000.000 | 1.302.000.000 | 99,09 |

Sumber: BPKAD, 2025

f.1.4 Pendapatan Transfer antar Daerah

Penerimaan dari bagi hasil pajak dari provinsi terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tanah, bagi hasil dari pajak rokok, Rincian penerimaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.13 dibawah ini.

Tabel. 1.13

**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024**

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 89.902.810.134 | 69.433.864.390 | 77,23 |
| 1 | Bagi Hasil Pajak | 80.732.810.134 | 65.264.063.890 | 80,84 |
| 2 | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor | 80.732.810.134 | 65.264.063.890 | 80,84 |
| 3 | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 13.500.000.000 | 10.171.498.714 | 75,34 |
| 4 | Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 28.500.000.000 | 20.691.549.766 | 72,60 |
| 5 | Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 250.000.000 | 570.520.771 | 228,21 |



| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|------------------------|----------------|----------------|------------|
| | Tanah | | | |
| 6 | Bagi Hasil Pajak Rokok | 22.482.810.134 | 21.387.216.091 | 95,13 |

Sumber: BPKAD, 2025

f.1.5 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 dijelaskan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi akuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pengelolaan belanja daerah dirumuskan sebagai langkah-langkah dalam upaya untuk mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Pengelolaan belanja mempunyai tiga tujuan pokok yang ingin dicapai yaitu menjamin dijalkannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, menyesuaikan alokasi anggaran dengan arah kebijakan anggaran dan prioritas anggaran, serta menjamin efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran. Pengelolaan belanja daerah akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah daerah seperti *pro poor*, *pro job* dan *pro growth*. Pengelolaan belanja daerah harus mengacu kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif.

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 berpedoman kepada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan



perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja daerah selain digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2024 adalah:

1. Upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas anggaran belanja secara proporsional akan dilakukan melalui memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.
2. Belanja daerah dititik beratkan kepada prioritas pembangunan daerah.
3. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
4. Belanja langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.

2. Target dan Realisasi Belanja

Secara deskriptif belanja daerah dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: **1) Belanja Tidak Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, **2) Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 1.687.019.643.138 dan realisasi sebesar Rp. 1.616.673.246.490,62 atau sebesar 95,83 %.



3. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 1.687.019.643.138 dan terealisasi sebesar 95,83% atau senilai Rp. 1.616.673.246.490,62. Rincian anggaran dan realisasi belanja Daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Maros
Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| | BELANJA DAERAH | 1.687.019.643.138 | 1.616.673.246.490,62 | 95,83 |
| 1 | Belanja Pegawai | 685.954.498.314 | 660.556.918.805 | 95,05 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 389.739.271.243 | 363.649.073.268,62 | 93,31 |
| 3 | Belanja Hibah | 64.416.515.690 | 59.464.428.781 | 92,31 |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial | 1.330.800.000 | 1.270.800.000 | 95,49 |

Sumber: BPKAD, 2025

a. Belanja Pegawai

Pada tahun 2024, belanja pegawai Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 685.954.498.314 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 660.556.918.805 atau 95,05%. Komposisi terbesar pada belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. Adapun rincian komposisi belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | Belanja Pegawai (BTL) | 685.954.498.314 | 660.556.918.805 | 95,05 |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 496.532.470.105 | 481.924.542.076 | 97,06 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 48.902.978.741 | 43.173.832.535 | 88,28 |



| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|--|-----------------|-----------------|------------|
| 3 | Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 113.330.068.647 | 110.181.520.450 | 97,22 |
| 4 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 17.653.068.806 | 16.778.049.576 | 95,04 |
| 5 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 1.781.362.012 | 1.709.089.856 | 95,94 |
| 6 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 801.600.000 | 688.800.000 | 85,93 |
| 7 | Belanja Pegawai BLUD | 6.952.950.000 | 6.101.08.312 | 87,75 |

Sumber: BPKAD, 2025

b. Belanja Hibah

Pada tahun 2024 belanja hibah Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 64.416.515.690 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 59.464.428.781 atau 92,31 %. Komposisi belanja yang terealisasi terdapat pada belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebesar 98,38%, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar 94,48 %, dan Belanja Hibah Dana BOS sebesar 107,63%.

Tabel 1.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Belanja Hibah | 64.416.515.690 | 59.464.428.781 | 92,31 |
| 1 | Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan | 51.333.215.690 | 50.500.675.431 | 98,38 |
| 2 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 850.000.000 | 803.097.100 | 94,48 |



| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|------------------------|---------------|----------------|------------|
| 3 | Belanja Hibah Dana BOS | 7.361.800.000 | 7.923.358.750 | 107,63 |

Sumber: BPKAD, 2025

c. Belanja Transfer

Pada tahun 2024, belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. **156.732.316.100** dan dapat direalisasikan sebesar Rp. **156.686.019.927** atau sebesar 99,97%. Realisasi belanja tersebut, terdiri dari realisasi belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp. 150.035.036.600, atau sebesar 100%, Rincian anggaran dan realisasi Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|---|------------------------|------------------------|--------------|
| | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Pemerintahan Desa | 156.732.316.100 | 156.686.019.927 | 99,97 |
| 1 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | 156.732.316.100 | 156.686.019.927 | 99,97 |

Sumber: BPKAD, 2025

d. Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2024, belanja tidak terduga Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 3.300.000.000 dan hanya terealisasi sebesar 24,37 % atau sebesar Rp. 804.288.500.

4. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung Kabupaten Maros tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. **1.461.240.011.348**, dan terealisasi sebesar Rp. **1.398.447.709.282,6** atau **95,70** % dari total anggaran



yang direncanakan. Rincian realisasi anggaran belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| | BELANJA LANGSUNG | 1.461.240.011.348 | 1.398.447.709.282,6 | 95,70 |
| 1 | Belanja Pegawai | 685.954.498.314 | 660.556.918.805 | 96,30 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 389.739.271.243 | 363.649.073.268,62 | 93,31 |
| 3 | Belanja Modal | 385.546.241.791 | 374.241.717.209 | 97,07 |

Sumber : BKAD, 2025

a. Belanja Pegawai

Pada tahun 2024, belanja pegawai pada belanja langsung Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 685.954.498.314 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 660.556.918.805 atau 96,30%. Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dianggarkan sebesar Rp. 48.902.978.741 dan terealisasi sebesar Rp. 43.173.823.535 atau 88,28%. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai Kabupaten Maros tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | Belanja Pegawai | 685.954.498.314 | 660.559.918.805 | 96,30 |
| 1 | Honorarium PNS | 9.180.088.000 | 8.819.093.450 | 96,07 |
| 2 | Tambahan Penghasilan ASN | 48.902.978.741 | 43.173.823.535 | 88,28 |
| 3 | Belanja Pegawai BLUD | 6.952.950.000 | 6.101.084.312 | 87,75 |

Sumber: BPKAD, 2025

**b. Belanja Barang dan Jasa**

Pada tahun 2024 belanja barang dan jasa Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 389.739.271.243 dan terealisasi sebesar Rp. 363.649.073.268,62 atau 93,31 %. Komposisi belanja barang dan jasa dengan persentase realisasi tertinggi pada Belanja Sewa Tanah dan Bantuan Sosial yang terealisasi sebesar 100%.

Tabel 1.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Pers en (%) |
|----|---|------------------------|---------------------------|--------------|
| | Belanja Barang dan Jasa | 389.739.271.243 | 363.649.073.268,62 | 93,31 |
| 1 | Belanja Bahan Pakai Habis | 80.005.168.058 | 73.704.270.076 | 92,12 |
| 2 | Belanja Bahan/Material | | | |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 88.359.416.275 | 83.830.511.507 | 94,87 |
| 4 | Belanja Premi Asuransi | 26.761.465.984 | 26.305.517.304 | 98,30 |
| 5 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 3.933.511.400 | 3.773.644.461 | 95,94 |
| 6 | Belanja Sewa Tanah | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 |
| 7 | Belanja Sewa Bangunan dan Gedung | 1.884.365.000 | 1.664.675.000 | 88,34 |
| 8 | Belanja Sewa Asset Lainnya | 60.000.000 | 60.000.000 | 100 |
| 9 | Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi | 1.211.609.700 | 1.078.312.375 | 89,00 |
| 10 | Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi | 1.609.140.000 | 1.500.712.500 | 93,26 |
| 11 | Belanja Jasa Ketersediaan layanan | 51.500.000 | 1.375.000 | 2,57 |
| 12 | Belanja kursus. pelatihan. sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 1.573.174.803 | 1.489.873.550 | 94,70 |
| 13 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | 187.500.000 | 46.250.000 | 24,67 |
| 14 | Belanja | 6.645.418.158 | 5.422.612.044,31 | 81,60 |



| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Pers en (%) |
|----|---|----------------|-------------------|-------------|
| | Pemeliharaan | | | |
| 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 35.045.893.736 | 29.843.228.612 | 85,15 |
| 16 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 2.614.500.000 | 2.408.645.000 | 92,13 |
| 17 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 43.440.504.640 | 40.844.377.993 | 94,02 |
| 18 | Belanja barang dan jasa BLUD | 82.582.040.489 | 80.645.516.647,31 | 97,66 |
| 19 | Belanja Hibah | 64.416.515.690 | 59.464.428.781 | 92,31 |
| 20 | Belanja Bantuan Sosial | 1.330.800.000 | 1.270.800.000 | 95,49 |

Sumber: BPKAD, 2025

c. Belanja Modal

Pada tahun 2024 belanja modal Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 385.546.241.791 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 374.241.717.209 atau 97,07%. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Kabupaten Maros tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Maros
Tahun Anggaran 2024

| No | Uraian | Anggaran(Rp) | Realisasi(Rp) | Persen (%) |
|----|----------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | BELANJA MODAL | 385.546.241.791 | 374.241.717.209 | 97,07 |

Sumber : BPKAD, 2025

f.1.6 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat dengan jumlah pendapatan yang terbatas. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang



bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban, serta menjadi kredibilitas pemerintah daerah.

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Maros adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektifitas sumber-sumber pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan

Jumlah pembiayaan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2024 tidak terealisasi atau 100,46% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 108.061.018.807 dengan realisasi sebesar Rp. 18.561.018.807. Rincian target dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 1.22

**Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024**

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
|----|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| | PEMBIAYAAN DAERAH | 108.061.018.807 | 18.561.018.807 | 100,46 |
| 1. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 18.561.018.807 | 18.561.018.807 | 100 |
| | Penggunaan Silpa | 18.561.018.807 | 18.561.018.807 | 100 |
| 2. | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 500.000.000 | 0 | 0 |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD | 500.000.000 | 0 | 0 |
| | Sisa Dana BOS | 0 | 0 | 0 |

Sumber: BPKAD, 2025

Untuk penerimaan pembiayaan daerah capaian realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pembiayaan ini bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tidak ada realisasi.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat di daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan potensi dan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah harus mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), membuktikan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia telah beralih dari sentralisasi menuju kepada desentralisasi, dan berorientasi pada



kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan perencanaan pembangunan jangka panjang yang komprehensif, adaptif serta sinergis, dan penyusunannya dilakukan dengan menerapkan pendekatan ; (1) Pertumbuhan yang tinggi, (2) Pemerataan, (3) Partisipatif, (4) Pembangunan dari bawah ke atas (*bottom up*), (5) Pembangunan dari atas ke bawah (*top-down*), dan (6) Berwawasan lingkungan/berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros disusun sebagai perwujudan dari amanat kedua Undang-Undang tersebut. Kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Maros ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2021-2026 (Lembaran Daerah No. 4 Tahun 2016).

Dalam menyusun RPJMD ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang telah disampaikan melalui Sidang Paripurna DPRD dan semasa pelaksanaan kampanye pemilihan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. Disamping itu, penyusunan RPJMD Daerah ini juga mengacu pada RPJP Kabupaten Maros, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan/Renstra Provinsi Sulawesi Selatan, dan RPJP Nasional, dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat termasuk sasaran pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Tujuan utama penyusunan RPJMD Kabupaten Maros adalah:

1. Menyajikan program dan kegiatan turunan Visi dan Misi pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang akan dilaksanakan sebagai program dan kegiatan prioritas utama;
2. Menyajikan gambaran tentang arah kebijakan umum yang wajib diikuti oleh semua pejabat daerah dan DPRD dalam menyusun RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD serta R-APBD dan DPA pada setiap tahun anggaran.

Sedangkan sasaran penyusunan RPJMD Kabupaten Maros 2021-2026 adalah :

1. Kesiapan Kebijakan dan Program Pembangunan dalam skala periode yang lebih jelas dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan

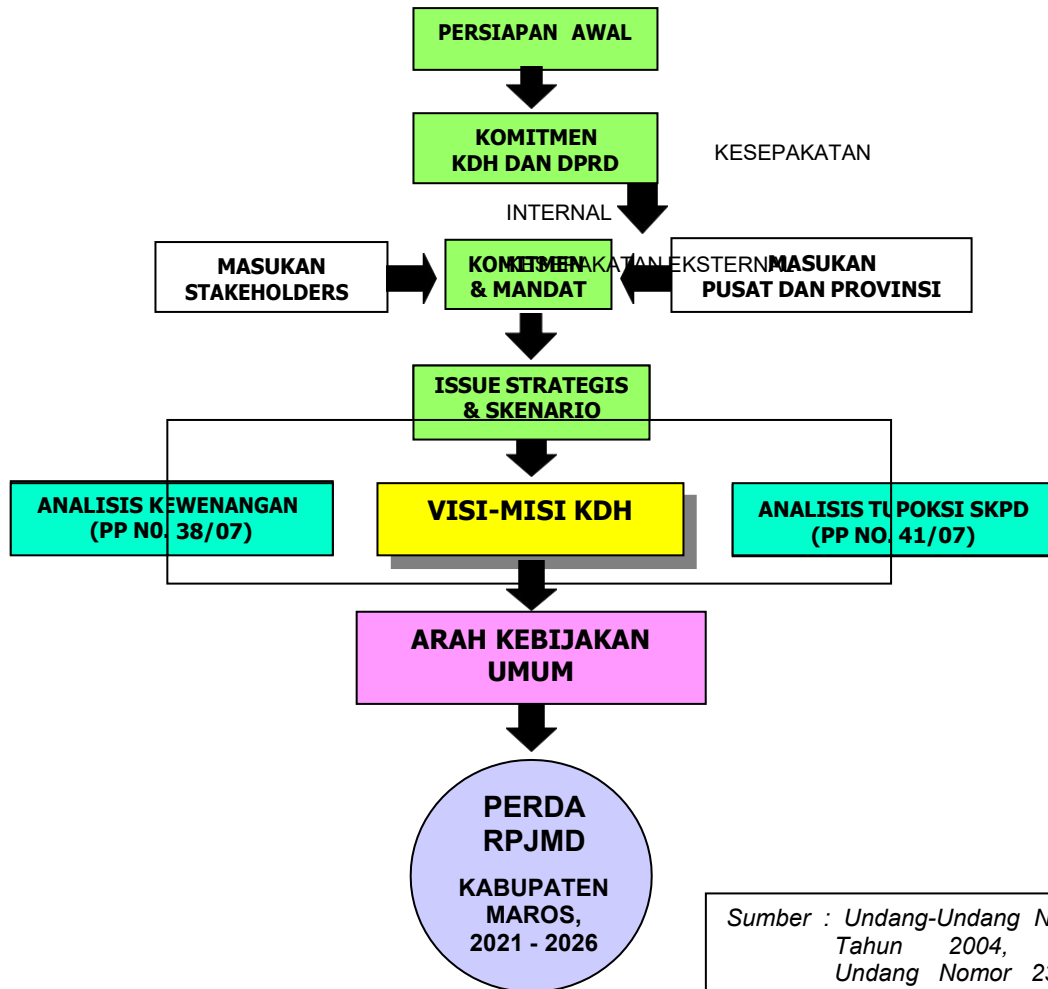


dan pengawasan pembangunan.

2. Ketersediaan rumusan program pembangunan yang merupakan indikasi program yang tertuang dalam APBD.
3. Merupakan persetujuan dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Maros dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros serta masyarakat terhadap pembangunan daerah.

Tahapan proses penyusunan, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar I.1.

Gambar I.1
Pola Pikir dan Proses Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Maros Tahun 2021-2026



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010.



Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen RPJMD juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nantinya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan dan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati yang nantinya diserahkan kepada DPRD Kabupaten Maros.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Maros digambarkan melalui kajian data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah Kabupaten Maros. Gambaran umum kinerja Kabupaten Maros tidak semua menggambarkan penurunan capaian, namun hal ini dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan Kabupaten Maros dengan dasar bahwa Kabupaten Maros sudah tidak lagi mentolelir kondisi-kondisi minor seperti angka kemiskinan, pemukiman kumuh dan kondisi minor lainnya.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Maros secara umum dapat terpilah pada kualitas sumberdaya manusia yang masih perlu ditingkatkan, Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu di tingkatkan.

b. Visi dan Misi

Pembangunan Daerah merupakan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat di daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan potensi dan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah harus mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Namun proses pembangunan yang dilakukan selama ini, tidak hanya menghasilkan kemajuan dan keberhasilan, tetapi juga menyisakan dampak



berupa permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Ragam permasalahan tersebut menuntut perhatian untuk menjamin keberlangsungan pembangunan ke arah yang lebih baik, demokratis dan berkeadilan. Dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta kemampuan mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki. Perubahan lingkungan eksternal, baik lingkungan global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai bidang tetap harus menjadi referensi dalam perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah.

Dibutuhkan pula sebuah Visi menyangkut kemana daerah dan instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan rumusan umum dan gambaran mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Maros, dengan memperhatikan RPJP Kabupaten Maros 2005-2025, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, dan RPJM Nasional, serta dinamika lingkungan strategis maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, yaitu:

“MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING”

Yang dimaksud sejahtera menurut pengertian Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yaitu suatu kondisi Masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kondisi masyarakat Kabupaten Maros pada tahun 2024 yang **lebih baik** dari kondisi sebelumnya pada beberapa sektor kehidupan Masyarakat yang ditandai dengan :

1. Terpenuhinya Hak Dasar Masyarakat Seperti: Kecukupan Pangan, Papan, Dan Sandang Yang Bermutu, Kecukupan Kebutuhan dan Ketersediaan Akan Layanan Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Pekerjaan, Lingkungan Yang Bersih, Aman, Damai, dan Nyaman Serta Akses Untuk Berpartisipasi.



2. Tersedianya Infrastruktur Dasar Pendukung Pelayanan Publik Dan Pembangunan Daerah yang Lebih Berkualitas dan Merata.
3. Terjaminnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kerangka *Good Governance And Clean Government*.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, maka sangatlah perlu dilakukan sinergi yang dinamis antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta/Dunia Usaha serta seluruh stakeholders secara terpadu.

Guna Menyatukan langkah, gerak, dan tindakan yang nyata bagi seluruh stakeholders pembangunan Daerah dan seluruh komponen Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Maros baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskanlah Misi dengan tetap memperhitungkan kondisi, permasalahan, serta tantangan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia;
3. Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif;
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal;
5. Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD 2021-2026

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Maros mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja, kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi



akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program - program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan dan pengendalian.

Untuk mendukung visi “**MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING**” maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Maros periode 2021 – 2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Maros melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

6.1. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan pada Bab V, diperlukan strategi yang menurut Permendagri No. 86 tahun 2017, merupakan rangkaian tahapan ataulangkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih darisatu sasaran. Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan strategi RPJMD Kabupaten Maros periode tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:



1. Misi 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik

- Tujuan 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran 2: Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas

Strategi: Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

2. Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia

- Tujuan 2: Menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat

Strategi : Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi.

Sasaran 4: Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan keagamaan Strategi: Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Kabupaten Maros berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat

Sasaran 5: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan daam perspektif gender

Strategi: Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

3. Misi 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif

- Tujuan 3: Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan



ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat

Sasaran 6: Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat

Strategi : Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi utamanya menjelang hari besar keagamaan.

Sasaran 7: Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat

Strategi : Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM

4. Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal

- Tujuan 4: Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulansumberdaya ekonomi daerah

Sasaran 8: Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap

PDRB Strategi : Penguatan terhadap lapangan usaha penyumbang kontribusi PDRB yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Maros yang terdiri dari: sektor pertanian; industri pengolahan; konstruksi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, danjaminan sosial wajib.

Sasaran 9: Menurunnya jumlah pengangguran

Strategi : Peningkatan penyerapan tenaga kerja utamanya melalui sektor –sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja. Sasaran 10: Terkendalinya Laju Inflasi.

Strategi : Penguatan ketahanan pangan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam yang disertai dengan penguatan sinergi antar



lembaga terkait.

Sasaran 11: Menurunnya jumlah masyarakat miskin

Strategi : Pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial tanpa Diskriminasi dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

5. Misi 5: Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah

- Tujuan 5: Menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di tiapwilayah

Sasaran 12: Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat

Strategi : Peningkatan fungsi layanan dan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintahlainnya.

6. Misi 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

- Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 13: Menurunnya Tingkat Pencemaran lingkungan

Strategi: Peningkatan integrasi antara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup

Tujuan 7: Menurunkan resiko bencana

Sasaran 14: Menurunnya resiko akibat bencana

Strategi : Peningkatan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten.berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.

Selanjutnya keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi dalam RPJMD periode 2021 – 2026, disajikan dalam tabel berikut ini:



Visi, Misi, Tujuan, Sasarandan Strategi Kabupaten Maros

| VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING | | | | |
|--|---|---------|--|--|
| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI |
| MISI 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik | | | | |
| 1 | Menciptakan tatakelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi | 1 | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). |
| | | 2 | Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas | |
| MISI 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia | | | | |
| 2 | Menciptakan kualitas sumber dayamanusia | 3 | Meningkatnya kualitashidup masyarakat | Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi. |
| | | 4 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan | Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Kabupaten Maros berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat |
| | masyarakat yang berdaya saing | 5 | Meningkatnya kualitasdan kuantitas pembangunan daam perspektif gender | Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. |
| MISI 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif | | | | |
| 3 | Mengoptimalka npemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan | 6 | Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang danjasa kebutuhan konsumsi masyarakat | Pemanfaatan teknologi informasi danpenguatan kerja sama untuk menjagaketerjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi utamanya menjelang hari besar keagamaan. |



| | | | |
|------------------|---|--|---|
| dasar masyarakat | 7 | Terpenuhinya standarpelayanan minimum masyarakat | Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dandunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM |
|------------------|---|--|---|



MISI 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal

| | | | | |
|---|---|----|---|--|
| 4 | Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya daerah | 8 | Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap PDRB | Penguatan terhadap lapangan usaha penyumbang kontribusi PDRB yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Maros yang terdiri dari: sektor pertanian; industri pengolahan; konstruksi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. |
| | | 9 | Menurunnya jumlah pengangguran | Peningkatan penyerapan tenaga kerjanya melalui sektor – sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja. |
| | | 10 | Terkendalnya Laju Inflasi | Penguatan ketahanan pangan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam yang disertai dengan penguatan sinergi antar lembaga terkait. |
| | | 11 | Menurunnya jumlah masyarakat miskin | Pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial tanpa Diskriminasi dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. |

MISI 5: Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah



| | | | | |
|---|--|----|--|---|
| 5 | Mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah | 12 | Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat | Peningkatan fungsi layanan dan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya. |
| MISI 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana | | | | |
| 6 | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 13 | Menurunnya Tingkat Pencemaran lingkungan | Peningkatan integrasi antara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup |
| 7 | Menurunkan resiko bencana | 14 | Menurunnya resiko akibat bencana | Peningkatan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana. |

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program pembangunan operasional OPD yang tidak menjadi prioritas kebijakan tidak berjalan. Program tersebut tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibandingkan dengan program yang merupakan kebijakan yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah tersebut



adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan melahirkan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Keterkaitan tema atau fokus pembangunan, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Maros sebagaimana digambarkan berikut ini:

Tema Pembangunan Kabupaten Maros Periode tahun 2021 – 2026

| TEMA TAHUN 2022 | TEMA TAHUN 2023 | TEMA TAHUN 2024 | TEMA TAHUN 2025 | TEMA TAHUN 2026 |
|--|---|--|---|---|
| Meningkatkan Daya Saing melalui ketahanan Ekonomi, Pelayanan Dasar dan Pembangunan SDM secara Inklusif | Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial Masyarakat melalui infrastruktur wilayah dan peningkatan kualitas SDM | Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pembangunan wilayah dan pengembangan SDM | Percepatan pembangunan wilayah yang berkualitas untuk mewujudkan pemerataan wilayah | Meningkatkan pembangunan Manusia yang produktif dan berkarakter |

Strategi dan arah kebijakan daerah dimaksudkan sebagai landasan operasional pembangunan Kabupaten Maros agar dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan mencakup seluruh aspek dan bidang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maros dalam kurun waktu 2021 - 2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, pemerintah Kabupaten Maros memiliki strategi untuk mencapai sasaran dari **misi pertama**, yaitu :

1. Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua



- wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
2. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi.
 3. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Kabupaten Maros berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat.
 4. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
 5. Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi utamanya menjelang hari besar keagamaan.
 6. Peningkatan_kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM.
 7. Penguatan terhadap lapangan usaha penyumbang kontribusi PDRB yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Maros yang terdiri dari: sektor pertanian; industri pengolahan; konstruksi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, danjaminan sosial wajib.
 8. Peningkatan penyerapan tenaga kerja utamanya melalui sektor – sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja. Sasaran 10: Terkendalnya Laju Inflasi.
 9. Penguatan ketahanan pangan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi serta menjaga kelancaran distribusi melalui



optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam yang disertai dengan penguatan sinergi antar lembaga terkait.

10. Pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial tanpa Diskriminasi dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
11. Peningkatan fungsi layanan dan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya.
12. Peningkatan integrasi antara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
13. Peningkatan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten.berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.



Tabel 1.23
Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2021 – 2026 Berdasarkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi pada setiap Misi

| VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING | | | | | |
|--|--|----------|--|--|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | |
| | | | TAHUN 2024 | | |
| MISI 1 : Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik | | | | | |
| 1 | Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi | 1 | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). | Penguatan pengelolaan akuntabilitas kinerja |
| | | | | | Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui penerapan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan realisasi perjanjian kinerja yang disepakati. |
| | | | | | Pengintegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan ke dalam Sistem pemerintahan berbasis elektronik. |
| | | | | | Penyempurnaan berbagai produk hukum daerah yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan |
| | | | | Penguatan pengawasan melalui Peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |



| VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING | | | | |
|---|---------|---|----------------|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | |
| | | | TAHUN 2024 | |
| | | | | <p>Pembinaan Penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan, yang meliputi: pembinaan terhadap struktur organisasi, pembinaan terhadap budaya organisasi, dan pembinaan terhadap inovasi organisasi.</p> <p>Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang meliputi: Pemantauan terhadap pelaksanaan penataan perangkat Daerah, Pendampingan terhadap pelaksanaan penataan perangkat Daerah, dan Evaluasi pelaksanaan penataan perangkat Daerah.</p> <p>Penilaian kepuasan terhadap pelayanan melalui survei kepuasan, keterbukaan akses terhadap hasil survei kepuasan, dan tindak lanjut atas hasil survey.</p> <p>Peningkatan mutu, jenis layanan, dan penerima layanan dasar</p> <p>Pendelegasian kewenangan terkait pelaksanaan pelayanan publik</p> |
| | 2 | Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas | | |
| MISI 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia | | | | |
| | | | | <p>Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun</p> <p>Peningkatan kualitas dan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk Peningkatan</p> |



| VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING | | | |
|--|--------------|--|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| | | | TAHUN 2024 |
| 2 | 3 | Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi | kesejahteraan tenaga pendidik (PNS dan PPPK) |
| | | | Pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah |
| | | | Peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, dan daya saing pendidikan. |
| | | | Penghapusan iuran komite sekolah. |
| | | | Penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru dan beasiswa untuk mahasiswa |
| | | | Penguatan terhadap upaya mendorong minat baca masyarakat |
| | | | Peningkatan ketersediaan perpustakaan/taman bacaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat |
| | | | Peningkatan kerjasama dengan kampus - kampus dan seluruh lembaga penelitian terkait budaya pendidikan |
| | | | Peningkatan akses bagi disabilitas dan masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan |
| | | | Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi |
| | | | Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB |
| | | | Percepatan penurunan stunting dengan pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak |
| | | | Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit |
| | | | Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat |
| | | | Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan |
| Pemenuhan dan peningkatan kompetensi serta kesejahteraan tenaga kesehatan | | | |
| Pemenuhan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan | | | |
| Pelindungan dan pemenuhan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan. | | | |
| Pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpul data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan | | | |
| | Meningkatnya | | |



| VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING | | | |
|--|---------|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| | | | TAHUN 2024 |
| | 4 | kualitas layanan keagamaan | <p>Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan</p> <p>Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong</p> <p>Peningkatan Kesejahteraan (Insentif) bagi Imam masjid, guru mengaji, pastor, pendeta, guru sekolah minggu/remaja dan pegawai syara'</p> <p>Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan</p> <p>Pemberdayaan dana sosial keagamaan dan pengembangan kelembagaan ekonomi umat</p> <p>Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat aktifitas keagamaan dan syiar.</p> <p>Pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal yang bernilai religius</p> <p>Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya dalam pendidikan keagamaan</p> <p>Pembinaan terhadap organisasi sosial dan kemasyarakatan</p> <p>Penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup</p> <p>Pelibatan Masyarakat secara aktif dalam mengemukakan pendapat atau saran pada pengambilan kebijakan publik.</p> |
| | 5 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan daam perspektif gender | <p>Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.</p> <p>Pemberdayaan perempuan di semua sektor pembangunan</p> <p>Pengintegrasian perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian.</p> <p>Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO</p> <p>Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan politik</p> <p>Perluasan kesempatan dalam berorganisasi serta berkreasi secara bebas dan bertanggung jawab.</p> <p>Peningkatan upaya penurunan kasus perkawinan usia muda bagi pemuda perempuan</p> |



| VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING | | | | | |
|--|--|----------|---|---|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | |
| | | | TAHUN 2024 | | |
| | | | | Peningkatan akses bagi pemuda perempuan mendapatkan pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi | |
| | | | | Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi pemuda perempuan utamanya padasektor formal | |
| MISI 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif | | | | | |
| 3 | Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat | 6 | Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa untuk konsumsi masyarakat | Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi utamanya menjelang hari besar keagamaan. | Pemantauan perkembangan harga dan pasokan barang dan jasa kebutuhan masyarakat |
| | | | | | Pengidentifikasian jumlah stok barang dan jasa beserta ketersediaannya di setiap wilayah kecamatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah terjadinya aksi spekulasi. |
| | | | | | Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa sampai ke tingkat pedagang di pasar rakyat. |
| | | | | | Pelaksanaan penetrasi pasar menjelang peringatanhari - hari besar untuk menegaskan kecukupan stok dan pasokan barang dan jasa kebutuhan masyarakat |
| | | | | | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja |
| | | | | | Pemenuhan standar pelayanan pendidikan anak usia dini |
| | | 7 | Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat | Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM | Pemenuhan standar pelayanan pendidikan dasar (SD Sederajat dan SMP sederajat) |
| | | | | | Pemenuhan standar pelayanan pendidikan kesetaraan |
| | | | | | Pemenuhan standar pelayanan kesehatan |
| | | | | | Pemenuhan standar pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari - hari |
| Pemenuhan standar pelayanan pengolahan air limbah domestik | | | | | |
| Pemenuhan standar pelayanan | | | | | |



| VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING | | | |
|--|---------|----------|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| | | | TAHUN 2024 |
| | | | penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana |
| | | | Pemenuhan standar pelayanan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi |
| | | | Pemenuhan standar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum |
| | | | Pemenuhan standar pelayanan informasi rawan bencana |
| | | | Pemenuhan standar pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |
| | | | Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana |
| | | | Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran |
| | | | Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas |
| | | | Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak telantar |
| | | | Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar |
| | | | Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis |
| | | | Pemenuhan standar pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana |
| | | | Percepatan pembangunan wilayah (Desa/Kelurahan) dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar. |
| | | | Peningkatan kualitas SDM pengelola pelayanan dasar |
| | | | Penguatan peran kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar di wilayah |
| | | | Peningkatan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar |



| VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING | | | | | |
|---|---|----------|---|---|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | |
| | | | TAHUN 2024 | | |
| | | | | Perluasan jangkauan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakselerasi pelayanan dasar | |
| MISI 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal | | | | | |
| 4 | Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya daerah | 8 | Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap PDRB | <p>Penguatan terhadap lapangan usaha penyumbang kontribusi PDRB yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Maros yang terdiri dari: sektor pertanian; industri pengolahan; konstruksi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.</p> | Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pengelolaan lapangan usaha pertanian dan perikanan |
| | | | | | Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja |
| | | | | | Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi |
| | | | | | Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil dan industrialisasi |
| | | | | | Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro |
| | | | | | Peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan ekonomi utamanya pada sektor pertanian, pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital |
| | | | | | Peningkatan kualitas produksi terutama pada komoditi yang berpeluang ekspor |
| | | | | | Penyediaan bantuan modal, infrastruktur, alsintan, pupuk, alat tangkap, bibit dan asuransi bagi petani serta nelayan |
| | | | | | Pemanfaatan keberadaan potensi world heritage pada bentangan kawasan karst maros sebagai tujuan wisata internasional |
| | | | | | Pengembangan destinasi wisata baru dan peremajaan destinasi wisata lama |



| VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING | | | |
|--|---------|--------------------------------|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| | | | TAHUN 2024 |
| | | | Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) |
| | | | Pengembangan infrastruktur utama dan pendukung kepariwisataan |
| | | | Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha kreatif dan digital |
| | | | Pendampingan dan inkubasi usaha ekonomi kreatif |
| | | | Pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif |
| | | | Peningkatan populasi pelaku usaha digital |
| | | | Pengembangan maros creative center |
| | | | Perluasan aktivitas ekonomi kreatif |
| | | | Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi untuk ekonomi kreatif dan digital |
| | | | Pengoptimalan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.1 |
| | 9 | Menurunnya jumlah pengangguran | Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja |
| | | | Peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja |
| | | | Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan |
| | | | Perluasan kesempatan kerja melalui Penciptaan lapangan kerja dan budaya masyarakat bekerja |
| | | | Peningkatan kerjasama lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pemberi kerja. |
| | | | Pengembangan tenaga kerja pemuda berbasis teknologi informasi dan kebutuhan pasar kerja |
| | 10 | Terkendalinya Laju Inflasi | Peningkatan ketersediaan komoditas pangan |
| | | | Peningkatan dukungan infrastruktur dan logistik |
| | | | Penguatan kerjasama dengan institusi lain |
| | | | Penguatan ketahanan pangan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi serta menjaga kelancaran distribusi |



| VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING | | | |
|--|---------|---|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| | | | TAHUN 2024 |
| | | melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam yang disertai dengan penguatan sinergi antar lembaga terkait. | <p>Peningkatan akses pasar melalui kemitraan antara petani dengan pedagang/industri pengolahan/pasar modern. Optimalisasi peran TPID</p> <p>Penguatan sistem informasi dan peningkatan akses pemasaran</p> |
| | 11 | Menurunnya jumlah masyarakat miskin | <p>Pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial tanpa Diskriminasi dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.</p> <p>Pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan</p> <p>Peningkatan usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga</p> <p>Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan dengan skema pembinaan usaha serta kemitraan usaha</p> <p>Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha</p> <p>Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu</p> <p>Percepatan pelaksanaan dan peningkatan keterpaduan program/kegiatan pengentasan kemiskinan berperspektif gender.</p> <p>Peningkatan akses dan penerima manfaat bagi penduduk miskin perempuan dan laki-laki terhadap pelayanan dasar, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta kesempatan pada usaha ekonomi produktif.</p> <p>Penyediaan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu termasuk penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru</p> <p>Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi masyarakat miskin dan rentan</p> <p>Penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk penyediaan subsidi pembayaran iuran BPJS</p> <p>Penguatan pelaksanaan jaminan sosial komprehensif dan terintegrasi</p> |



| VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING | | | | | |
|--|--|----------|---|---|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | |
| | | | TAHUN 2024 | | |
| | | | Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat | | |
| MISI 5: Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah | | | | | |
| 5 | Mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah | 12 | Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat | | |
| | | | | Peningkatan fungsi layanan dan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya. | |
| | | | | | Peningkatan dan Pemantapan kondisi jaringan jalan dan jembatan beserta prasarana fasilitas perlengkapan jalan. |
| | | | | | Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi. |
| | | | | | Pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan |
| | | | | | Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi |
| | | | | | Penyediaan infrastruktur Pengendalian keamanan data dan informasi (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) |
| | | | | | Peningkatan ketersediaan sarana komunikasi dan informasi |
| | | | | | Peningkatan ketersediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni. |
| | | | | | Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan |
| | | | | | Peningkatan kinerja perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. |
| | | | | | Peningkatan ketersediaan sarana prasarana transportasi angkutan barang dan jasa |
| Peningkatan kapasitas dan kualitas pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata. | | | | | |
| Peningkatan peran masyarakat dan kerjasama antar kawasan perkotaan dalam kerangka pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata. | | | | | |
| Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan | | | | | |
| MISI 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana | | | | | |
| 6 | | | Peningkatan integrasi antara pencegahan, | | |
| | | | | Penyediaan status mutu udara Daerah | |
| | | | | Penyediaan data kualitas udara ambien Daerah | |
| | | | | Peningkatan proporsi jumlah industry yang memenuhi baku mutu emisi. | |
| | | | | Pengendalian kualitas emisi dari berbagai macam sumber | |
| | | | | Pengembangan ruang terbuka hijau, termasuk pelestarian dan rehabilitasi hutan mangrove pada wilayah pesisir. | |
| Penerapan Car Free Day | | | | | |



| VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING | | | |
|--|---------|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| | | | TAHUN 2024 |
| | | penanggulangan, dan pemulihan | Peningkatan peran sertamasyarakat secara aktif |
| Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 13 | Menurunnya Tingkat Pencemaran lingkungan | Pengenalan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan |
| | | | Pengendalian pencemaran air secara administrasi, yang meliputi: Penerapan Standard Kualitas Air Sungai, penerapan Baku mutu kualitas air limbah industri, dan Pelaporan hasil pemantauan kualitas air. |
| | | | Penerapan Produksi Bersih, yaitu pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, proaktif, terpadu dan diterapkan secara kontinyu pada setiap kegiatan mulai dari hulu sampai ke hilir yang terkait dengan proses produksi terhadap suatu produk barang atau jasa. |
| | | | Penyediaan dan Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) |
| | | | Penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya sumber daya air dan bahaya pencemaran airutamanya yang berdomisili di sekitar sungai |
| | | | Penyuluhan melalui jalur pendidikan-pendidikan formal atau sekolah |
| | | | Sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran air |
| | | | Pemantauan kualitas tanah |
| | | | pengendalian dan pengawasan pemanfaatanair limbah untuk aplikasi pada tanah |
| | | | Publikasi informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat |
| | | | Pemulihan kualitas tanah yang mengalami pecemaran atau kerusakan |
| | | | Penetapan kriteria kerusakan lahan pada aktifitas pertanian, perkebunan, dan hutantanaman. |
| | | | Penetapan izin lingkungan |
| | | | Pengarusutamaan resiko bencana kedalam perencanaan pembangunan daerah |
| | | | Pengenalan, pengkajian, dan pemantauan resiko bencana melalui penyusunan peta resiko bencana yang di fokuskan pada wilayah rawan bencana. |
| | | Peningkatan sistem ketahanan bencana | Pemanfaatan kajian dan peta resiko bencana pada penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana. |
| | | | Integrasi kajian resiko bencana |



| VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING | | | | | |
|--|---------------------------|----------|----------------------------------|---|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | |
| | | | TAHUN 2024 | | |
| 7 | Menurunkan resiko bencana | 14 | Menurunnya resiko akibat bencana | yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten.berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana. | kedalam RTRW |
| | | | | | Penyusunan Rencana Kontijensi bencana yang mungkin akan terjadi sebagai pedoman kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana. |
| | | | | | Peningkatan mitigasi bencana dan pelayanan tanggap darurat bencana. |
| | | | | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana dan mitigasi bencana |
| | | | | | Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana kebakaran melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan, kawasan permukiman, lahan, dan hutan |
| | | | | | Peningkatan sosialisasi dan desiminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat. |
| | | | | | Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana |
| | | | | | Pemanfaatan kearifan lokal dalam membangun mitigasi bencana. |
| | | | | | Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparaturn penanggulangan bencana |
| | | | | | Penyediaan sistem dini bencana pada kawasan resiko bencana dan memastikan berfungsinya dengan baik sistem tersebut. |
| | | | | | Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana |
| | | | | | Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana |
| Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang | | | | | |



| VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING | | | | |
|--|---------|----------|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | |
| | | | TAHUN 2024 | |
| | | | diperlukan untuk memastikan terlaksananya aktifitas pelayanan publik, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana | |
| | | | Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan | |
| | | | Pengembangan Desa tangguh bencana dan gerakan Desa hebat. | |

d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2024

Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Maros pada tahun 2024, secara umum dapat dikatakan sangat tinggi, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 100,15 persen. Dari keseluruhan indikator kinerja utama Kabupaten Maros, hanya ada dua indikator yang tidak masuk kategori sangat tinggi, yakni persentase pertumbuhan sektor unggulan daerah dengan capaian 36,54 persen (Sangat Rendah), dan indikator Indeks kapasitas dengan capaian 40,00 (Sangat Rendah). Gambaran capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Kabupaten Maros pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

| No | Indikator | 2024 | | CAPAIAN |
|----|---|--------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | |
| 1 | Nilai SAKIP | 73,00 | 64,83 | 88,81 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,26 | 3,15 | 96,63 |
| 3 | Indeks Pendidikan | 64,24 | 64,36 | 100,19 |
| 4 | Indeks Kesehatan | 76,1 | 82,72 | 108,7 |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keagamaan | 3,26 | 3,77 | 115,64 |



| | | | | |
|----------------------------------|--|--------|--------|---------------|
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,05 | 4,34 | 93,32 |
| 7 | Indeks Pembangunan Gender | 90,31 | 89,5 | 99,1 |
| 8 | Inflasi | 3,47 | 1,74 | 199,43 |
| 9 | Indeks Harga Konsumen | 102,99 | 106,13 | 97,04 |
| 10 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Minimum Masyarakat | 3,26 | 3,07 | 94,17 |
| 11 | Persentase Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah | 6,24 | 2,28 | 36,54 |
| 12 | PDRB Per Kapita | 53,08 | 64,69 | 121,87 |
| 13 | Angka kemiskinan | 7,99 | 9,32 | 85,73 |
| 14 | Indeks Kepuasan Masyarakat Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) | 3,26 | 3,14 | 96,32 |
| 15 | Indeks Kualitas Udara | 87,8 | 93,04 | 105,97 |
| 16 | Indeks Kualitas Air | 50,4 | 60 | 119,05 |
| 17 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 53,5 | 53,25 | 99,53 |
| 18 | Indeks Ancaman Bencana | 15,19 | 16,3 | 107,31 |
| 19 | Indeks Kerugian | 6,3 | 6,45 | 97,67 |
| 20 | Indeks Kapasitas | 0,7 | 0,28 | 40 |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | | | | 100,15 |



Pada tahun 2024 Kabupaten Maros telah melaksanakan 127 program dengan total anggaran sebesar Rp 1.027.674.855.401 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Maros Tahun 2021-2026. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 103,13 persen, dengan kategori capaian kinerja SANGAT BAIK. Secara Umum, besaran anggaran pada tahun 2024 berdasarkan sasaran tiap-tiap misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.24
Jumlah Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Sasaran Setiap Misi RPJMD

| No | Misi RPJMD | Sasaran RPJMD | | Anggaran (Rp) |
|----|--|---------------|--|--------------------|
| 1 | Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik | 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 1.250.580.405.389. |
| | | 2 | Terciptanya Pelayanan Publik Yang Berkualitas | 4.229.882.231 |
| 2 | Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia | 1 | Meningkatnya Kualitas Hidup masyarakat | 250.009.261.561 |
| | | 2 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Keagamaan | 4.346.505.183 |
| | | 3 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan Gender | 821.464.500 |
| 3 | Meningkatkan Keterjangkauan Kebutuhan Dasar dan Pelayana Dasar Secara Inklusif | 1 | Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Konsumsi Masyarakat | 288.620.323 |
| | | 2 | Terpenihinya Standar Pelayanan Minimum Masyarakat | 241.961.068.311 |
| 4 | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal | 1 | Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Daerah Terhadap PDRB | 27.705.596.137 |
| | | 2 | Menurunnya Jumlah pengangguran | 82.110.000 |
| | | 3 | Terkendalnya Laju Inflasi | 2.832.705.000 |
| | | 4 | Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin | 254.298.281.149 |
| 5 | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Pemerataan | 1 | Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat | 131.409.237.638 |



| No | Misi RPJMD | Sasaran RPJMD | | Anggaran (Rp) |
|------------------------|---|---------------|--|--------------------------|
| | Wilayah | | | |
| 6 | Meningkatkan Kualitas Hidup dan Ketahanan Bencana | 1 | Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan | 8.657.809.602 |
| | | 1 | Menurunnya Resiko Akibat Bencana | 2.512.202.900 |
| JUMLAH ANGGARAN | | | | 1.027.674.855.401 |

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2025



1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Konsep Otonomi Daerah memberikan perwujudan kepada Pemerintah Daerah untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti Negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Hubungan antara warga selaku konstituen dengan Kepala Daerah yang telah dipilih oleh warganya dalam era demokrasi otonomi dan desentralisasi ini menjadi hubungan yang lebih baik dalam pelayanan maupun kebijakan lainnya. Terkait dengan pelayanan, pada hakekatnya ada pelayanan kepada masyarakat yang tidak boleh di beda-bedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi, dilain sisi fungsi pelayanan pemerintah pusat hanya dapat diselenggarakan di daerah.

Dari dua pertimbangan di atas, selanjutnya diperintahkan kepada seluruh daerah untuk mewujudkan fungsi pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik Pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan kapasitas keuangan negara dan prioritas pembangunan yang ada, maka wujud pelayanan yang diwajibkan di atas merupakan pelayanan yang minimal yang dapat diberikan oleh Pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga pelayanan yang diberikan bukanlah pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar. Sementara bila ada daerah yang lebih mampu memberikan pelayanan yang dapat lebih memuaskan masyarakat, berdasarkan pada kreatifitas dan inovasi dari pemerintah daerah tersebut sehingga dikatakan sebagai pelayanan minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai



jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan Pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar indikator kinerja. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan excellent, maka Pemerintah Kabupaten Maros menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.



b. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang SPM bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPMPendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyusunannya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu SPM merupakan bagian integral dari Pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
2. Diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. SPM harus mampu memberikan pelayanan kepada publik tanpa kecuali (tidak hanya masyarakat miskin), dalam bentuk, jenis, tingkat dan mutu pelayanan yang esensial dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu dan mempunyai dampak luas pada



masyarakat.

4. Merupakan indikator kinerja bukan standar teknis, dikelola dengan manajerial profesional sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
5. Bersifat dinamis.

c. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros untuk mencapai sasaran adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Maros untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Maros menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-



SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

d. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun salah satu kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Maros untuk mendukung pencapaian SPM dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pemerintah daerah yaitu, Program Penyempurnaan Sistem Manajemen Pelayanan Publik dan Program Peningkatan Kapasitas Administrasi Pelayanan Publik.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2024, telah menyusun program dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi. Keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dari masing-masing urusan.

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari : Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).



a. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tersusun dari tiga indikator tunggal. Indikator tersebut adalah indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup), indeks pendidikan (Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (Daya beli).

Berdasarkan tiga komponen tersebut, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros pada tahun 2023 sebesar 73,56% dan tahun 2024 sebesar 74,04 dengan perubahan sebesar 0,48%. Peningkatan IPM menunjukkan efektivitas program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Maros, yang diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros
Tahun 2023 – 2024**

| KOMPONEN IPM | TAHUN | | Perubahan % |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2023 | 2024 | |
| Angka Harapan Hidup | 73,55 | 73,77 | 0,22% |
| Rata-rata Lama Sekolah | 8,03 | 8,05 | 0,02% |
| Harapan Lama Sekolah | 13,50 | 13,51 | 0,01% |
| IPM | 73,56 | 74,04 | 0,48% |

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2025

b. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dan harus segera dilakukan penanggulangan. Dengan berbagai program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Maros pada tahun 2023 sebesar 9,43 persen dan tahun 2024 sebesar 9,65 persen dengan perubahan sebesar 0,22%.

Pencapaian Angka Kemiskinan Kabupaten Maros dapat dilihat pada



Tabel di bawah.

**Angka Kemiskinan Kabupaten Maros
Tahun 2023 – 2024**

| URAIAN | TAHUN | | Perubahan % |
|--------------------|-------|------|-------------|
| | 2023 | 2024 | |
| Angka Kemiskinan % | 9,43 | 9,65 | 0,22% |

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2025

Kinerja penanggulangan kemiskinan ini masih menjadi target dan upaya Pemerintah Kabupaten Maros dalam mendorong perekonomian daerah sehingga dapat menekan angka kemiskinan kedepannya. Program yang digalakkan di Kabupaten Maros untuk mengatasi kemiskinan diantaranya bedah rumah, pengembangan ekonomi produktif, dan penyediaan sarana air bersih.

c. Angka Pengangguran

Masalah pokok ketenagakerjaan yang terjadi adalah produktifitas tenaga kerja yang masih rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga berdampak terjadinya pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja.

Angka Pengangguran di Kabupaten Maros pada tahun 2023 sebesar 3,64% dan pada tahun 2024 sebesar 4,34% dengan perubahan sebesar 0,7%.

Pencapaian Pengangguran di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Angka Pengangguran Kabupaten Maros
Tahun 2023 – 2024**

| URAIAN | TAHUN | | Perubahan % |
|----------------------|-------|------|-------------|
| | 2023 | 2024 | |
| Angka Pengangguran % | 3,64 | 4,34 | 0,7%. |

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2025

d. Pertumbuhan Ekonomi



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu daerah. Produk domestik regional bruto menyajikan data series PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang disajikan dalam nilai rupiah maupun persentase, berdasarkan data beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari administrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder). Struktur perekonomian di suatu daerah dicerminkan oleh kontribusi/peranan nilai tambah masing-masing sektor terhadap total PDRB, pergerakan sektor-sektor yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB akan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan yakni 5,00% namun pada tahun 2024 menurun dengan capaian 3,79% atau dengan perubahan sebesar 1,21%.

Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros
Tahun 2023 – 2024**

| URAIAN | TAHUN | | Perubahan % |
|-----------------------|-------|-------|-------------|
| | 2023 | 2024 | |
| Pertumbuhan Ekonomi % | 5,00 | 3,79. | 1,21% |

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2025

e. Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita adalah untuk mengetahui peningkatan kemakmuran/kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang ada terkait dengan PDRB perkapita Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2023 PDRB perkapita sebesar 64,69% dan terakhir pada tahun 2024 sebesar 69,21% yang artinya bahwa kondisi kemakmuran Masyarakat mengalami tren penurunan namun masih dalam kondisi yang terkendali.

Pencapaian PDRB Per Kapita di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**PDRB Perkapita Tahun 2023-2024
Kabupaten Maros**

| Uraian | 2023 | 2024 | Perubahan % |
|-----------------------------------|------------|---------|-------------|
| Nilai PDRB (Juta Rp.) | 26.389.000 | . | |
| Jumlah Penduduk (jiwa) | 410.699 | 423.989 | |
| PDRB perkapita (Juta Rp/ Jiwa) | 64,69 | 69,21 | 1,10% |

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2025

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks Gini/koefisien Gini adalah untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Berdasarkan data bahwa tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Maros berada pada ketimpangan rendah berdasarkan koefisien Gini pada 2023 sebesar 0,372% dan tahun 2024 sebesar 0,363% dengan perubahan sebesar 0,009%.

Pencapaian Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Maros
Tahun 2023 – 2024**

| URAIAN | TAHUN | | Perubahan % |
|---------------------------------------|-------|-------|-------------|
| | 2023 | 2024 | |
| Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) % | 0,372 | 0,363 | 0,009% |

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2025

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.



Urusan wajib dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2024, telah menyusun program dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi. Keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dari masing-masing urusan.



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBERDATA | KETERANGAN |
|----|---|--|--|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | PENDIDIKAN | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD | X100% | 96,71 % | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan | X100% | | |
| | | | <u>15.346</u> | | | |
| | | | 15.868 | | | |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar | X100% | 102,91 % | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan | X100% | | | | |
| | <u>48.319</u> | | | | | |
| | 46.950 | | | | | |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama | X100% | 102,34 % | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan | X100% | | | | |
| | <u>22.784</u> | | | | | |
| | 22.263 | | | | | |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan | X100% | 100% | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan | X100% | | | | |
| | <u>369</u> | | | | | |
| | 369 | | | | | |



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|-------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | KESEHATAN | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan | Jumlah Daya tampung Rumah Sakit Rujukan X100% | 1,254 % | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Jumlah Penduduk di Kabupaten / Kota | | | |
| | | | 520 X100% | | | |
| | | | | 414.406 | | |
| | | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi X100% | 100% | DINAS KESEHATAN | |
| | | | Jumlah anak usia 7-12 Jumlah RS di Kabupaten / Kota | | | |
| | | | 17 X100% | | | |
| | | | | 17 | | |
| Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan X100% | 100% | DINAS KESEHATAN | | | |
| | Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten / Kota | | | | | |
| | 5.168 X100% | | | | | |
| | | 5.168 | | | | |
| Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan X100% | 100% | DINAS KESEHATAN | | | |
| | Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten / Kota | | | | | |
| | 5.158 X100% | | | | | |
| | | 5.158 | | | | |
| Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar X100% | 100% | DINAS KESEHATAN | | | |
| | Jumlah Bayi Baru Lahir di Kabupaten / Kota | | | | | |
| | 5.133 X100% | | | | | |
| | | 5.133 | | | | |
| Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar X100% | 100% | DINAS KESEHATAN | | | |
| | Jumlah Balita di Kabupaten / Kota | | | | | |
| | 27.028 X100% | | | | | |
| | | 27.028 | | | | |
| Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar X100% | 79,99 % | DINAS KESEHATAN | | | |



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|---------------------|---|---|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <p>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota</p> <p style="text-align: right;"><u>56.044</u> X100% 70.58</p> | | |
| | | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | <p>Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar X100%</p> <p>Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten / Kota X100%</p> <p style="text-align: right;"><u>166.441</u> X100% 260.564</p> | 63,87 % | DINAS KESEHATAN |
| | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | <p>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar X100%</p> <p>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten / Kota X100%</p> <p style="text-align: right;"><u>28.359</u> X100% 40.583</p> | 69,87 % | DINAS KESEHATAN |
| | | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | <p>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar X100%</p> <p>Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten / Kota X100%</p> <p style="text-align: right;"><u>10.899</u> X100% 10.899</p> | 100% | DINAS KESEHATAN |
| | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | <p>Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar X100%</p> <p>Jumlah penderita DM di Kabupaten / Kota X100%</p> <p style="text-align: right;"><u>2.719</u> X100% 2.719</p> | 100% | DINAS KESEHATAN |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | <p>Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar X100%</p> <p>Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten / Kota X100%</p> <p style="text-align: right;"><u>903</u> X100% 903</p> | 100 % | DINAS KESEHATAN |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|---------------------|---|--|-------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| | | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | $\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ 3.863 / 3.863 X100% | 100 % | DINAS KESEHATAN | |
| | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | $\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah Balita di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ 6.217 / 6.217 X100% | 100 % | DINAS KESEHATAN | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| 3 | PEKERJAAN UMUM | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) | X100% | 0% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | Tidak Terdapat Wilayah Kewenangan Kabupaten |
| | | | Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) | X100% | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 1 | | | | |
| Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) | X100% | 0% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | Tidak Terdapat Wilayah Kewenangan Kabupaten | | |
| | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) | X100% | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| | 1 | | | | | | |
| Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) | X100% | 100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | | | |
| | Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kotaluas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota | X100% | | | | | |
| | 6.459 | | | | | | |
| | 6.459 | | | | | | |
| Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota | X100% | 88,65% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | | | |
| | Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut | X100% | | | | | |
| | 81.277 | | | | | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|---------------------|---|---|---------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| | | | 91.673 | | | |
| | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | $\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Kota}} \times 100\%$ | 97,51 % | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | | $\frac{89.392}{91.673} \times 100\%$ | | | |
| | | | | | | |
| | | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | $\frac{\text{Jumlah pemanfaatan Persetujuan bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah Persetujuan bangunan Gedung yang berlaku}} \times 100\%$ | 100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | | $\frac{768}{768} \times 100\%$ | | | |
| | | | | | | |
| | | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | $\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$ | 67,96 % | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | | $\frac{841.81}{1.238.567} \times 100\%$ | | | |
| | | | | | | |
| | | Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ | 34,00 % | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | | $\frac{556}{1.635} \times 100\%$ | | | |
| | | | | | | |
| | | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | $\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$ | 99,49% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | | $\frac{196}{197} \times 100\%$ | | | |
| | | | | | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN | |
|--|--|---|---|--|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| 4 | PERUMAHAN RAKYAT | Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota | $\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$ | X100% | 100% | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | $\frac{69}{69} \times 100\%$ | X100% | | | |
| | | | 69 | | | | |
| | | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | $\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$ | X100% | 0% | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | Tidak ada program kegiatan terkait pada Tahun 2023 |
| | | | $\frac{0}{1} \times 100\%$ | X100% | | | |
| | | | 0 | 1 | | | |
| | | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani | $\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$ | X100% | 60,74% | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | $\frac{10,37}{17,07} \times 100\%$ | X100% | | | |
| | | | 10,37 | 17,07 | | | |
| | | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | $\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100\%$ | X100% | 21,75% | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | $\frac{19.923}{91.580} \times 100\%$ | X100% | | | |
| | | | 19.923 | 91.580 | | | |
| Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | $\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100\%$ | X100% | 23,12 % | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | $\frac{3.915}{16.933} \times 100\%$ | X100% | | | | | |
| | 3.915 | 16.933 | | | | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 5 | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Jumlah pengaduan yang ditangani | X100% | 100% | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | | | Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk | X100% | | |
| | | | 19 | 19 | | |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan | X100% | 100% | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | | | Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi | X100% | | |
| 45 | 45 | | | | | |
| Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | X100% | 100% | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | |
| | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan | X100% | | | | |
| | 45.620 | 45.620 | | | | |
| Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 225.985 404.979 | 55,80% | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | |
| Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 286 286 | 100% | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | |



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

| | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|--|--|
| | | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas X100% | 100% | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |
| | | | Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah | | | |
| | | | Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota 179 179 X100% | | | |
| | | Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran | Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran 1.410 179 | 7,88 Menit | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA | KETERANGAN | |
|----|---------------------|---|---|-------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | SOSIAL | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) | <p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</p> $\frac{\text{Jumlah}}{\text{Populasi}} \times 100\%$ | 100% | DINAS SOSIAL | |
| | | | <p>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis</p> $\frac{245}{245} \times 100\%$ | | | |
| | | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | <p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</p> $\frac{\text{Jumlah}}{\text{Populasi}} \times 100\%$ | 100% | | DINAS SOSIAL |
| | | | <p>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota</p> $\frac{619}{619} \times 100\%$ | | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|--|--|--|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 7 | TENAGA KERJA | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD | X100% | 100 % | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | | Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten | | | |
| | | | $\frac{3}{3}$ | X100% | | |
| | | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi | X100% | 58,74% | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | | Jumlah tenaga kerja keseluruhan | | | |
| | | | $\frac{9.393}{15.990}$ | X100% | | |
| | | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) | X100% | 92.237.398.373,984 % | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | | Jumlah tenaga kerja | | | |
| | | | $\frac{14.748.760.000.000}{15.990}$ | X100% | | |
| | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak | X100% | 89,32% | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | | Jumlah Perusahaan | | | |
| | | | $\frac{460}{515}$ | X100% | | |
| Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan | X100% | 34,49% | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | |
| | Jumlah pencaker yang terdaftar | | | | | |
| | $\frac{514}{1.490}$ | X100% | | | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|------------------------------|--|--|--|---------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 8 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | $\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di APBD}} \times 100\%$ | 37,132% | DP3ADALDUK | |
| | | | $\frac{543.276.408.888}{1.463.086.734.362,2} \times 100\%$ | | | |
| | | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota | $\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$ | 100% | DP3ADALDUK | |
| $\frac{56}{56} \times 100\%$ | | | | | | |
| | | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | $\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$ | 8,65 % | DP3ADALDUK | |
| | | $\frac{18}{207.858} \times 100\%$ | | | | |

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|---------------------|---|--|---------|--------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 9 | PANGAN | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) | Jumlah cadangan pangan X100% | | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | |
| | | | Jumlah kebutuhan pangan 62,76 X100% | 313,8 % | | |
| | | | 20 | | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN | |
|--|---|---|--|---|-------------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| 10 | PERTANAHAN | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi | X100% | 100% | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | | Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi | | | | |
| | | | 802.414 | X100% | | | 802.414 |
| | | Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum | Luas penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | X100% | 91,46% | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | | Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | | | | |
| | | | 21.199 | X100% | | | 23.176 |
| | | Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal | Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi | X100% | 100% | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | | Luas izin lokasi yang diterbitkan | | | | |
| | | | 557.846 | X100% | | | 557.846 |
| | | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Jumlah penerima tanah obyek land reform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha | X100% | 100% | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | | Jumlah penerima tanah obyek landreform | | | | |
| | | | 665.77 | X100% | | | 665.77 |
| Tersedianya tanah untuk masyarakat | Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah | X100% | 100% | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | | | |
| | Luas izin membuka tanah yang diterbitkan | | | | | | |
| | 665.77 | X100% | | | 665.77 | | |
| Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani | X100% | 100% | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | | | |
| | Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan | | | | | | |
| | 1 | X100% | | | 1 | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|---------------------|--|---|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota | $IKLH \text{ Kab/Kota} = (IKA \ 30\%) + (IKD \ 30\%) + (ITH \ 40\%)$ IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Lahan IKA = 60,00 IKU = 93,04 IKL = 53,25 | 71,9% | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota | $\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{43.172,18}{60.385,6} \times 100\%$ | 71,49% | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | $\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}}$ $\frac{0}{9} \times 100\%$ | 0% | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN | | |
|---|---|--|--|---|-------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | |
| 12 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Perekaman KTP Elektronik | Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP | X100% | 99,99 % | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | |
| | | | Jumlah penduduk 17 tahun ke atas | | | | | |
| | | | 286.260 | X100% | | | | |
| | | | | | 286.278 | | | |
| | | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA | X100% | 35,12 % | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | |
| | | | Jumlah anak usia 0-17 tahun | X100% | | | | |
| | | | 45.003 | X100% | | | | |
| | | | | | 128.128 | | | |
| | | Kepemilikan akta kelahiran | Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir | X100% | 90,19 % | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | |
| | | | Jumlah anak usia 0-18 tahun | X100% | | | | |
| | | | 123.898 | X100% | | | | |
| | | | | | 137.366 | | | |
| Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | X100% | 44,44% | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | |
| | Jumlah OPD | X100% | | | | | | |
| | 4 | X100% | | | | | | |
| | | | 9 | | | | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|--|--|---|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 13 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal | Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun | X100% | 0% | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | | Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) | | | |
| | | 0 | X100% | | | |
| | | 1 | | | | |
| | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun | X100% | 46,15% | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | | | Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) | | | |
| | | 6 | X100% | | | |
| | | 13 | | | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN | |
|----------------------------|--|---|--|-------|-------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| 14 | PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA | TFR (Angka Kelahiran Total) | 2,3 Per Perempuan Usia 15 -49 tahun | | DP3ADALDUK | | |
| | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah peserta KB aktif modern | X100% | 63,20 % | DP3ADALDUK | |
| | | | Jumlah Pasangan Usia Subur | X100% | | | |
| | | Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)) | Jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani | X100% | 9,90 % | DP3ADALDUK | |
| Jumlah Pasangan Usia Subur | X100% | | | | | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA | KETERANGAN | |
|----|---------------------|---|--|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | PERHUBUNGAN | Rasio konektivitas Kabupaten/Kota | Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 = 0,8 Bobot angkutan jalan = IK2 = 0 Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan = 0 | 0,8 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |
| | | V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota | | 0,42 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|--|---|--|--|---|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 16 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | X100% | 100% | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | | | Jumlah OPD | | | |
| | | | 39 | X100% | | |
| | | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi | X100% | 100% | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | | | Jumlah layanan publik | | | |
| | | | 12 | X100% | | |
| Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota | X100% | 84,88 % | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | | |
| | Jumlah penduduk | | | | | |
| | 224.843 | X100% | | | | |
| | | 264.867 | | | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|------------------------------------|---|--|--------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 17 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | $\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$ 68 / 117 | 58,11% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | $\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$ 6.093 / 11.126 | 54,76% | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|---------------------|---|---|--|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 18 | PENANAMAN MODAL | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota | Jumlah investasi tahun n - Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota | $\frac{\text{Jumlah investasi tahun n}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota}} \times 100\%$ | 24,47% | DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN |
| | | | $\frac{22.026.144.317.425}{90.007.313.942.270}$ | $\times 100\%$ | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 19 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota | X100% | 8,67 % | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | | Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota | X100% | | |
| | | | 8.323 | 95.970 | | |
| | | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota | X100% | 7,78% | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | | Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota | X100% | | |
| | | | 7.472 | 95.970 | | |
| Peningkatan Prestasi Olahraga | Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional | | 5 Medali | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|---------------------|--|---|-------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 20 | STATISTIK | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan | X100% | 100 % | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | | | Jumlah OPD | X100% | | |
| | | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan pembangunan daerah | X100% | 100 % | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | | | Jumlah OPD | X100% | | |



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|---------------------|---|--|--------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 21 | PERSANDIAN | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Jumlah nilai per area keamanan informasi X100% | | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN | |
| | | | Jumlah area penilaian | 53,79% | | |
| | | | $\frac{347}{645} \times 100\%$ | | | |



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|---------------------|---|---|-------|---------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 22 | KEBUDAYAAN | Terlestarikannya Cagar Budaya | $\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$ | 100 % | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | $\frac{252}{252} \times 100\%$ | | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|---------------------|--|---|---------|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 23 | PERPUSTAKAAN | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat | 90,94 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) . UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan . UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat $\text{Masyarakat} = \frac{\sum \text{UPLM}}{\text{AM}} \times 100$ UPLM 1= 0,6260 UPLM 2= 0,4436 UPLM 3= 0,7801 UPLM 4= 1,0000 UPLM 5= 1,0000 UPLM 6= 1,0000 UPLM 7= 1,0000 | 91,04 % | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|---------------------|--|--|-------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | KEARSIPAN | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | $T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN a = 1.107 i = 2.545 s = 98 j = 0 | 100% | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepingin negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | $T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab.yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK m = 100 b = 100 g = 100 a = 100 c = 100 i = 0 | 83,33 % | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|---------------------|--|----------------------------|------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 25 | PERIKANAN | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dariseluruh kabupaten/kota di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP) | 64.260,5 Ton 35.614 Ton | 180,43 Ton | DINAS PERIKANAN | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|--|---|---|--|---------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 26 | PARIWISATA | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | $\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$ | 39,02 % | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | |
| | | | $\frac{2.487}{6.373} \times 100\%$ | | | |
| | | | | | | |
| | | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota | $\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$ | 41,76 % | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | |
| | | | $\frac{245.439}{587.653} \times 100\%$ | | | |
| | | | | | | |
| Tingkat Hunian Akomodasi | $\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$ | 84,05 % | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | |
| | $\frac{189.902}{225.935} \times 100\%$ | | | | | |
| | | | | | | |
| Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | 0,34% | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | |
| Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | 10,58 % | | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | |

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|--|---------------------|---|---|-------|-------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 27 | PERTANIAN | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun | X100% | 658,09 % | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | Luas panen | | | |
| | | | $\frac{423.321}{64.325}$ | X100% | | |
| | | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular | Jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun berjalan - jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun sebelumnya | X100% | -48% | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun sebelumnya | | | | | | |
| $\frac{-12}{25}$ | X100% | | | | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|--|--|---|---|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 28 | PERDAGANGAN | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan | X100% | 100% | DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota | | | |
| | | | 75 | X100% | | |
| | | Persentase kinerja realisasi pupuk | Realisasi | X100% | 60,85% | DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | RDKK | X100% | | |
| | | | 20.917 | 34.373 | | |
| Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan | X100% | 100% | DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota | | | | | |
| | 1.549 | X100% | | | | |
| | | 1.549 | | | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA | KETERANGAN | |
|---|---|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 29 | PERINDUSTRIAN | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota | $\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2024} - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023}}{\text{Jumlah IKM 2023}} \times 100\%$ | 80,95 % | DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | $\frac{731}{903} \times 100\%$ | | | |
| | | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | <p>Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut</p> | 144,7 % | DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ | 0 % | DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | $\frac{0}{14} \times 100\%$ | | | |
| | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ | 0 % | DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Tidak Terdapat Permohonan Izin Perluasan Industri |
| | | | $\frac{0}{1} \times 100\%$ | | | |
| Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota | $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ | 0 % | DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Tidak Terdapat Kawasan Industri Di Kabupaten Maros | | |
| | $\frac{0}{1} \times 100\%$ | | | | | |
| Tersedianya informasi industri secara lengkap dan | 1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) | | DINAS KOPERASI, UKM | | | |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|---------------------|---|---|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | terkini | <ul style="list-style-type: none">- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)- Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : <ul style="list-style-type: none">- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2) 1) Keterkinian informasi industri = 5% 2) Kelengkapan informasi industri = 5% | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | 100% |



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

| NO | FUNGSI PENUNJANG | INDIKATOR KINERJA KUNCI | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|--|--|--|--|--|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | PERENCANAAN DAN KEUANGAN | Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | $\frac{\text{Jumlah Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$ | | 25,85% | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | | $\frac{418.964.624.769}{1.620.528.897.185} \times 100\%$ | | | |
| | | Rasio PAD | $\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100\%$ | | 19,83% | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | | $\frac{302.040.074.230}{1.522.615.869.042,1} \times 100\%$ | | | |
| | | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP | | Level 3 | INSPEKTORAT |
| | | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP | | Level 3 | INSPEKTORAT |
| | | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | $\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$ | | 13,32% | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| $\frac{215.884.935.266}{1.620.528.897.185} \times 100\%$ | | | | | | |
| Opini Laporan Keuangan | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | | | |



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

| NO | FUNGSI PENUNJANG | INDIKATOR KINERJA KUNCI | CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|------------------|---|---|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | PENGADAAN | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama | Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2023 $\frac{0}{4.581} \times 100\%$ | 0% | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | | Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2024 $\frac{0}{4.581} \times 100\%$ | | |
| | | Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif | Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif $\frac{183}{4.581} \times 100\%$ Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan tanpa kompetitif $\frac{183}{4.581} \times 100\%$ | 3,99% | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA |
| | | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan $\frac{497.723.388.847}{1.463.086.734.362,6} \times 100\%$ Total belanja langsung $\frac{497.723.388.847}{1.463.086.734.362,6} \times 100\%$ | 34,01% | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA |
| | | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produl Dalam Negeri, Produk Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n)- Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) $\frac{29.696.646.138}{426.919.732.876} \times 100\%$ | 6,95% | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA |



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

| NO | FUNGSI PENUNJANG | INDIKATOR KINERJA KUNCI | CAPAIAN KINERJA | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|------------------|---|---|---------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 3 | KEPEGAWAIAN | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | $\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA/ke bawah}} \times 100\%$ | 68,48% | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | | $\frac{1.891}{2.761}$ | | | |
| | | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | $\frac{\text{Jumlah pegawai PNS/Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$ | 20,68 % | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | kesehatan) | $\frac{571}{2.761} \times 100\%$ | | | |
| | | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | $\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$ | 41,33% | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | | $\frac{236}{571} \times 100\%$ | | | |



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

| NO | FUNGSI PENUNJANG | INDIKATOR KINERJA KUNCI | CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|--------------------|--|--|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | MANAJEMEN KEUANGAN | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | $\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} \times 100\% - 1$ | 3,9413% | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | | Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi = 1.620.528.897.185 | | |
| | | | Total belanja APBD = 1.687.019.643.138 | | |
| | | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | $\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \times 100\% - 1$ | 1,92% | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | | Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi = 302.040.074.230 | | |
| | | | Total PAD dalam APBD = 307.957.767.197 | | |
| | | Asset Management | 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) | Ya | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | | 2. Apakah ada manual untuk menyundaftar asset tetap? (Ya/Tidak) | Ya | |
| | | | 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) | Ya | |
| | | | 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak) | Ya | |
| | | Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya | $\frac{\text{Nilai realisasi SILPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$ | 6,43% | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | | $\frac{97.913.281.142,52}{1.521.013.274.022,1} \times 100\%$ | | |
| | | | | | |



| NO | FUNGSI PENUNJANG | INDIKATOR KINERJA KUNCI | CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|-------------------------------------|--|--|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda X100% | 92,91% | KOMINFO |
| | | | Realisasi belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda | | |
| | | $\frac{1.466.737.580.646,7}{1.578.572.132.709} \times 100\%$ | | | |
| | | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda X100% | 100% | KOMINFO |
| Total jumlah dokumen yang telah dirinci | 12 X100% | 12 | | | |



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan: (1) Arahan Presiden terkait permasalahan efisiensi, (2) Permasalahan dalam manajemen kinerja, (3) Perubahan paradigma manajemen kinerja, (4) Program logik dan cascading kinerja, (5) Arti nilai hasil akuntabilitas kinerja, (6) Capaian efisiensi anggaran, (7) Penerapan manajemen kinerja, dan (8) E-Sakip Reviu.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras. Petunjuk Teknis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menjelaskan secara detail mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| | $\geq 90,1$ | Sangat Tinggi | |
| | $75,1 \leq 90$ | Tinggi | |
| | $65,1 \leq 75$ | Sedang | |
| | $50,1 \leq 65$ | Rendah | |
| | ≤ 50 | Sangat Rendah | |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Kabupaten Maros Tahun 2024 merupakan hasil pelaksanaan pembangunan Tahun ke 3 dalam periode RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021-2026. Kinerja Tahun 2024 Capaian kinerja Kabupaten Maros tahun 2024 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Utama Kabupaten Maros dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2024 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2016 - 2021. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2024 diuraikan berdasarkan sasaran tiap-tiap misi.

MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Maksud dari Misi meningkatkan perekonomian daerah adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi seluruh aspek pemerintahan, yaitu: kelembagaan, perencanaan, keuangan, proses bisnis, SDM aparatur, dan pengendalian yang diselenggarakan melalui mekanisme kerja yang sinergis, inovatif, responsif, dan produktif sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta sekaligus berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*). Tujuan dari Misi 1 adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersinergi dan berkinerja tinggi. Sedangkan sasaran dari Misi 1 adalah; (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan (2) Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Capaian masing-masing tujuan dan sasaran dari Misi 1 seperti pada uraian di bawah ini.



1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Realisasi SAKIP Kabupaten Maros Tahun 2024 sebesar 64,83 dengan predikat “ B “. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “ Baik “, yang berarti implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama. Walaupun nilai SAKIP Kabupaten Maros Tahun 2024 meningkat dibandingkan Tahun 2023, namun realisasi SAKIP tahun 2024 belum mencapai target dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 pelaksanaan tahun 2024 (73,00) serta target dalam RPJMN tahun 2020-2024 (80-90). Berdasarkan capaian tersebut, maka kinerja pada Sasaran 1 Misi 1 sebesar 88,81 persen berpredikat kinerja **TINGGI**.

Tabel 2.2
Target, Realisasi, dan Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Maros Tahun 2024

| NO | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Target Nasional (RPJMN) |
|----|-------------------|--------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Nilai SAKIP | Poin | 64,08 | 73,00 | 64,83 | 88,81 | 68,00 | 80-90 |

Sumber : Kemenpan RB, 2025

Perolehan nilai SAKIP sebesar 64,83 pada Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan RB diperoleh dari hasil evaluasi komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 2.3
Komponen Penilaian SAKIP Kabupaten Maros Tahun 2024

| | Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai |
|--|---|-------|-------|
| | Perencanaan Kinerja | 30 | 23,14 |
| | Pengukuran Kinerja | 30 | 18,43 |
| | Pelaporan Kinerja | 15 | 10,50 |
| | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 12,76 |
| | Naili Hasil Evaluasi | 100 | 64,83 |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | B |

**Sumber : Kemenpan RB, 2025**

Realisasi Nilai SAKIP tahun 2024 sedikit menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan perumusan tujuan dan sasaran strategis pada level pemerintah daerah sudah cukup baik, IKU telah memiliki defenisi operasional pengukuran kinerja, pelaporan kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu, telah dilaksanakan evaluasi internal terhadap implemementasi SAKIP.

Walapun telah menunjukkan peningkatan nilai, namun peningkatan tersebut belum dapat mengubah predikat kinerja Pemerintah Kabupaten Maros dari tahun sebelumnya. Hal tersbut disebabkan faktor, diantaranya :

a. Perencanaan Kinerja

- Masih terdapat rumusan kinerja yang belum berorientasi hasil/outcome pada dokumen perencanaan di level Perangkat Daerah
- Indikator kinerja yang dirumuskan pada tingkat Perangkat Daerah masuh belum sepenuhnya memenuhi kriteris SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-Bound*) serta beberapa belum memenuhi unsur cukup untuk mengukur kinerja yang akan dicapai, sehingga kualitas indikator kinerja belum dapat diyakini dapat menggambarkan tingkat kinerja capaian kinerja.
- Pohon kinerja yang telah disusun belum secara komprehensif mengidentifikasi faktor-faktor kritis atau *Critical Success Factor* (CSF) dari setiap kinerja yang akan dicapai. Selain itu, pohon kinerja belum menggambarkan hubungan logis sebab akibat antara tingkatan kinerja dan masih terbatasnya pada program/kegiatan yang sudah ada, belum sepenuhnya mengeksplorasi solusi pemecahan atas isu/permasalahan yang dihadapi.
- Pada penyusunan pohon kinerja belum dilakukan identifikasi secara mendalam terkait kemungkinan *crosscutting* kinerja dengan unit kerja/Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan kinerja dalam mencapai kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

b. Pengukuran Kinerja

- Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah masih ditemukan defenisi operasional dan/atau formulasi perhitungan yang belum sepenuhnya relevan dan spesifik terhadap indikator kinerja yang ditetapkan sehingga



keandalan data kinerja belum dapat diyakini sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan;

- Mekanisme pengukuran kinerja melalui aplikasi E-SAKIP telah diarahkan untuk pengukuran target sesuai Perjanjian Kinerja (PK) atau IKU, namun belum terlihat komitmen dari seluruh Perangkat daerah untuk memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai media pemantauan dan evaluasi capaian kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

- Pada tingkat Perangkat daerah masih ditemukan pelaporan kinerja yang belum menyajikan analisis capaian secara komprehensif, terutama penyajian analisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja, analisis program/kegiatan yang menunjang/kurang mendukung capaian kinerja, analisis efisiensi sumber daya dan upaya ke depan dalam rangka pencapaian kinerja.
- Laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal sebagai masukan strategis dalam penyusunan perencanaan kinerja berikutnya. Hal tersebut terlihat dari masih adanya target kinerja yang ditetapkan dengan nilai yang lebih rendah daripada capaian tahun sebelumnya.

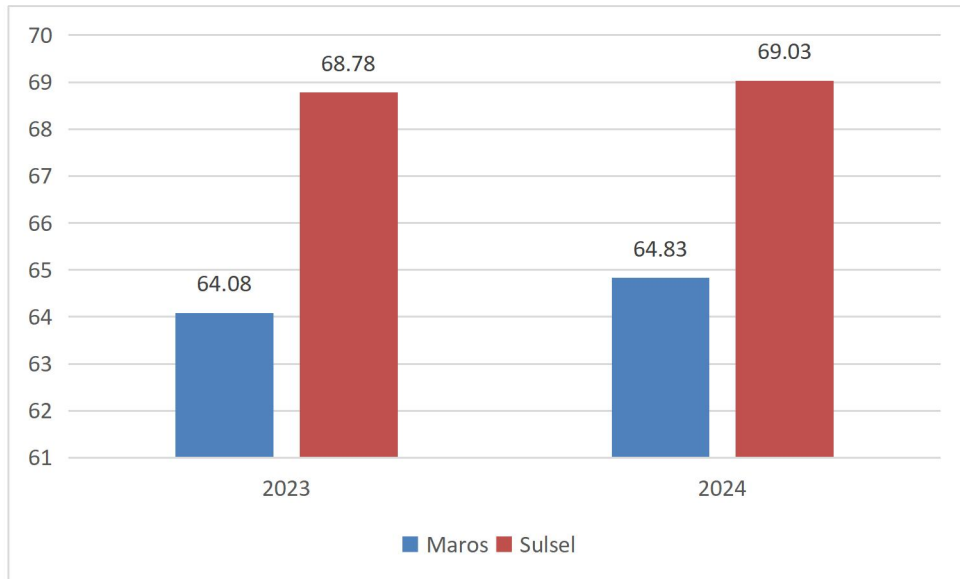
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Hasil evaluasi AKIP internal belum sepenuhnya memberikan catatan dan rekomendasi yang spesifik yang menyoar langsung pada akar permasalahan Perangkat Daerah yang dievaluasi;
- Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi setiap Perangkat Daerah belum berjalan optimal, sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP belum mendorong perbaikan SAKIP secara signifikan dan berkelanjutan pada setiap perangkat Daerah.

Nilai SAKIP Kabupaten Maros Tahun 2023 sebesar 64,08 masih lebih rendah dibandingkan Nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.1
Perbandingan Nilai Sakip Kabupaten Maros dan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2024



Sumber : Kemenpan RB, 2025

2. Terciptanya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Pelayanan berkualitas adalah layanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan lebih dahulu. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah titik terpenting untuk memenuhi harapan masyarakat.

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros maka digunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Tahun 2024 Pencapaian IKM Kabupaten Maros menunjukkan capaian yang cukup baik dengan realisasi IKM sebesar 3,15 namun menurun dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan realisasi 3,26. dengan kategori IKM " **BAIK** ".

Tabel 2.4
Target, Realisasi, dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan
Publik Kabupaten Maros Tahun 2024

| NO | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Target Nasional (RPJMN) |
|----|----------------------------|--------------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai Indeks | 3,5 | 3,26 | 3,15 | 96,63 | 3,26 | - |



| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (IKM) | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Sumber : BPS dan Bapperida Kab. Maros, 2025

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Maros Tahun 2024 menunjukkan capaian yang cukup baik dengan nilai capaian 96,63 persen. Dengan demikian kinerja sasaran terciptanya pelayanan publik yang berkualitas memiliki kategori capaian kinerja “ **BAIK** “. Dikarenakan nilai capaian IKM tidak mencapai 100 persen maka kinerja indikator kinerja sasaran terciptanya pelayanan publik yang berkualitas tidak mencapai target dalam RPJMD yaitu sebesar 3,26.

Penurunan kinerja IKM pada tahun 2024 disebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan pada beberapa sektor, yaitu; (1) sektor infrastruktur yang terdiri dari pelayanan terkait air limbah, perumahan, drainase, transportasi laut dan pelayanan persampahan dan (2) Sektor sosial.

Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap sektor infrastruktur tersebut disebabkan kondisi infrastruktur yang belum memadai sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Sedangkan pada sektor sosial, kepuasan masyarakat masih cukup rendah disebabkan birokrasi yang cukup panjang dan rumit bagi masyarakat untuk mengakses layanan sosial, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, selain itu masih kurangnya koordinasi antar instansi, seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Sosial, Dinas Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil, serta BPJS yang menyebabkan layanan kepada masyarakat seringkali mengalami banyak kendala.

MISI 2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Maksud dari Misi 2 adalah meningkatkan pembangunan sumber daya manusia adalah sumber daya manusia masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, empati, religius, energik, dan memiliki keterampilan serta keahlian sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan yang disertai dengan kemampuan menjunjung nilai – nilai kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari misi 2 adalah Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Yang Berdaya Saing, dengan sasaran (1) meningkatnya kaulitas hidup masyarakat, (2) Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas layanan keagamaan dan (3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender. Capaian dari masing masing tujuan dan



sasaran pada Misi 2 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Peningkatan kualitas hidup yang dimaksud dalam hal ini adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan masyarakat, dengan harapan jika masyarakat telah memiliki pendidikan yang memadai serta derajat kesehatan yang cukup baik, maka masyarakat tersebut dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya masing-masing.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran 1 pada Misi 2 adalah Indeks Pendidikan dan Indeks kesehatan. Indeks Pendidikan merupakan hasil presentasi dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan Indeks kesehatan adalah hasil presentasi dari umur harapan hidup. Indeks Pendidikan memperlihatkan sampai sejauh mana tingkat pendidikan yang dapat ditempuh oleh seseorang, sedangkan Indeks kesehatan memperlihatkan proyeksi umur dari seseorang dihitung sejak orang tersebut lahir.

Tabel 2.5
Target, Realisasi, dan Capaian Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Target Nasional (RPJMN) |
|----|-------------------|--------------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Indeks Pendidikan | Nilai Indeks | 64,26 | 64,24 | 64,36 | 100,19 | 65,97 | 70,05 |
| 2 | Indeks Kesehatan | Nilai Indeks | 82,36 | 76,10 | 82,72 | 108,70 | 76,45 | - |

Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

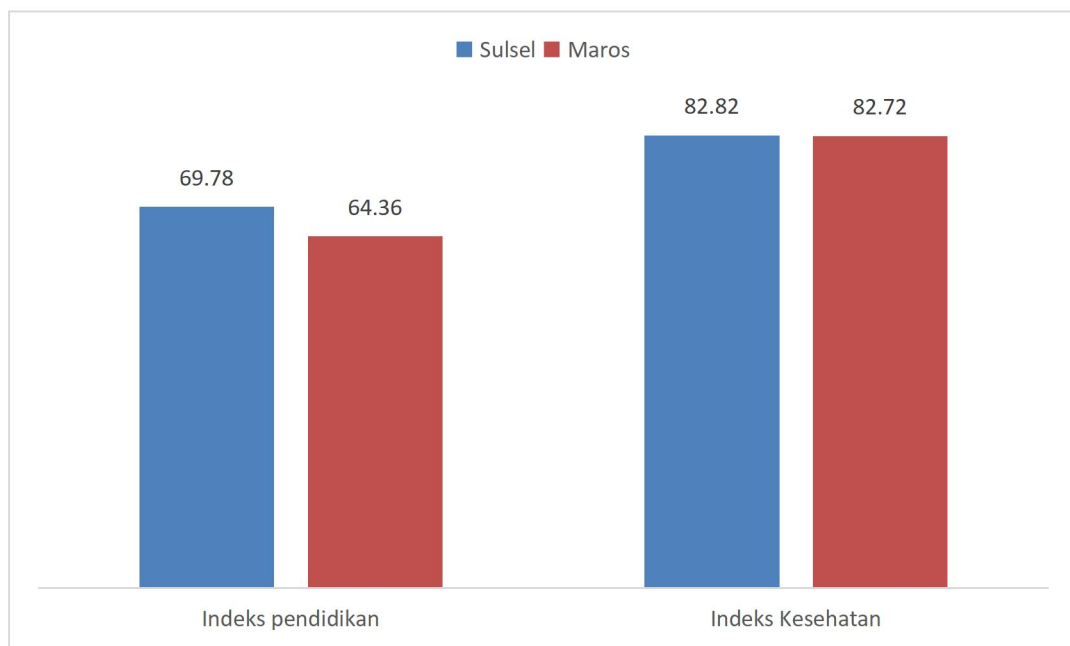
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi Indeks Pendidikan dan Indeks kesehatan Tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi Indeks Pendidikan pada Tahun 2024 sebesar 64,36 persen melewati target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Tahun pelaksanaan 2024 (63,24 persen), dengan demikian capaian kinerja dari Indeks pendidikan adalah 100,19 persen dengan kategori capaian kinerja “ **SANGAT BAIK** ”. Seperti halnya Indeks Pendidikan, realisasi Indeks kesehatan sebesar 82,72 persen juga melewati target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Maros (76,10



persen), dengan demikian capaian kinerja Indeks Kesehatan sebesar 108,70 persen dengan kategori capaian kinerja “ **SANGAT BAIK** “.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, target Indeks Pendidikan pada tahun 2024 adalah 70,05 persen. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN, maka realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Maros belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang terlihat pada grafik 3.6 dibawah, Indeks kesehatan dan Indeks Pendidikan Kabupaten Maros masih lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 3.2
Perbandingan Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan
Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2025

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Capaian Indeks Pendidikan sangat dipengaruhi oleh capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HRLS) penduduk Kabupaten Maros. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), RLS Kabupaten Maros Tahun 2024 sebesar 8,05 tahun atau setingkat SMP, sedangkan HRLS sebesar 13,59 tahun atau setingkat SMA, dengan demikian penduduk Kabupaten Maros pada Tahun 2024 rata-rata memiliki



tingkat pendidikan paling tinggi adalah SMP atau setara dan diharapkan penduduk yang lahir pada Tahun 2024 memiliki pendidikan hingga SMA atau setara.

Rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah Kabupaten Maros masih rendah disebabkan masih banyak anak usia sekolah, utamanya pada tingkatan umur 13-15 tahun yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Hal ini dipengaruhi faktor budaya dan ekonomi masyarakat. Selain itu masih kurangnya fasilitas pendidikan menengah atas juga menjadi salah satu permasalahan. Untuk mengatasi hal tersebut beberapa intervensi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Maros untuk meningkatkan Indeks Pendidikan diantaranya adalah perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan wewenang kabupaten (PAUD, SD dan SMP), mengintensifkan pendataan terkait anak yang putus dan tidak sekolah hingga ke desa dan kelurahan, pengadaan bantuan seragam sekolah bagi seluruh murid sekolah dasar dan menengah pertama, serta mengintensifkan program dan kegiatan Paket A, B dan C bagi penduduk usia lanjut.

Indeks Kesehatan Kabupaten Maros telah menunjukkan capaian yang cukup baik, hal ini dapat terlihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk Kabupaten Maros yang mencapai 73,77 Tahun yang berarti penduduk Kabupaten Maros yang lahir pada Tahun 2024 diharapkan memiliki umur rata-rata 73,77 tahun.

Walaupun memiliki capaian yang cukup baik, namun terdapat beberapa masalah terkait pencapaian Indeks kesehatan, yaitu masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA). Selain itu masih kurangnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan secara teratur dan lengkap di fasilitas kesehatan juga berpengaruh terhadap pencapaian Indeks kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Maros melalui instansi terkait telah melakukan sosialisasi secara intensif dengan bantuan kader-kader posyandu dan kader PKK terkait kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir, balita dengan melakukan imunisasi lengkap, selain itu peningkatan sarana prasarana kesehatan juga telah dilakukan baik di tingkat puskesmas, puskesmas pembantu, maupun pada tingkat rumah sakit daerah.

2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Keagamaan

Layanan terhadap keagamaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam menjamin hak-hak setiap masyarakat dan warga negara dalam menjalankan



ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Untuk mengukur kualitas pelayanan terkait keagamaan yang dilakukan pemerintah maka digunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keagamaan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan terkait keagamaan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, tujuan dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terkait keagamaan.

Realisasi IKM Layanan Keagamaan pada tahun 2024 sebesar 3,77 poin (sangat baik), meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (3.55 poin). Realisasi IKM layanan Keagamaan Tahun 2024 juga melampaui target RPJMD pada akhir periode yaitu 3,26 poin. Dengan demikian capaian sasaran 2 Misi 2 RPJMD Periode 2021-2026 pada tahun 2024 adalah 109,23 persen dengan predikat capaian kinerja **SANGAT TINGGI**.

Tabel 2.6
Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Layanan Keagamaan Kabupaten Maros Tahun 2024

| NO | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Target Nasional (RPJMN) |
|----|--|--------------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keagamaan | Nilai Indeks | 3,55 | 3,26 | 3,77 | 115,64 | 3,26 | - |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

3. Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan. Untuk mengukur pencapaian PUG maka digunakan



Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Realisasi IPG Kabupaten Maros tahun 2024 sebesar 89,50, masih menggunakan data tahun 2023. Hal ini disebabkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) belum melakukan publikasi realisasi IPG Tahun 2024. Realisasi IPG tahun 2023 sebesar 89,50, belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 90,31 poin dan target dalam RPJMN pada Tahun 2024 yaitu sebesar 91,50 poin. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran 3 misi 2 sebesar 99,10 persen, dengan kategori capaian **SANGAT TINGGI**.

Tabel 2.7
Target, Realisasi, dan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Maros Tahun 2024

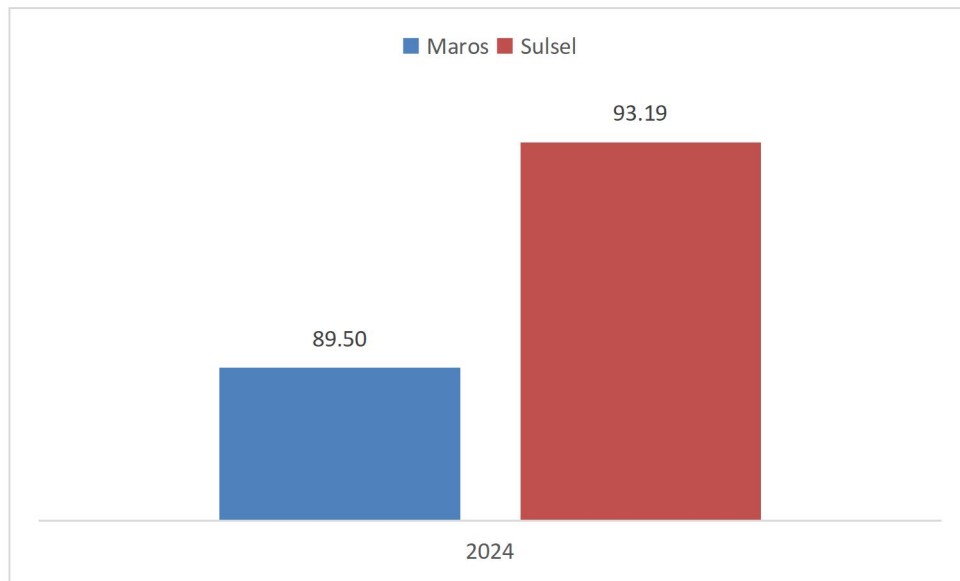
| NO | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Target Nasional (RPJMN) |
|----|---------------------------|--------------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Gender | Nilai Indeks | 89,50 | 90,31 | 89,50 | 99,10 | 90,85 | 91,5 |

Sumber : Kemen PPA, 2025

Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, maka IPG Kabupaten Maros rendah dibandingkan IPG Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Maros lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan.



Grafik 3.3
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



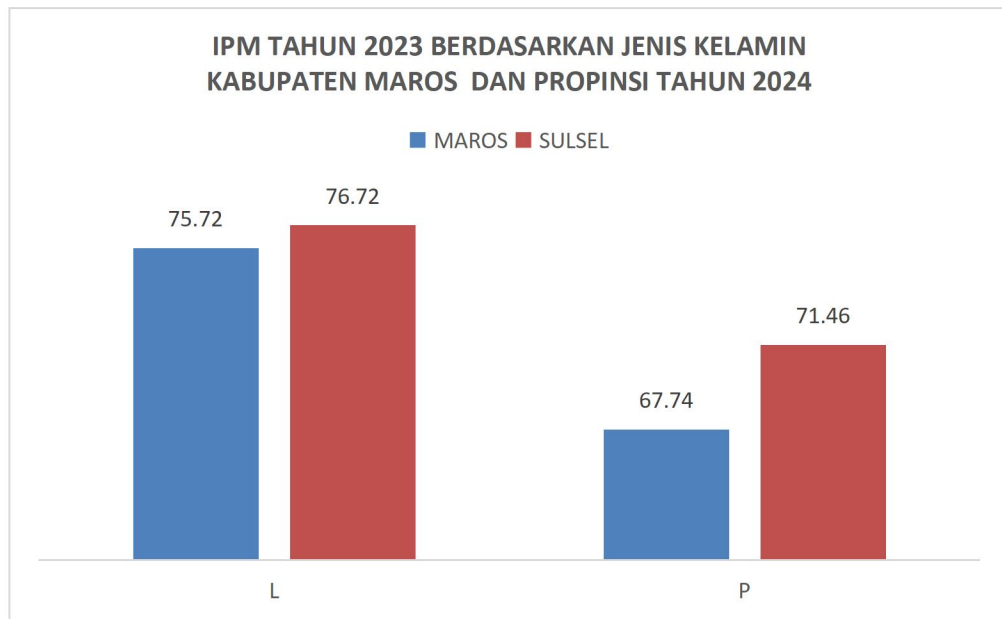
Sumber : Kemen PPA, 2025

Sesuai dengan pernyataan pada paragraf sebelumnya, IPG merupakan perbandingan antara IPM Penduduk Laki-laki dan IPM Penduduk Perempuan, maka diketahui hal yang menyebabkan masih rendahnya IPG Kabupaten Maros disebabkan masih tingginya ketimpangan antara pembangunan manusia penduduk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. IPM Penduduk laki-laki kabupaten Maros Tahun 2023 sebesar 75,32 poin, sedangkan Perempuan sebesar 67,74 poin.

Rendahnya IPG Kabupaten Maros disebabkan budaya sebagian masyarakat yang masih menganggap perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi dan pendapatan sendiri, karena laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga dan akan mencari nafkah. Sedangkan faktor yang mendorong pencapaian IPG tahun 2023 antara lain banyaknya organisasi pemerintah dan swasta yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Periode 2021-2026, pemberdayaan dan pembangunan gender merupakan salah satu prioritas pembangunan dan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Maros.



Grafik 3.4
Perbandingan IPM Lak-Laki dan IPM Perempuan
Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber : Kemen PPA, 2025

MISI 3. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Maksud dari misi 3 adalah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kebutuhan dasar (mulai dari kebutuhan sandang, pangan, hingga papan) dan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, ketentraman dan ketertiban, serta layanan sosial). Tujuan dari misi 3 adalah Mengoptimalkan Pemenuhan layanan Dasar dan Ketersediaan Kebutuhan Dasar Masyarakat. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah; (1) meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat dan (2) Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat. Capaian dari tujuan dan sasaran pada Misi 3 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Kebutuhan Konsumsi Masyarakat

Untuk mengukur ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat digunakan Indikator Indeks Harga Konsumen (IHK). Indikator ini merupakan ukuran untuk menentukan harga sekelompok barang yang paling umum digunakan. Dalam membandingkan harga sekelompok barang dan jasa, diterapkan prinsip secara relatif terhadap harga sekelompok barang dan jasa yang



sama. IHK dapat menggambarkan jumlah serta ketersediaan barang maupun jasa. Biasanya saat nilai IHK terus menanjak, maka pembelian persediaan dapat dipercepat untuk menghindari pembelian persediaan yang lebih tinggi.

Penentuan IHK Kabupaten Maros tidak langsung mengikut ke Kabupaten atau Kota terdekat, yang dalam hal ini Kota Makassar. Realisasi IHK Kabupaten Maros Tahun 2024 sebesar 106,13 poin, menurun apabila dibandingkan tahun sebelumnya (116,59 poin). Walaupun menunjukkan penurunan, realisasi IHK Tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 102,99 poin. Capaian kinerja IHK Tahun 2023 sebesar 97,04 persen dengan kategori kinerja **SANGAT BAIK**.

Penurunan IHK Tahun 2024 menunjukkan semakin stabilnya harga-harga barang kebutuhan pokok yang menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat baik makanan maupun non makanan dapat terpenuhi dengan baik. Stabilnya harga barang kebutuhan pokok ini disebabkan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maros untuk menstabilkan harga dilakukan secara intensif.. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya, operasi pasar murah yang rutin dilakukan utamanya pada saat menjelang hari raya, gerakan pangan murah yang menyediakan bahan-bahan pangan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta operasi bersama aparat dan stakeholder lainnya terkait kontrol harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional dan pasar modern se Kabupaten Maros.

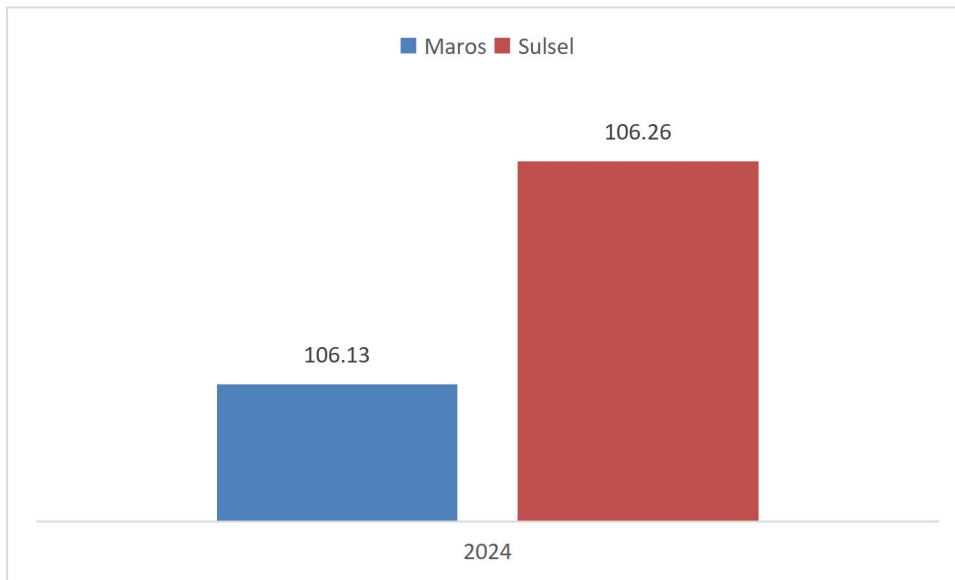
Tabel 2.8
Target, Realisasi dan Capaian Indeks Harga Konsumen
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Target Nasional (RPJMN) |
|----|-----------------------|--------------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Indeks Harga Konsumen | Nilai Indeks | 116,59 | 102,99 | 106,13 | 97,04 | 98,91 | - |

Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2025

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi IHK Kabupaten Maros masih lebih rendah sehingga dapat dikatakan harga-harga komoditi di Kabupaten Maros baik makanan maupun non makanan masih lebih stabil dibandingkan harga komoditas yang sama pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 3.5
Perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK)
Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2024

2. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. 2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

Untuk mengukur pelayanan pemerintah terkait pemenuhan SPM, maka digunakan indikator IKM Layanan Minum Masyarakat. Pengukuran dilakukan terhadap bidang-bidang SPM yaitu; Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum, Ketentraman dan ketertiban Umum, serta Bidang Perumahan. IKM Pelayanan SPM tahun 2023 sebesar 3,28 poin, lebih tinggi dari target dalam RPJMD, yaitu 3,26 poin. Berdasarkan hasil survei opini publik kinerja pemerintahan, maka realisasi IKM Tahun 2024 masuk dalam ketegori "**SANGAT BAIK**". Sedangkan capaian kinerja pelayanan standar pelayanan minimal Tahun 2023 sebesar 100,92 persen dengan ketgori kinerja **SANGAT TINGGI**.



Tabel 2.9
Target, Realisasi, dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Layanan Minimum Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2024

| NO | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Target Nasional (RPJMN) |
|----|---|--------------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Minimum Masyarakat | Nilai Indeks | 3,28 | 3,26 | 3,07 | 94,17 | 3,26 | - |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

Realisasi IKM sebesar 3,07 poin diperoleh berdasarkan rata-rata nilai IKM dari masing-masing bidang SPM, yang dapat dilihat sebagai berikut :

a. Bidang Pendidikan

Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan SPM bidang pendidikan dilakukan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat pada; (1) Pelayanan pendidikan Anak Usia Dini; (2) Pelayanan Pendidikan Dsar dan (Pelayanan Pendidikan Kesetaraan A, B, C). Realisasi IKM bidang pendidikan sebesar 3,63 dengan predikat “ SANGAT BAIK “



Tabel 2.10
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-rata | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------------------|---|-------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Pelayanan Pendidikan anak usia dini | 1.427 | 3,41 | 85,35 | B | BAIK |
| 2 | Pelayanan pendidikan dasar | 1.460 | 3,48 | 87,11 | B | BAIK |
| 3 | Pelayanan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) | 1.319 | 3,18 | 79,46 | B | BAIK |
| Total Nilai rata-rata | | | 10,08 | | | |
| Nilai Indeks Pelayanan IKM | | | | 3,36 | | |
| | | | | | 83,97 | BAIK |

rkannya pada regulasi Pemerintah Kabupaten Maros yang terkait pelaksanaan pelayanan pendidikan seperti Perda No. 14 tahun 2016 mengenai Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; Perda nomor 15 tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Perda Nomor 8 tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak. Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa tingkat kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan anak usia dini bernilai BAIK dengan nilai kepuasan sebesar 85,35 poin dan nilai rata-rata 3,41. Begitupun dengan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dasar, memperoleh kinerja BAIK berdasarkan opini masyarakat. Nilai untuk aspek pendidikan dasar sebesar 87,11 dengan nilai rata-rata 3,48.

Hal yang menarik adalah jika merujuk pada nilai indeks pelayanan Pendidikan pada unsur pelayanan Pendidikan kesetaraan mengalami peningkatan penilaian dari yang sebelumnya KURANG BAIK menjadi BAIK dengan akumulasi nilai sebesar 79,46 dengan rata-rata 3,18 dari sebelumnya 70,59 dengan rata-rata 2,82. Ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah untuk berupaya meningkatkan pelayanan khususnya di unsur Pendidikan kesetaraan ini. Secara keseluruhan, aspek pelayanan bidang Pendidikan di Kabupaten Maros mendapatkan total nilai 83,97 dengan nilai indeks pelayanan di angka 3,36. Masyarakat sudah menilai BAIK atas pelayanan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros.

Penilaian terkait baiknya pelayanan pada sektor pendidikan banyak



disebabkan oleh semakin baiknya kondisi sarana prasarana pendidikan yang ada di Maros baik pada tingkat pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar maupun pada tingkat pendidikan non formal. Komitmen Pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan juga telah dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan pihak *google* dalam rangka penyediaan *chrome book* untuk beberapa sekolah, baik Sekolah Dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), selain itu pengadaan seragam sekolah untuk siswa baru SD dan SMP juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh anak dapat bersekolah. Untuk pendidikan non formal, dalam rangka mengurangi angka putus sekolah. Pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta mendirikan sekolah lansia, sehingga penduduk lansia dapat memiliki pendidikan yang baik dan terstandarisasi.

b. Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan implementasi kebijakan yang harus dilakukan secara menyeluruh (*comprehensive*), terpadu (*integrated*) dan berkesinambungan (*sustainable*). Prinsip pembangunan kesehatan ini merupakan penerapan dari 'ruh' atau semangat yang sudah sejak lama dicetuskan oleh para pionir penggerak kesehatan dunia pada deklarasi Alma Atta tahun 1978 dengan prinsip *Comprehensive Primary Health Care* (PHC) sebagai nilai dasar dalam mencapai kesehatan suatu bangsa. Derajat kesehatan diyakini hanya dapat dicapai dengan menggunakan prinsip PHC, yakni kesetaraan dan pemerataan sumber daya, peningkatan pendidikan, kekuatan ekonomi, program pemerintah yang tepat dan menyeluruh mulai preventif hingga rehabilitatif, integrasi dengan berbagai sektor terkait, dan partisipasi masyarakat.

Di Kabupaten Maros, terdapat dua rumah sakit yakni satu rumah sakit umum milik pemerintah dan satu rumah sakit khusus milik TNI/POLRI. Selain itu, Kabupaten Maros memiliki 14 Puskesmas di 14 Kecamatan, memiliki 53 praktek mandiri dokter umum perorangan, 28 praktek mandiri dokter gigi perorangan, 5 praktek mandiri dokter spesialis perorangan, dan 48 tempat bidan praktek mandiri yang tersebar di hampir semua kecamatan. Selain itu, terdapat sarana kesehatan penunjang berupa 23 klinik pratama yang terdiri dari 8 milik TNI/POLRI, 2 Milik BUMN, dan 13 Milik Swasta. Dari berbagai fasilitas tersebut, menunjang kualitas pelayanan dasar di bidang Kesehatan di Kabupaten Maros. Hal tersebut terkonfirmasi dalam survei opini publik yang dilaksanakan pada akhir November



2024, kinerja pelayanan kesehatan di Kabupaten Maros mendapatkan predikat BAIK dengan nilai kepuasan sebesar 81,90 dan Indeks nilai kepuasan 3,15. Pelayanan dasar di bidang Kesehatan ini mendapatkan angka kepuasan kedua tertinggi dari seluruh bidang pelayanan yang dinilai oleh responden.

Terdapat 12 indikator pelayanan publik yang menjadi sasaran survei, yakni Pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan ibu bersalin; Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; Pelayanan kesehatan pada usia produktif; Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TBC); Pelayanan penyakit virus (Cth. Covid-19). Dari kedua belas indikator tersebut, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TBC) mendapatkan predikat kinerja KURANG BAIK dengan nilai 74,09 dan 75,79. Hal tersebut disebabkan karena masih belum tersedianya rumah sakit khusus untuk pelayanan pasien gangguan jiwa. Namun, puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Maros maupun beberapa klinik menyediakan fasilitas pelayanan psikologi untuk masyarakat. Terkait dengan penanganan TBC kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat yang berimplikasi terhadap stigma sosial berujung minimnya penemuan kasus.

Tabel 2.11
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Maros Tahun 2024

| NO | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-rata | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----|--|-------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 1.405 | 3,38 | 84,44 | B | BAIK |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 1.406 | 3,37 | 84,29 | B | BAIK |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 1.405 | 3,37 | 84,23 | B | BAIK |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | 1.402 | 3,35 | 83,65 | B | BAIK |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan | 1.405 | 3,39 | 84,64 | B | BAIK |



| NO | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-rata | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------------------|--|-------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| | dasar | | | | | |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 1.384 | 3,34 | 83,57 | B | BAIK |
| 7 | BAIK Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 1.367 | 3,31 | 82,75 | B | BAIK |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 1.386 | 3,36 | 83,90 | B | BAIK |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 1.314 | 3,20 | 79,93 | B | BAIK |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa | 1.138 | 2,96 | 74,09 | C | KURANG BAIK |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TBC) | 1.252 | 3,03 | 75,79 | C | KURANG BAIK |
| 12 | Pelayanan penyakit virus (Cth. Covid-19) | 1.357 | 3,26 | 81,55 | B | BAIK |
| Total Nilai rata-rata | | | 44,21 | | | |
| Nilai Indeks Pelayanan IKM | | | | 3,14 | | |
| | | | | | 81,90 | BAIK |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

Di Kabupaten Maros, terdapat dua rumah sakit yakni satu rumah sakit umum milik pemerintah dan satu rumah sakit khusus milik TNI/POLRI. Selain itu, Kabupaten Maros memiliki 14 Puskesmas dari 14 Kecamatan, memiliki 53 praktek mandiri dokter umum perorangan, 28 praktek mandiri dokter gigi perorangan, 5 praktek mandiri dokter spesialis perorangan, dan 48 tempat bidan praktek mandiri yang tersebar di hampir semua kecamatan. Selain itu, terdapat sarana kesehatan penunjang berupa 23 klinik pratama yang terdiri dari 8 milik TNI/POLRI, 2 Milik BUMN, dan 13 Milik Swasta. Dari berbagai fasilitas tersebut, menunjang kualitas pelayanan dasar di bidang Kesehatan di Kabupaten Maros. Hal tersebut terkonfirmasi dalam survei opini public yang dilaksanakan pada akhir November 2024, pelayanan Kesehatan di Kabupaten Maros mendapatkan kinerja BAIK dengan nilai kepuasan sebesar 81,90 dan Indeks nilai kepuasan 3,145. Pelayanan



dasar di bidang Kesehatan ini mendapatkan angka kepuasan kedua tertinggi dari seluruh bidang pelayanan yang dinilai oleh responden.

Terdapat 12 indikator pelayanan publik yang menjadi sasaran survei, yakni Pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan ibu bersalin; Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; Pelayanan kesehatan pada usia produktif; Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TBC); Pelayanan penyakit virus (Cth. Covid-19). Dari kedua belas indikator tersebut, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan predikat kinerja KURANG BAIK dengan nilai 74,09 dan 75,79. Hal tersebut disebabkan karena masih belum tersedianya rumah sakit khusus untuk pelayanan pasien gangguan jiwa. Namun, puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Maros maupun beberapa klinik menyediakan fasilitas pelayanan psikologi untuk masyarakat. Terkait dengan penanganan TBC kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat yang berimplikasi terhadap stigma sosial berujung minimnya penemuan kasus.

c. Bidang Pekerjaan Umum

Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan SPM bidang Pekerjaan Umum dilakukan dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap; (1) Kualitas pelayanan dasar kebutuhan air minum sehari-hari, (2) Kualitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Realisasi IKM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 sebesar 2,95 poin dengan kategori kinerja KURANG BAIK.

Tabel 2.12
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-rata | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-----------------------|--|-------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Kualitas pelayanan dasar kebutuhan air minum sehari-hari | 1.306 | 3,10 | 77,55 | B | BAIK |
| 2 | Kualitas pelayanan pengelolaan air limbah domestik | 1.179 | 2,81 | 70,18 | C | KURANG BAIK |
| Total Nilai rata-rata | | | 5,91 | | | |



| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-rata | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----|------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| | Nilai Indeks Pelayanan | | | 2,95 | | |
| | IKM | | | | 73,87 | KURANG BAIK |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

Berdasarkan hasil survei, kualitas pelayanan dasar bidang pekerjaan umum di Kabupaten Maros mengalami peningkatan nilai indeks pelayanan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 sebesar 64,54 (TIDAK BAIK) mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 73,87 dengan predikat KURANG BAIK, dimana indeks pelayanan di angka 2,95. Indikator kunci dari bidang pelayanan ini adalah akses pelayanan dasar kebutuhan air minum sehari-hari bagi masyarakat, dan pengelolaan air limbah domestik.

Faktor yang menyebabkan masih kurangnya kepuasan terhadap pengelolaan air limbah disebabkan beberapa faktor, diantaranya; (1) Belum berfungsinya IPLT secara optimal sehingga limbah yang berasal dari rumah tangga belum seluruhnya dapat dibuang ke IPLT, (2) Daya tampung IPLT yang hanya sebesar 6 m³/hari menyebabkan layanan hanya berada pada kawasan perkotaan (Kecamatan Turikale, Kecamatan Mandai, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bontoa dan Kecamatan Lau), (3) Armada truk penghisap tinja belum dapat beroperasi secara maksimal disebabkan Kabupaten Maros hanya memiliki 1 unit truk yang beroperasi.

d. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan SPM bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dilakukan dengan mengukur kepuasan masyarakat pada; (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah. Capaian IKM bidang perumahan dan Kawasan pemukiman sebesar 2,93 dengan kategori kinerja KURANG BAIK.



Tabel 2.13
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Pemukiman
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-rata | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|------------------------|--|-------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana | 1.236 | 2,95 | 73,75 | C | KURANG BAIK |
| 2 | Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah | 1.137 | 2,92 | 73,07 | C | KURANG BAIK |
| Total Nilai rata-rata | | | 5,87 | | | |
| Nilai Indeks Pelayanan | | | | 2,93 | | |
| IKM | | | | | 73,41 | KURANG BAIK |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

Pelaksanaan layanan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman di masyarakat menunjukkan bahwa nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar tersebut adalah 73,41 dengan nilai indeks pelayanan sebesar 2,93. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik dari pemerintah Kabupaten Maros di bidang tersebut mendapatkan penilaian KURANG BAIK dari masyarakat. Indikator penilaian berupa penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat pada sektor perumahan dan pemukiman diakibatkan penanganan rumah terdampak bencana terkena relokasi akibat program pemerintah baru dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya sedangkan kebutuhan masyarakat terkait tempat tinggal layak tidak dapat menunggu hingga tahun berikutnya. Hal ini kemudian mengakibatkan banyaknya masyarakat yang melakukan usaha sendiri untuk mendapatkan tempat tinggal sendiri.

**e. Bidang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan mengukur kepuasan masyarakat pada; (1) ketentraman dan Ketertiban Umum, dan (2) Pelayanan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, (3) Penyediaan informasi rawan bencana, (4) Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, (5) Penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Capaian IKM Bidang Ketentraman dan perlindungan Masyarakat Tahun 2024 sebesar 3,15 poin dengan ketgori kinerja BAIK.

Tabel 2.14
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2024

| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-rata | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------------------|--|-------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Ketentraman dan ketertiban umum | 1.338 | 3,19 | 79,64 | B | BAIK |
| 2 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 1.292 | 3,08 | 76,90 | B | BAIK |
| 3 | Penyediaan informasi rawan bencana | 1.258 | 3,26 | 81,48 | B | BAIK |
| 4 | Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana | 1.303 | 3,12 | 77,93 | B | BAIK |
| 5 | Penyelamatan evakuasi korban bencana | 1.331 | 3,16 | 79,04 | B | BAIK |
| Total Nilai rata-rata | | | 15,80 | | | |
| Nilai Indeks Pelayanan IKM | | | | 3,15 | | |
| | | | | | 78,99 | BAIK |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Penyelamatan Kabupaten Maros adalah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Berdasarkan survei opini publik masyarakat Kabupaten Maros terhadap kualitas



pelayanan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial dinilai memiliki kinerja BAIK dengan nilai pelayanan 78,99 dan nilai indeks pelayanan yakni 3,15. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana sejatinya berupa serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Subdimensi yang menjadi penilaian mengenai bencana yakni Informasi rawan bencana; Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang masing- masing memperoleh penilaian BAIK sebesar 81,48, 77,93, dan 79,04.

Pelayanan terkait ketentraman dan ketertiban umum masih memiliki beberapa kendala, diantaranya; (1) cakupan pelayanan penanganan kebakaran hanya dapat dilakukan untuk wilayah-wilayah perkotaan, sedangkan wilayah kecamatan yang berada di pegunungan, belum dapat ditangani secara maksimal dikarenakan kekurangan armada pemadam, (2) Penegakan perda dan perkara belum maksimal dikarenakan masih kurangnya sosialisasi terkait perda dan perkara yang telah diterbitkan. Sedangkan untuk penanganan bencana lebih disebabkan oleh kurangnya kapasitas kelembagaan penanganan bencana, penanganan bencana masih dilakukan secara sektoral dan belum terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada.

f. Bidang Sosial

Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan SPM bidang Sosial dilakukan dengan mengukur kepuasan masyarakat pada; (1) Rehabilitasi penyandang disabilitas, (2) Rehabilitasi anak terlantar, (3) Rehabilitasi lanjut usia, (4) Rehabilitasi gelandangan dan pengemis, (5) Perlindungan dan jaminan sosial korban bencana daerah. Capaian IKM Bidang Sosial Tahun 2023 sebesar 2,90 poin dengan kategori kinerja KURANG BAIK.

Tabel 2.15
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No | Sub Inidkator | Total Nilai | Nilai Rata-rata | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----|---------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Rehabilitasi | 1.191 | 3,08 | 76,94 | B | BAIK |



| | | | | | | |
|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | penyandang disabilitas | | | | | |
| 2 | Rehabilitasi anak terlantar | 1.088 | 2,81 | 70,28 | C | KURANG BAIK |
| 3 | Rehabilitasi lanjut usia | 1.102 | 2,85 | 71,19 | C | KURANG BAIK |
| 4 | Rehabilitasi gelandangan dan pengemis | 1.048 | 2,71 | 67,70 | C | KURANG BAIK |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial korban bencana daerah | 1.256 | 3,04 | 76,03 | C | KURANG BAIK |
| Total Nilai rata-rata | | | 14,49 | | | |
| Nilai Indeks Pelayanan | | | | 2,90 | | |
| IKM | | | | | 72,43 | KURANG BAIK |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2024

Berdasarkan data tabel diatas, persepsi publik Kabupaten Maros terhadap kinerja pelayanan pada Bidang Sosial adalah KURANG BAIK dengan tingkat kepuasan dari masyarakat hanya berada di nilai 72,43 dengan nilai indeks pelayanan yakni 2,90 poin. Perolehan kinerja berdasarkan persepsi publik yang dilakukan melalui survei tersebut seharusnya mampu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelayanan dasar sosial pada masyarakat dapat ditingkatkan. Pada Indikator Rehabilitasi gelandangan dan pengemis menjadi rujukan percepatan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan survei, perolehan nilai indeks menunjukkan yang paling rendah dengan kategori KURANG BAIK sebesar 67,70 atau rata-rata nilai indeks sebesar 2,7. Begitupun dengan pelaksanaan rehabilitasi anak terlantar, lanjut usia, dan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana yang masih KURANG BAIK untuk indeks pelayanannya. Meskipun rata-rata masih memerlukan perhatian serius, berbeda dengan indikator rehabilitasi penyandang cacat, ini menunjukkan nilai positif yakni BAIK dengan nilai indeks 76,94. Pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang, dengan tetap berfokus pada peningkatan layanan dasar bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Permasalahan terkait pelayanan pada bidang sosial sebenarnya telah dilakukan. Beberapa Intervensi yang dilakukan untuk mengatasi masalah terkait pelayanan sosial adalah memfokuskan pada program rehabilitasi terutama pada



anak terlantar dan pengemis yang mencakup akses pendidikan, pelatihan keterampilan serta dukungan psikososial. Program rehabilitasi sosial untuk anak terlantar dan pengemis bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan terkait masih banyaknya anak terlantar dan pengemis di Kabupaten Maros tidak lepas dari keberadaan anak terlantar dan pengemis yang berasal dari Kota Makassar. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar dan stakeholder lainnya terkait pengembalian para pengemis dan anak terlantar tersebut ke panti sosial di bawah wewenang Pemerintah Kota Makassar.

MISI 4. MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL

Maksud dari Misi 4 adalah penguatan ekonomi masyarakat melalui upaya pemberdayaan kelompok–kelompok ekonomi masyarakat untuk memanfaatkan potensi daerah, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, dan menjadi sektor unggulan daerah serta mampu mensejahterakan masyarakat. Tujuan dari Misi 4 adalah Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Berbasis Keunggulan Sumberdaya Ekonomi Daerah. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah; (1) Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Daerah Terhadap PDRB, (2) Menurunnya Jumlah Pengangguran, (3) Terkendalinya laju Inflasi, dan (3) Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin. Capaian dari tujuan dan sasaran Misi 4 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Daerah Terhadap PDRB

Pertumbuhan pertumbuhan sektor unggulan daerah adalah pertumbuhan sektor lapangan usaha PDRB yang dapat diintervensi perkembangannya oleh pemerintah. Dalam hal ini terdapat 15 sektor lapangan usaha dalam PDRB. Sedangkan PDRB perkapita adalah PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tertentu. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Untuk menghitung kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB maka digunakan indikator persentase pertumbuhan sektor unggulan dan PDRB Perkapita.



Realisasi pertumbuhan sektor unggulan daerah pada tahun 2024 sebesar 4,11 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya (2,28 persen). Walaupun meningkat, persentase pertumbuhan sektor unggulan daerah belum dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu 6,24 persen. Melihat kondisi perekonomian daerah hingga tahun 2024, dapat dipastikan bahwa persentase pertumbuhan sektor unggulan tidak akan mencapai target pada akhir periode RPJMD. Capaian kinerja persentase sektor unggulan daerah Tahun 2024 sebesar 65,87 persen dengan kategori RENDAH.

Sedangkan untuk realisasi PDRB Perkapita pada Tahun 2024 sebesar 69,21 juta /jiwa, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (64,69 juta/jiwa). PDRB Perkapita Tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu 53,08 juta/jiwa, dengan demikian capaian kinerja PDRB Perkapita Tahun 2024 sebesar 116,61 persen dengan kategori kinerja SANGAT BAIK.

Tabel 2.16
Target, Realisasi, dan Capaian Persentase Sektor Unggulan Daerah
serta PDRB Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2024

| NO | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Target Nasional (RPJMN) |
|----|---|--------------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Persentase Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah | Nilai Indeks | 2,28 | 6,24 | 4,11 | 65,87 | 7,79 | - |
| 2 | PDRB Perkapita | Juta Rp/jiwa | 64,69 | 53,08 | 64,69 | 121,87 | 57,44 | - |

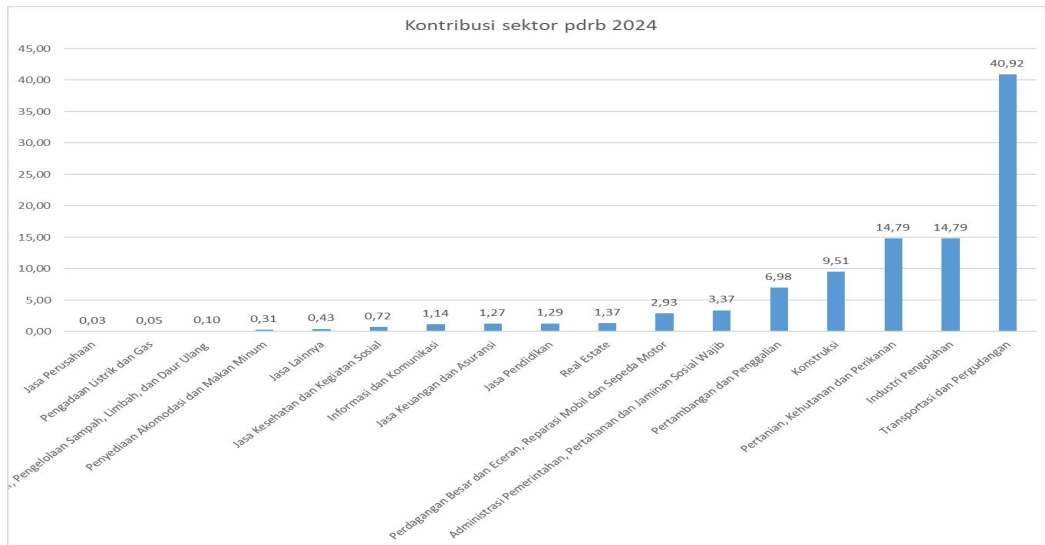
Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2025

Rendahnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disebabkan peranan sektor transportasi dan perdagangan serta sektor industri pengolahan sangat dominan terhadap PDRB Kabupaten Maro. Sektor transportasi dan perdagangan sangat dominan akibat adanya Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, sedangkan pada sektor industri pengolahan akibat adanya pabrik Semen Bosowa serta Pabrik Teh Cap Orang Tua. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terkait proses produksi jasa pada kedua sektor lapangan usaha tersebut.

Grafik 3.6



Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Maros Tahun 2024

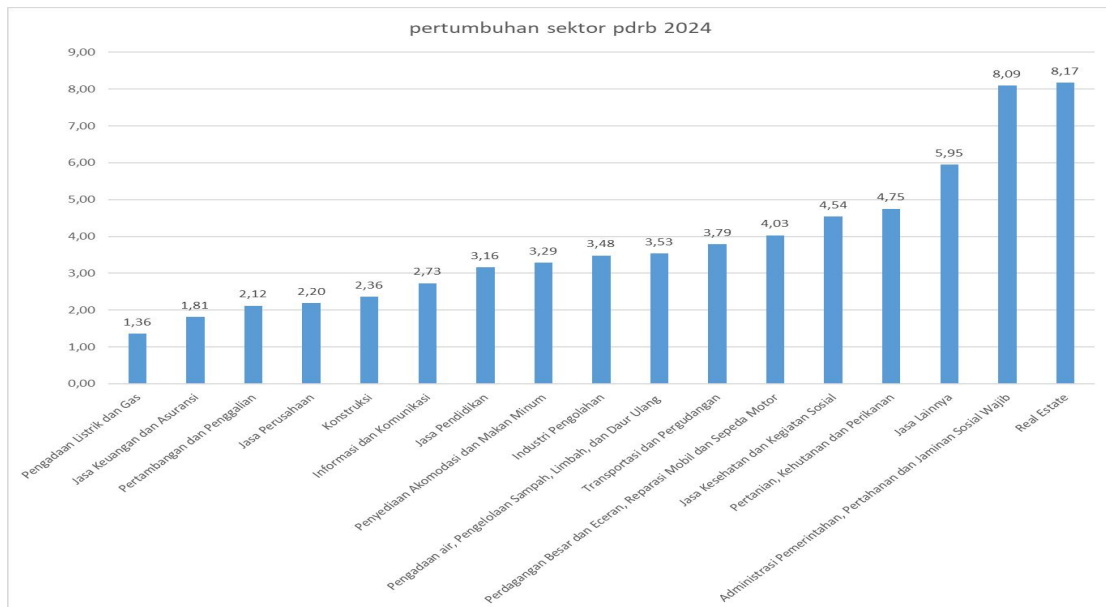


Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sektor unggulan yang dimaksud dalam hal ini adalah 15 sektor lapangan usaha dalam PDRB. Pertumbuhan setiap sektor tersebut memiliki capaian yang bervariasi, namun apabila dilihat dari pertumbuhan, maka sektor yang memiliki pertumbuhan paling tinggi tahun 2024 adalah real estate, dengan laju pertumbuhan sebesar 8,17 persen, kemudian diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 8,09 persen. Untuk sektor yang memiliki laju pertumbuhan paling lambat adalah sektor pengadaan listrik dan gas dengan pertumbuhan 1,36 persen.



Grafik 3.7
Pertumbuhan Setiap Sektor Unggulan Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2024



Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2023

Demikian pula dengan PDRB perkapita, walaupun telah menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya serta melampaui target dalam RPJMD, namun realisasi PDRB perkapita masih termasuk dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

2. Menurunnya Jumlah Pengangguran

Indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2024, TPT Kabupaten Maros sebesar 4,34 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (3,64 persen). Realisasi TPT Tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 4,05 persen, namun melampaui target RPJMN sebesar 4,50 persen. Capaian kinerja TPT tahun 2024 sebesar 93,32 persen dengan kategori kinerja SANGAT TINGGI.



Tabel 2.17
Target, Realisasi, dan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Maros Tahun 2024

| N O | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Target Nasional (RPJMN) |
|-----|---------------------------------|--------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Tingkat Pengguran terbuka (TPT) | Persen | 3,64 | 4,05 | 4,34 | 93,32 | 3,52 | 4,30 |

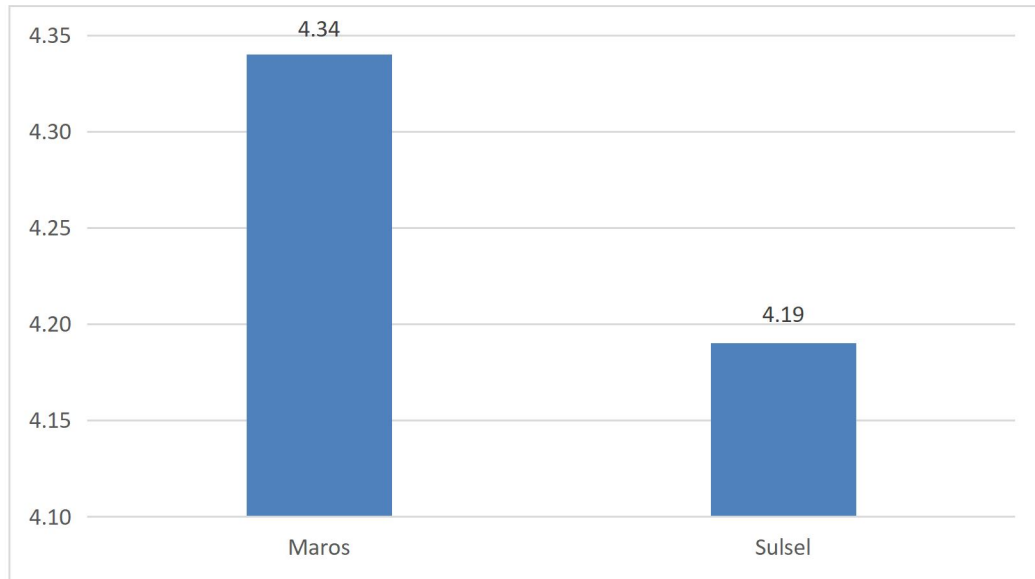
Sumber BPS Kab. Maros 2025

Peningkatan tingkat pengangguran pada tahun 2024 disebabkan tidak seimbangnya antara jumlah penduduk usia angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini disebabkan tingginya angka migrasi penduduk masuk ke Kabupaten Maros, utamanya pada kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2024 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 95,60 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 96,36 persen. Selain itu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa dengan persentase diatas 50 persen. Berdasarkan data tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang tersedia bekerja di sektor jasa, namun lapangan pekerjaan pada sektor tersebut masih sangat kurang sehingga menyebabkan tingkat pengangguran Kabupaten Maros meningkat pada tahun 2024. Kualitas tenaga kerja juga merupakan permasalahan tersendiri. Tingkat pendidikan merupakan masalah utama, dimana rata-rata tingkat pendidikan tenaga kerja berada pada tingkat SMA ke bawah sehingga level pekerjaan yang dapat dipenuhi adalah level pekerja menengah ke bawah. Tingkat keahlian yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang tersedia juga menjadi permasalahan, dimana rata-rata tenaga kerja belum memiliki sertifikat keahlian atau profesi sehingga cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sifatnya *Full Time*.

Realisasi TPT Kabupaten Maros tahun 2024 berada diatas TPT Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2024 yaitu sebesar 4,19 persen.



Grafik 3.8
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2025

3. Terkendalinya Laju Inflasi

Laju inflasi adalah persentase kenaikan harga dari suatu periode ke periode selanjutnya. Kenaikan harga setiap periode atau terus menerus ini adalah kondisi yang disebut inflasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Maros tidak menghitung inflasi sehingga untuk inflasi digunakan data Kota Makassar sebagai Kota/Kabupaten terdekat.

Laju inflasi Tahun 2024 sebesar 1,74 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2,89 persen). Hal ini menunjukkan pada Tahun 2024 kondisi inflasi lebih rendah dibandingkan Tahun 2023 yang berdampak terhadap kondisi perekonomian yang lebih stabil. Realisasi laju inflasi Tahun 2024 berada di atas target yang ditetapkan dalam RPJMD (3,47 persen) serta RPJMN (2,50 persen). Capaian kinerja laju inflasi Tahun 2024 sebesar 199,43 persen dengan kategori kinerja SANGAT BAIK.

Tabel 3.18
Target, Realisasi, dan Capaian Laju Inflasi Kabupaten Maros Tahun 2024

| NO | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Target Nasional (RPJMN) |
|----|-------------------|--------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Laju | Persen | 2,89 | 3,47 | 1,74 | 199,43 | 3,00 | 2,50 |



| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| Inflasi | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|

Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2025

Laju inflasi pada tahun 2024 dipengaruhi stabilnya harga-harga kebutuhan pokok sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan terkait bahan pokok. Beberapa komoditi makanan yang dimaksud adalah beras tomat, daging ayam ras, bawang merah, Telur ayam ras, ikan layang/ikan benggol, angkutan antar kota, ikan cakalang/ikan sisik, kangkung, ayam, dan ikan bandeng/ikan bolu.

Dalam rangka menekan laju inflasi Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan beberapa intervensi, diantara dengan melaksanakan operasi pasar untuk menekan harga, gerakan pangan murah serta menggalakkan gerakan pangan lestari, yaitu gerakan menanam sayur, cabai serta beberapa bahan pokok lainnya di halaman rumah.

4. Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka Kemiskinan Kabupaten Maros tahun 2024 sebesar 9,32 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya (9,65 persen). Realisasi angka kemiskinan pada Tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD (7,99 Persen), namun melampaui target dalam RPJMN (9,34 persen). Dengan demikian capaian kinerja angka kemiskinan Tahun 2024 sebesar 85,73 persen dengan kategori capaian kinerja TINGGI.

Tabel 2.19
Target, Realisasi, dan Capaian Angka Kemiskinan
Kabupaten Maros Tahun 2024

| NO | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Target Nasional (RPJMN) |
|----|-------------------|--------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Angka Kemiskinan | Persen | 9,65 | 7,99 | 9,32 | 85,73 | 7,64 | 9,34 |

Sumber : BPS Kab. Maros, 2025

Penurunan angka kemiskinan Tahun 2024 salah satu faktor utama adalah sektor pertanian. Pada 2023 kemiskinan sempat meningkat karena banyak petani yang gagal panen akibat bencana banjir dan kemarau panjang. Namun, di 2024,



kondisi cuaca lebih stabil, sehingga produksi pertanian kembali meningkat sehingga petani dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik dari hasil penjualan hasil pertanian.

Intervensi terkait penanggulangan kemiskinan telah masif dilakukan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) yang berasal dari Pemerintah Pusat. Selain itu, beberapa program Pemerintah Kabupaten Maros, antara lain program pemberian bantuan bibit ikan bagi pembudidaya ikan, dan pembangunan jalan produksi, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penanganan pemukiman kumuh, turut memberikan andil yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

MISI 5. MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN PEMERATAAN WILAYAH

Maksud dari Misi 5 adalah penguatan ekonomi masyarakat melalui upaya pemberdayaan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat untuk memanfaatkan potensi daerah, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik dan menjadi sektor unggulan daerah serta mampu mensejahterakan masyarakat. Tujuan dari Misi 5 adalah Menurunnya Tingkat Kesenjangan Pendapatan Masyarakat di tiap wilayah, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Realisasi IKLI pada tahun 2024 sebesar 3,14 poin, menurun dibandingkan tahun sebelumnya (3,24 poin). Nilai IKLI tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 3,25 poin. Capaian kinerja IKLI tahun 2024 sebesar 99,69 persen dengan kategori kinerja SANGAT TINGGI.



Tabel 2.20
Target, Realisasi, dan Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)
Kabupaten Maros Tahun 2024

| NO | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Target Nasional (RPJMN) |
|----|---|--------------|--------------|--------|-----------|---------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kualitas Layanan Infrastruktur | Nilai Indeks | 3,24 | 3,26 | 3,14 | 96,32 | 3,26 | - |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, menunjukkan bahwa pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan yang diprogramkan oleh pemerintah sangat memadai dalam mendukung aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat. Begitu pun dengan pelayanan telekomunikasi yang mendapatkan nilai indeks kepuasan yang cukup tinggi. Masyarakat menilai bahwa layanan infrastruktur transportasi (darat dan laut), sanitasi, perumahan, dan persampahan tersedia dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan infrastruktur telekomunikasi dan listrik, masyarakat menilai bahwa infrastruktur sudah sangat memadai dan cukup mudah diakses. Pada sembilan kategori tersebut, masyarakat memberikan nilai kinerja sangat baik dan baik atas usaha layanan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun, dalam hal layanan infrastruktur drainase, air minum, dan irigasi, masyarakat menilai bahwa pemerintah masih perlu berupaya lebih keras untuk mendorong ketersediaan dan kemudahan akses untuk infrastruktur tersebut.

1. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan salah satu elemen utama dalam mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan tabel, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan infrastruktur jalan diperoleh nilai 86,16, dengan mutu pelayanan termasuk kategori BAIK (B). Skor kinerja tertinggi terdapat pada unsur ketersediaan dengan nilai rata-rata 3,53 dan mutu



pelayanan SANGAT BAIK (A), menunjukkan bahwa masyarakat merasa jalan-jalan yang tersedia cukup memadai. Kinerja pada aspek efektivitas pemanfaatan dan kontribusi terhadap perekonomian masing-masing mendapatkan nilai rata-rata 3,44 dan 3,47, dengan kategori BAIK, namun masih perlu untuk ditingkatkan.

Secara umum kepuasan masyarakat terkait infrastruktur jalan masih baik. Hal ini disebabkan perbaikan infrastruktur jalan masih merupakan salah satu prioritas utama dalam penganggaran yang dilaksanakan selama RPJMD Tahun 2021-2026, baik melalui APBD Murni maupun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Adapun ruas jalan yang belum mendapatkan perbaikan atau rehabilitasi disebabkan adanya perubahan kewenangan pengelolaan jalan dari jalan provinsi ke jalan kabupaten, dimana banyak ruas jalan provinsi yang dalam kondisi rusak yang dialihkan kewenangannya ke kabupaten.

Tabel 2.21
Kualitas Layanan Infrastruktur Jalan Tahun 2024

| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-Rata | Nilai Intervensi Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Ketersediaan | 1.484 | 3,53 | 88,33 | A | SANGAT BAIK |
| 2 | Kualitas | 1.407 | 3,34 | 83,55 | B | BAIK |
| 3 | Kesesuaian | 1.442 | 3,45 | 86,24 | B | BAIK |
| 4 | Efektivitas Pemanfaatan | 1.447 | 3,44 | 85,93 | B | BAIK |
| 5 | Kontribusi pada Perekonomian | 1.440 | 3,47 | 86,75 | B | BAIK |
| Total Nilai Rata-Rata | | | 17,23 | | | |
| Nilai Indeks Pelayanan | | | | 3,63 | | |
| IKM | | | | | 86,16 | BAIK |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

2. Infrastruktur Jembatan

Jembatan memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas antar wilayah. Berdasarkan tabel, IKM layanan infrastruktur jembatan adalah 84,12, dengan mutu pelayanan dalam kategori BAIK (B). Unsur ketersediaan memiliki nilai tertinggi, yaitu 3,45, yang menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas dengan ketersediaan jembatan. Namun, unsur kualitas hanya mencapai nilai rata-rata 3,29, yang meskipun termasuk BAIK, mencerminkan kebutuhan peningkatan kualitas dalam pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

Permasalahan yang muncul terkait infratsruktur jembatan adalah masih



terdapat beberapa jembatan yang berusia sangat tua dan memerlukan pembangunan jembatan baru, selain itu akibat banjir deras yang melanda Kabupaten Maros pada tahun 2019 dan 2024 mengakibatkan banyak jembatan yang hancur dan hanyut terbawa banjir yang memerlukan pembangunan jembatan baru. Selain permasalahan tersebut, untuk infrastruktur jembatan masyarakat memiliki penilaian yang baik, dikarenakan pembangunan jembatan juga masih merupakan prioritas utama untuk bidang infrastruktur Kabupaten Maros tahun 2024.

Tabel 2.22
Kualitas Layanan Infrastruktur Jembatan Tahun 2024

| NO | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-Rata | Nilai Intervensi Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Ketersediaan | 1.447 | 3,45 | 86,34 | B | BAIK |
| 2 | Kualitas | 1.380 | 3,29 | 82,34 | B | BAIK |
| 3 | Kesesuaian | 1.399 | 3,35 | 83,67 | B | BAIK |
| 4 | Efektivitas Pemanfaatan | 1.403 | 3,36 | 84,11 | B | BAIK |
| 5 | Kontribusi pada Perekonomian | 1.397 | 3,37 | 84,16 | B | BAIK |
| Total Nilai Rata-Rata | | | 16,82 | | | |
| Nilai Indeks Pelayanan | | | | 3,36 | | |
| IKM | | | | | 84,12 | BAIK |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

3. Infrastruktur Drainase

Sistem drainase memiliki peran krusial dalam pengelolaan air hujan dan pencegahan banjir. Berdasarkan tabel di bawah ini, IKM layanan drainase adalah 73,35, dengan mutu pelayanan masuk kategori KURANG BAIK (C). Skor kinerja tertinggi terdapat pada unsur ketersediaan dengan nilai rata-rata 3,12, sementara unsur kualitas dan efektivitas pemanfaatan masing-masing hanya memperoleh nilai 2,81 dan 2,95. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa kualitas dan efektivitas drainase masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Masih rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pemenuhan infrastruktur drainase disebabkan banyaknya drainase yang tersumbat atau bahkan rusak yang mengakibatkan tidak berfungsinya pembuangan air sehingga berdampak pada bencana banjir. Akibat drainase yang tidak berfungsi dengan baik maka akan mempengaruhi



kondisi infrastruktur lainnya seperti jalan dan jembatan.

Tabel 2.23
Kualitas Layanan Infrastruktur Drainase Tahun 2024

| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-Rata | Nilai Intervensi Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Ketersediaan | 1.315 | 3,12 | 78,09 | B | Baik |
| 2 | Kualitas | 1.179 | 2,81 | 70,18 | C | Kurang Baik |
| 3 | Kesesuaian | 1.194 | 2,84 | 70,90 | C | Kurang Baik |
| 4 | Efektivitas Pemanfaatan | 1.241 | 2,95 | 73,87 | C | Kurang Baik |
| 5 | Kontribusi pada Perekonomian | 1.141 | 2,95 | 73,71 | C | Kurang Baik |
| Total Nilai Rata-Rata | | | 14,67 | | | |
| Nilai Indeks Pelayanan | | | | 2,93 | | |
| IKM | | | | | 73,35 | Kurang Baik |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

4. Infrastruktur Air Minum

Kondisi infrastruktur air minum di Kabupaten Maros terpenuhi melalui beberapa sumber, seperti Sumber mata air yang dikelola PDAM dan ada juga dipenuhi PAMSIMAS. Untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan air minum didasarkan pada lima unsur yakni ketersediaan, kualitas, kesesuaian, efektivitas pemanfaatan dan kontribusi pada perekonomian. Berdasarkan dari hasil survei, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting untuk keberlanjutan hidup dan kesehatan. Berdasarkan tabel di bawah ini, IKM layanan infrastruktur air minum adalah 77,59, dengan mutu pelayanan dalam kategori BAIK (B). Skor kinerja tertinggi terdapat pada unsur ketersediaan dengan nilai rata-rata 3,17, sementara unsur kualitas hanya memperoleh nilai 3,04, yang masuk kategori KURANG BAIK (C). Hal ini mencerminkan bahwa kualitas air minum yang disediakan masih perlu ditingkatkan.

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan pada tahun 2024 sebesar 23,33 persen, atau sekitar 23.354 rumah tangga. Masih rendahnya akses masyarakat terkait air siap minum perpipaan disebabkan belum maksimalnya pelayanan air minum di wilayah pesisir (Bontoa, Marusu, Lau) dikarenakan kondisi geografis pada ketiga kecamatan tersebut yang sangat jauh dari sumber air baku, sehingga untuk menjangkau kecamatan tersebut diperlukan pemasangan pipa yang sangat panjang, selain itu wilayah tersebut tidak memiliki sumber air tawar yang dapat



dijadikan sebagai sumber air minum. Fungsi bendungan Lekopancing yang merupakan penyuplai utama air bersih bagi Kota Makassar juga merupakan salah satu permasalahan terkait suplai air siap minum di Kabupaten Maros, dimana debit air semakin berkurang sedangkan jumlah rumah tangga yang akan dilayani semakin bertambah

Tabel 2.24
Kualitas Layanan Infrastruktur Drainase Tahun 2024

| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-Rata | Nilai Intervensi Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Ketersediaan | 1.336 | 3,17 | 79,15 | B | BAIK |
| 2 | Kualitas | 1.278 | 3,04 | 75,89 | C | KURANG BAIK |
| 3 | Kesesuaian | 1.316 | 3,13 | 78,15 | B | BAIK |
| 4 | Efektivitas Pemanfaatan | 1.316 | 3,13 | 78,15 | B | BAIK |
| 5 | Kontribusi pada Perekonomian | 1.180 | 3,06 | 76,62 | B | BAIK |
| Total Nilai Rata-Rata | | | 14,75 | | | |
| Nilai Indeks Pelayanan IKM | | | | 3,10 | | |
| | | | | | 77,59 | BAIK |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

5. Infrastruktur Transportasi Darat

Sistem transportasi sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan sistem transportasi dapat membuat mobilitas antar titik dalam suatu daerah dapat berjalan dengan baik. Sarana transportasi yang lancar dan murah dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kabupaten Maros memiliki 2 jenis transportasi yakni transportasi darat dan transportasi laut. Transportasi darat berkontribusi besar dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Berdasarkan hasil survei, IKM layanan transportasi darat adalah 78,39, dengan mutu pelayanan dalam kategori BAIK (B). Skor kinerja tertinggi terdapat pada unsur ketersediaan dengan nilai rata-rata 3,19, sementara unsur efektivitas pemanfaatan dan kualitas masing-masing memperoleh nilai 3,12 dan 3,10. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun layanan transportasi darat cukup baik, peningkatan efektivitas dan kualitas dapat memberikan dampak yang lebih besar.



Masih rendahnya kepuasan masyarakat terkait infrastruktur transportasi darat disebabkan kualitas terminal yang belum memenuhi standar, dimana terminal belum dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Selain itu rendahnya kepuasan masyarakat juga disebabkan fasilitas transportasi darat utamanya angkutan umum yang sudah tidak memenuhi standar kelaikan jalan sehingga mempengaruhi kenyamanan pengguna angkutan umum.

Tabel 2.25
Kualitas Layanan Infrastruktur Transportasi Darat Tahun 2024

| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-Rata | Nilai Intervensi Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Ketersediaan | 1.345 | 3,19 | 79,87 | B | BAIK |
| 2 | Kualitas | 1.304 | 3,10 | 77,62 | B | BAIK |
| 3 | Kesesuaian | 1.312 | 3,12 | 78,19 | B | BAIK |
| 4 | Efektivitas Pemanfaatan | 1.311 | 3,12 | 78,04 | B | BAIK |
| 5 | Kontribusi pada Perekonomian | 1.285 | 3,13 | 78,35 | B | BAIK |
| Total Nilai Rata-Rata | | | 15,68 | | | |
| Nilai Indeks Pelayanan IKM | | | | 3,13 | | |
| | | | | | 78,39 | BAIK |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

6. Infrastruktur Transportasi Laut

Transportasi laut mendukung konektivitas antar pulau dan perdagangan. Berdasarkan hasil survei, IKM layanan transportasi laut adalah 67,49, dengan mutu pelayanan dalam kategori KURANG BAIK (C). Skor kinerja tertinggi terdapat pada unsur kontribusi terhadap perekonomian dengan nilai rata-rata 2,76, sementara unsur kualitas dan efektivitas pemanfaatan masing-masing memperoleh nilai 2,70 dan 2,66. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada kualitas dan efektivitas transportasi laut sangat diperlukan untuk meningkatkan mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Pelayanan transportasi laut masih kurang dimaksimalkan disebabkan kewenangan terkait pengelolaan transportasi laut untuk kabupaten adalah transportasi



sungai yang menghubungkan antara pulau, sedangkan untuk Kabupaten Maros tidak memiliki pulau dalam wilayah geografis, sehingga dermaga yang ada saat ini adalah dermaga tambatan perahu untuk nelayan tangkap. Adanya kewenangan ini menjadi permasalahan dikarenakan untuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut adalah kewenangan provinsi.

Tabel 2.26
Kualitas Layanan Infrastruktur Transportasi Laut Tahun 2024

| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-Rata | Nilai Intervensi Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Ketersediaan | 599 | 2,76 | 69,01 | C | KURANG BAIK |
| 2 | Kualitas | 573 | 2,70 | 67,57 | C | KURANG BAIK |
| 3 | Kesesuaian | 576 | 2,70 | 67,61 | C | KURANG BAIK |
| 4 | Efektivitas Pemanfaatan | 562 | 2,66 | 66,59 | C | KURANG BAIK |
| 5 | Kontribusi pada Perekonomian | 560 | 2,66 | 66,67 | C | KURANG BAIK |
| Total Nilai Rata-Rata | | | 13,50 | | | |
| Nilai Indeks Pelayanan | | | | 2,70 | | |
| IKM | | | | | | KURANG BAIK |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

7. Infrastruktur Irigasi

Irigasi memainkan peran penting dalam mendukung produktivitas sektor pertanian. Berdasarkan hasil survei, IKM layanan infrastruktur irigasi adalah 74,85, dengan mutu pelayanan masuk kategori KURANG BAIK (C). Skor kinerja tertinggi terdapat pada unsur ketersediaan dengan nilai rata-rata 3,16, yang menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas dengan ketersediaan layanan irigasi. Namun, skor pada unsur kualitas dan efektivitas pemanfaatan masing-masing hanya mencapai 2,95 dan 2,94, yang mencerminkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan irigasi.

Rendahnya kepuasan masyarakat terkait infrastruktur irigasi disebabkan banyaknya saluran irigasi yang sudah berumur sangat tua dan dalam kondisi rusak cukup berat, hal ini menyebabkan banyaknya kebocoran pada saluran sehingga debit air yang sampai ke sawah sangat kecil. Selain itu belum adanya jenis irigasi lainnya yang dapat dimanfaatkan. Luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 5.328 ha, dari 6.081



ha total luas irigasi sehingga kondisi irigasi dalam kondisi baik sebesar 87,62 persen.

Tabel 2.27
Kualitas Layanan Infrastruktur Irigasi Tahun 2024

| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-Rata | Nilai Intervensi Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Ketersediaan | 1.300 | 3,16 | 78,88 | B | BAIK |
| 2 | Kualitas | 1.217 | 2,95 | 73,85 | C | KURANG BAIK |
| 3 | Kesesuaian | 1.209 | 2,95 | 73,72 | C | KURANG BAIK |
| 4 | Efektivitas Pemanfaatan | 1.208 | 2,94 | 73,48 | C | KURANG BAIK |
| 5 | Kontribusi pada Perekonomian | 1.219 | 2,97 | 74,33 | C | KURANG BAIK |
| Total Nilai Rata-Rata | | | 14,87 | | | |
| Nilai Indeks Pelayanan | | | | 2,99 | | |
| IKM | | | | | 74,85 | KURANG BAIK |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

8. Infrastruktur Sanitasi

Sanitasi yang memadai berkontribusi langsung terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil survei, IKM layanan infrastruktur sanitasi adalah 67,47, dengan mutu pelayanan dalam kategori KURANG BAIK (C). Skor tertinggi terdapat pada unsur kesesuaian dengan nilai rata-rata 2,75, sementara unsur kontribusi terhadap perekonomian memiliki skor terendah, yaitu 2,62. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasakan kurangnya dampak positif sanitasi terhadap kehidupan mereka, sehingga perbaikan dalam pengelolaan sanitasi menjadi prioritas utama.

Penyebab masih rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kondisi sanitasi sama dengan ketidakpuasan masyarakat pada sektor air limbah, yaitu (1) Belum berfungsinya IPLT secara optimal sehingga limbah yang berasal dari rumah tangga belum seluruhnya dapat dibuang ke IPLT, (2) Daya tampung IPLT yang hanya sebesar 6 m³/hari menyebabkan layanan hanya berada pada kawasan perkotaan (Kecamatan Turikale, Kecamatan mandai, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bontoa dan Kecamatan Lau), (3) Armada truk penghisap tinja belum dapat beroperasi secara maksimal diakibatkan Kabupaten Maros hanya memiliki 1 unit truk yang beroperasi.



Tabel 2.28
Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi Tahun 2024

| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-Rata | Nilai Intervensi Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Ketersediaan | 1.119 | 2,69 | 67,25 | C | KURANG BAIK |
| 2 | Kualitas | 1.112 | 2,68 | 66,99 | C | KURANG BAIK |
| 3 | Kesesuaian | 1.140 | 2,75 | 68,84 | C | KURANG BAIK |
| 4 | Efektivitas Pemanfaatan | 1.139 | 2,75 | 68,78 | C | KURANG BAIK |
| 5 | Kontribusi pada Perekonomian | 998 | 2,62 | 65,49 | C | KURANG BAIK |
| Total Nilai Rata-Rata | | | 13,49 | | | |
| Nilai Indeks Pelayanan | | | | 2,69 | | |
| IKM | | | | | | KURANG BAIK |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

9. Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman

Perumahan yang layak menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan tabel, IKM layanan infrastruktur perumahan dan pemukiman adalah 82,44, dengan mutu pelayanan dalam kategori BAIK (B). Skor tertinggi terdapat pada unsur ketersediaan dengan nilai rata-rata 3,33, sedangkan unsur kesesuaian dan efektivitas pemanfaatan memiliki nilai sedikit lebih rendah, yaitu masing-masing 3,27 dan 3,29. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun layanan ini sudah baik, masih ada ruang untuk meningkatkan efektivitas dan kesesuaian kebutuhan masyarakat.

Persentase rumah layak huni pada tahun 2023 sebesar 54,90 persen. Masih rendahnya rumah layak huni yang tersedia disebabkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros yang kemudian mempengaruhi peningkatan luasan kawasan kumuh. Walaupun penyediaan rumah layak huni terus meningkat setiap tahunnya, namun hal tersebut tidak seimbang dengan kebutuhan rumah yang seharusnya tersedia. Selain pertumbuhan penduduk yang tinggi, besarnya anggaran yang harus disiapkan dalam rangka perbaikan kawasan kumuh juga menjadi kendala, sedangkan alokasi anggaran dari pusat untuk perbaikan kawasan kumuh memerlukan persyaratan yang tidak sedikit, sehingga perbaikan kawasan kumuh tidak dapat dituntaskan dalam jangka waktu yang singkat.



Tabel 2.29
Kualitas Layanan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Tahun 2024

| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-Rata | Nilai Intervensi Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Ketersediaan | 1.404 | 3,33 | 83,18 | B | BAIK |
| 2 | Kualitas | 1.382 | 3,29 | 82,26 | B | BAIK |
| 3 | Kesesuaian | 1.377 | 3,27 | 81,77 | B | BAIK |
| 4 | Efektivitas Pemanfaatan | 1.383 | 3,29 | 82,13 | B | BAIK |
| 5 | Kontribusi pada Perekonomian | 1.299 | 3,31 | 82,84 | B | BAIK |
| Total Nilai Rata-Rata | | | 16,49 | | B | |
| Nilai Indeks Pelayanan IKM | | | | 3,30 | | |
| | | | | | 81,92 | BAIK |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

10. Infrastruktur Persampahan

Pengelolaan sampah yang efektif sangat penting untuk menjaga lingkungan. Berdasarkan hasil survei, IKM layanan persampahan adalah 70,55, dengan mutu pelayanan masuk kategori KURANG BAIK (C). Skor tertinggi terdapat pada unsur ketersediaan dengan nilai rata-rata 2,94, sementara unsur kualitas dan efektivitas pemanfaatan masing-masing hanya mencapai 2,75 dan 2,81. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan besar pada sistem pengelolaan sampah untuk memenuhi harapan masyarakat.

Masih rendahnya kepuasan masyarakat terkait infrastruktur persampahan diakibatkan volume timbulan sampah di Kabupaten Maros meningkat pesat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta bertambahnya jumlah pemukiman di daerah perkotaan. Masih rendahnya pengelolaan timbulan sampah di Kabupaten Maros disebabkan peningkatan jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan penambahan fasilitas pengelolaan sampah. Selain itu areal TPA (10 Ha) memerlukan penambahan luas untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh penduduk yang mencapai 50.000 ton setiap tahunnya. Selain itu kondisi geografis yang berupa dataran tinggi juga merupakan kendala. Untuk kecamatan-kecamatan yang berada di dataran tinggi (pegunungan), seperti Kecamatan Mallawa, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana dan Kecamatan Tompobulu belum dapat terlayani untuk pengelolaan sampah di TPA.



Tabel 2.30
Kualitas Layanan Infrastruktur Persampahan Tahun 2024

| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-Rata | Nilai Intervensi Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Ketersediaan | 1.236 | 2,94 | 73,40 | C | KURANG BAIK |
| 2 | Kualitas | 1.152 | 2,75 | 68,74 | C | KURANG BAIK |
| 3 | Kesesuaian | 1.173 | 2,83 | 70,66 | C | KURANG BAIK |
| 4 | Efektivitas Pemanfaatan | 1.164 | 2,81 | 70,29 | C | KURANG BAIK |
| 5 | Kontribusi pada Perekonomian | 1.076 | 2,79 | 69,69 | C | KURANG BAIK |
| Total Nilai Rata-Rata | | | 14,11 | | | |
| Nilai Indeks Pelayanan | | | | 2,82 | | |
| IKM | | | | | 70,55 | KURANG BAIK |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

11. Infrastruktur Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah salah satu infrastruktur yang paling strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Berdasarkan hasil survei, IKM layanan infrastruktur telekomunikasi adalah 89,91, dengan mutu pelayanan dalam kategori SANGAT BAIK (A). Skor kinerja tertinggi terdapat pada unsur ketersediaan dengan nilai rata-rata 3,66, yang mencerminkan kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap layanan telekomunikasi yang tersedia. Namun, unsur kontribusi terhadap perekonomian memiliki skor lebih rendah, yaitu 3,51, yang menunjukkan bahwa peningkatan dampak ekonomi masih harus dioptimalkan.

Secara umum faktor pendorong kepuasan masyarakat cukup tinggi pada infrastruktur telekomunikasi disebabkan layanan telekomunikasi telah mencapai seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun yang disediakan oleh swasta.

Tabel 2.31
Kualitas Layanan Infrastruktur Telekomunikasi Tahun 2024

| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-Rata | Nilai Intervensi Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Ketersediaan | 1.535 | 3,66 | 01,59 | A | SANGAT BAIK |
| 2 | Kualitas | 1.510 | 3,60 | 89,88 | A | SANGAT BAIK |
| 3 | Kesesuaian | 1.506 | 3,60 | 90,07 | A | SANGAT BAIK |
| 4 | Efektivitas | 1.517 | 3,61 | 90,30 | A | SANGAT BAIK |



| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-Rata | Nilai Intervensi Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----|------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| | Pemanfaatan | | | | | |
| 5 | Kontribusi pada Perekonomian | 1.396 | 3,51 | 87,69 | B | SANGAT BAIK |
| | Total Nilai Rata-Rata | | 17,98 | | | |
| | Nilai Indeks Pelayanan | | | 3,60 | | |
| | IKM | | | | 89,91 | SANGAT BAIK |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

12. Infrastruktur Listrik

Listrik menjadi infrastruktur vital yang menunjang berbagai sektor kehidupan. Berdasarkan hasil survei, IKM layanan infrastruktur listrik adalah 90,77, dengan mutu pelayanan dalam kategori SANGAT BAIK (A). Semua unsur, termasuk ketersediaan, kualitas, dan efektivitas pemanfaatan, mendapatkan skor tinggi dengan rata-rata di atas 3,60, menunjukkan bahwa masyarakat merasa layanan listrik sangat memadai. Hal ini menjadi kekuatan utama yang perlu terus dipertahankan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Maros meningkat pesat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan 5 persen setiap tahunnya. Selain pertumbuhan yang semakin pesat, pemerintah Kabupaten Maros melalui kerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PLN, sejak tahun 2021 menysar area desa/dusun terpencil di Kabupaten Maros untuk pemasangan instalasi listrik baru. Selain jumlah pelanggan yang terus bertumbuh, jumlah daya listrik yang terpasang juga semakin meningkat. Konsumsi listrik perkapita sebesar 2.087,45 kWh kemudian meningkat hingga mencapai 2.969,19 kWh pada tahun 2021. Pada tahun 2023 konsumsi listrik perkapita menunjukkan penurunan hingga mencapai 2.100,54 kWh. Walaupun menunjukkan penurunan konsumsi, namun kapasitas listrik Kabupaten Maros masih dapat mencukupi kebutuhan listrik baik untuk industri, rumah tangga, dalam dan sektor lainnya selama kurang lebih beberapa tahun ke depan.

Tabel 2.32
Kualitas Layanan Infrastruktur Listrik Tahun 2024

| No | Sub Indikator | Total Nilai | Nilai Rata-Rata | Nilai Intervensi Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Ketersediaan | 1.574 | 3,68 | 92,08 | A | SANGAT BAIK |



| | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------|------|-------|-------|-------------|
| 2 | Kualitas | 1.525 | 3,62 | 90,66 | A | SANGAT BAIK |
| 3 | Kesesuaian | 1.534 | 3,64 | 91,09 | A | SANGAT BAIK |
| 4 | Efektivitas Pemanfaatan | 1.523 | 3,63 | 90,87 | A | SANGAT BAIK |
| 5 | Kontribusi pada Perekonomian | 1.428 | 3,57 | 89,25 | A | SANGAT BAIK |
| Total Nilai Rata-Rata | | 18,15 | | | | |
| Nilai Indeks Pelayanan | | | | 3,63 | | |
| IKM | | | | | 89,91 | SANGAT BAIK |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

MISI 6. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA

Maksud misi ke-6 adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan, baik pada wilayah perkotaan maupun perdesaan yang mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, daya tampung, serta mitigasi terhadap kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam. Misi 6 terdiri atas 2 (dua) tujuan, yaitu; (1) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan (2) Menurunkan Resiko bencana. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari tujuan 1 adalah Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan, sedangkan untuk Tujuan 2 sasaran yang ingin dicapai adalah Menurunnya Resiko Akibat Bencana.

1. Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan

Untuk mengukur penurunan pencemaran lingkungan maka digunakan 3 indikator, yaitu; (1) Indeks Kualitas Udara, (2) Indeks Kualitas Air, dan (3) Indeks Kualitas Tutupan lahan. Indeks Kualitas Udara (IKU) didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pemantauan kualitas air dilakukan di sungai-sungai yang melintasi kecamatan dalam satu kabupaten, Indeks tutupan lahan (IKTL) merupakan indeks yang menggambarkan kinerja pengelolaan tutupan lahan, termasuk di dalamnya aspek konservasi, rehabilitasi, dan karakteristik



wilayah secara spasial. IKTL dihitung berdasarkan tutupan vegetasi hutan, belukar, belukar, belukar rawa, RTH (Ruang Terbuka Hijau), dan hasil RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan).

Realisasi IKU Kabupaten Maros tahun 2024 sebesar 93,04 poin, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (88,74). Hal ini menunjukkan kualitas udara Kabupaten Maros semakin membaik. Realisasi IKU tersebut juga melewati target yang ditetapkan dalam RPJMD dan RPJMN. Capaian kinerja IKU pada tahun 2024 sebesar 105,97 persen dengan kategori kinerja SANGAT BAIK. Realisasi IKA Kabupaten Maros tahun 2024 sebesar 60,00 poin, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (53,64 poin). Hal ini menunjukkan kualitas air di Kabupaten Maros semakin membaik. Realisasi IKA pada Tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 50,60 poin dan RPJMN. Capaian kinerja IKA pada tahun 2024 sebesar 119,05 persen dengan kategori capaian kinerja SANGAT BAIK. Realisasi IKTL tahun 2024 sebesar 53,25 poin, menurun dibandingkan tahun sebelumnya (53,71 poin). Realisasi IKTL tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD dan RPJMN. Capaian kinerja IKTL tahun 2024 sebesar 99,53 persen dengan kategori capaian kinerja SANGAT BAIK.

Tabel 2.33
Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Maros Tahun 2024

| NO | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Target Nasional (RPJMN) |
|----|-------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|---------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Indeks Kualitas Udara | Nilai Indeks | 88,74 | 87,80 | 93,04 | 105,97 | 88,00 | 84,50 |
| 2 | Indeks Kualitas Air | Nilai Indeks | 53,64 | 50,40 | 60,00 | 119,05 | 50,60 | 55,50 |
| 3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Nilai Indeks | 53,71 | 53,5 | 53,25 | 99,53 | 55,30 | 65,50 |

Sumber : DPPKLH Kab. Maros, 2025

Faktor yang menjadi penyebab terjadi pencemaran udara di Kabupaten Maros adalah penggunaan bahan bakar dari transportasi, aktivitas



perindustrian, kondisi udara perkantoran, dan keadaan udara disekitaran permukiman. Sedangkan faktor yang mendorong sehingga pencemaran udara masih cukup relatif rendah adalah masih adanya areal hutan, keberadaan RTH, dan sepanjang jalan masih terdapat pepohonan, sehingga tingkat pencemaran udara masih dapat ditekan.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran air di Kabupaten Maros adalah limbah cair/padat dari domestik, industri dan pertanian. Pada tingkatan pencemaran sedang, tingkat pencemaran sungai dapat normal dengan sendirinya karena sifat air sungai yang mengalir.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kualitas tutupan lahan berkurang adalah kondisi luas wilayah, luas hutan, luas belukar dalam kawasan, luas belukar pada fungsi lindung, kebun raya, RTH (Ruang Terbuka Hijau), Taman Kehati, Tutupan Vegetasi Revelan Lainnya, RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN). Sedangkan faktor yang dapat mendukung pencapaian IKTL adalah pembukaan RTH yang menjadi prioritas pembangunan, dan adanya Perda Alih Fungsi Lahan.

2. Menurunnya Resiko Akibat Bencana

Ancaman menimbulkan bencana apabila manusia berada dalam kondisi rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi akibat-akibat yang ditimbulkan ancaman tersebut. Sebaliknya ancaman tidak menjadi bencana apabila manusia tidak dalam kondisi rentan dan mampu mengatasi akibat yang ditimbulkannya.

Realisasi indeks ancaman bencana tahun 2024 sebesar 16,30 poin, menurun dibandingkan tahun sebelumnya (16,40 poin). Realisasi tahun 2024 melampaui target RPJMD. Capaian indeks ancaman bencana tahun 2024 sebesar 107,31 persen, dengan kategori capaian SANGAT TINGGI. Indeks Kerugian adalah jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian bencana suatu daerah atau wilayah. Realisasi Indeks kerugian tahun 2024 sebesar 6,45 poin, menurun dibandingkan tahun 2023 (6,81 poin). Namun belum mencapai target RPJMD yaitu sebesar 6,30 poin. Hal ini menunjukkan kerugian yang di timbulkan akibat bencana pada tahun 2024 cukup besar. Capaian indeks kerugian tahun 2024 sebesar 97,67 persen dengan kategori capaian adalah SANGAT INGGI.



Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu. Realisasi indeks kapasitas tahun 2024 sebesar 0,28 poin, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (0,25 poin) dan berada dibawah target RPJMD tahun 2024 sebesar 0,70 poin. Capaian indeks kerugian tahun 2024 sebesar 40,00 persen, dengan kategori capaian RENDAH.

Tabel 2.34
Target, Realisasi dan Capaian Indeks Ancaman Bencana, Indeks Kerugian dan Indeks Kapasitas Kabupaten Maros Tahun 2024

| NO | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian 2023 | 2024 | | | Target Akhir RPJMD (2026) | Target Nasional (RPJMN) |
|----|------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|---------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | Indeks Ancaman Bencana | Nilai Indeks | 16,40 | 15,19 | 16,30 | 107,31 | 12,26 | - |
| 2 | Indeks Kerugian | Nilai Indeks | 6,81 | 6,30 | 6,45 | 97,67 | 5,60 | - |
| 3 | Indeks Kapasitas | Nilai Indeks | 0,25 | 0,70 | 0,28 | 40,00 | 0,77 | - |

Sumber : BNPB, 2025

Faktor-faktor yang menyebabkan indeks ancaman bencana Kabupaten Maros masih tinggi adalah cuaca ekstrim, pembukaan lahan di bagian hulu, serta pembangunan di hilir yang menyebabkan tidak ada pembuangan air. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi ancaman bencana di Kabupaten Maros adalah melakukan peran aktif untuk melakukan pencegahan bencana seperti pembentukan desa tangguh bencana dan sosialisasi pencegahan bencana kepada masyarakat.

Faktor yang menyebabkan Indeks Kerugian masih cukup tinggi adalah tingkat kerugian yang disebabkan oleh bencana tidak dapat diukur dan diperkirakan. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Maros telah mengalokasikan dana untuk melakukan perbaikan rumah, ataupun penggantian kerugian yang diperoleh masyarakat akibat kejadian bencana.

Capaian indeks kapasitas yang masih rendah disebabkan rekomendasi



BNPB terkait penguatan kapasitas kelembagaan bencana memerlukan waktu untuk penyelesaian dan anggaran yang cukup besar, namun telah dilakukan beberapa perbaikan terkait kelembagaan bencana daerah.

**B. PROGRAM DAN ANGGARAN PENDUKUNG****MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANANAN PUBLIK****1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap perangkat daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah perangkat daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 39 perangkat daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 20 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 1.250.580.405.389. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Program dan Anggaran Pendukung Misi 1 Sasaran 1

| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|--|-------------------|---|-------------------|--|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 1 | Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.130.248.940.810 | Semua PD |
| | 2 | Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 3.231.938.720 | Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |
| | 3 | Perekonomian dan Pembangunan | 2.648.722.000 | Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah |
| | 4 | Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota | 1.522.850.000 | Sekretariat DPRD |
| | 5 | Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 12.792.721.267 | Sekretariat DPRD |
| | 6 | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemabngunan Daerah | 1.358.473.950 | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |



| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|---------------|--|----------------|--|
| | 7 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 161.186.700 | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 8 Pengelolaan Keuangan Daerah | 79.303.064.820 | Badan Pengelola Keuangan Daerah |
| | 9 Pengelolaan Barang Milik Daerah | 6.695.647.711 | Badan Pengelola Keuangan Daerah |
| | 10 Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.072.117.800 | Badan Pendapatan Daerah |
| | 11 Kepegawaian Daerah | 1.096.511.400 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 12 Pengembangan Sumberdaya manusia | 640.544.900 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 13 Penelitian dan Pengembangan Daerah | 864.811.000 | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 14 Penyelenggaraan Pengawasan | 2.692.765.000 | Inspektorat Daerah |
| | 15 Perumusan kebijaksanaan, Pendampingan dan Asistensi | 109.454.000 | Inspektorat Daerah |
| | 16 Pengelolaan aplikasi Informatika | 6.020.689.751 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| | 17 Pengelolaan Arsip | 82.795.560 | Dinas Perpustakaan |



| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|---------------|--|------------|---|
| | | | dan Kearsipan Daerah |
| | 18 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 3.010.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | 19 Perizinan Penggunaan Arsip | 9.990.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | 20 Penyelenggaraan Statistik Sektor | 24.170.000 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2024

2. Terciptanya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Pencapaian sasaran terciptanya pelayanan publik yang berkualitas didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap perangkat daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah perangkat daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 21 perangkat daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 8 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 4.229.882.231 Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Program dan Anggaran Pendukung Misi 1 Sasaran 2

| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|---|--------------------------------------|-------------|---|
| Terciptanya Pelayanan Publik Yang Berkualitas | 1 Pendaftaran Penduduk | 421.835.593 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | 2 Pencacatan Sipil | 64.137.300 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | 3 Pengelolaan Informasi Administrasi | 213.948.300 | Dinas Administrasi Kependudukan |



| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|---------------|---|---------------|---|
| | kependudukan | | dan Catatan Sipil |
| | 4 Pengelolaan Profil Kependudukan | 3.087.500 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | 5 Pelayanan Penanaman Modal | 105.112.500 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Stau Pintu dan ketenagakerjaan |
| | 6 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 2.676.509.000 | Kecamatan |
| | 7 Pemenuhan Hak anak (PHA) | 669.517.038 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 8 Perlindungan Khusus anak | 75.735.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

MISI 2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas hidup masyarakat didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap perangkat daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah perangkat daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 8 perangkat daerah, dengan jumlah program pendukung



prioritas sebanyak 13 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 250.009.261.561 . Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Program dan Anggaran Pendukung Misi 2 Sasaran 1

| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|--|---|-----------------|---|
| Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | 1 Pengelolaan Pendidikan | 95.455.684.601 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 2 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 141.356.753.344 | Dinas Kesehatan |
| | 3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1.208.968.000 | |
| | 4 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | 362.226.000 | |
| | 5 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 238.230.000 | |
| | 6 Pengendalian Penduduk | 110.350.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 7 Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | 3.106.948.622 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |



| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|---------------|---|---------------|---|
| | 8 Pembinaan Perpustakaan | 2.328.144.194 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | 9 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 1.323.490.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | 10 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 567.400.000 | |
| | 11 Pengembangan Bahasa dan Sastra | 89.930.000 | |
| | 12 Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.072.117.800 | Badan Pendapatan Daerah |
| | 13 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 2.789.019.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Keagamaan

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap perangkat daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah perangkat daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 2 perangkat daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 4 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 4.346.505.183 . Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.38
Program dan Anggaran Pendukung Misi 2 Sasaran 2

| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|---|--|---------------|---|
| Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Keagamaan | 1 Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat | 3.231.938.720 | Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |
| | 2 Pengembangan Kebudayaan | 230.120.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 3 Pengembangan Kesenian Tradisional | 145.005.000 | |
| | 4 Pengelolaan Permuseuman | 739.441.463 | |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan Gender

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap perangkat daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah perangkat daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 1 perangkat daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 3 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 821.464.500. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Program dan Anggaran Pendukung Misi 2 Sasaran 3

| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|---|---|-------------|---|
| Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan Gender | 1 Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 346.195.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |



| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|---------------|---------------------------------|-------------|---|
| | 2 Perlindungan Perempuan | 382.259.500 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 3 Peningkatan Kualitas Keluarga | 93.010.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

**MISI 3. MENINGKATKAN KETERJANGKAUAN KEBUTUHAN DASAR DAN PELAYANAN DASAR SECARA INKLUSIF****1. Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Kebutuhan Konsumsi Masyarakat**

Pencapaian sasaran ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap perangkat daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah perangkat daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 2 perangkat daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 3 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 288.620.323. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Program dan Anggaran Pendukung Misi 2 Sasaran 3

| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|---|---|-----------------|---|
| Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Kebutuhan Konsumsi Masyarakat | 1 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 220.874.000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | 2 Pengawasan Keamanan Pangan | 16.390.000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | 3 Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | 51.356.323 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

2. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Masyarakat

Pencapaian sasaran standar pelayanan minimum masyarakat didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap perangkat daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah perangkat daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 6 perangkat daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 12 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 241.961.068.311. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.41
Program dan Anggaran Pendukung Misi 3 Sasaran 1

| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|---|---|-----------------|--|
| Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Masyarakat | 1 Pengelolaan Pendidikan | 95.455.684.601 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 2 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 141.356.753.344 | Dinas Kesehatan |
| | 3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1.208.968.000 | |
| | 4 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | 362.226.000 | |
| | 5 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 238.230.000 | |
| | 6 Pengembangan Perumahan | 384.340.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup |
| | 7 Penanggulangan Bencana | 489.393.742 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 8 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 80.918.550 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Kebakaran dan Penyelamatan |
| | 9 Pemberdayaan Sosial | 254.166.245 | Dinas Sosial |
| | 10 Rehabilitasi Sosial | 159.215.200 | |
| 11 Perlindungan Dan Jaminan | 1.665.174.979 | | |



| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|---------------|--------------|-------------|-------------|
| | Sosial | | |
| | 1 Penanganan | 305.997.650 | |
| | 2 Bencana | | |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

**MISI 4. MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL****1. Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Daerah Terhadap PDRB**

Pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap perangkat daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah perangkat daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 7 perangkat daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 25 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 27.705.596.137. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Program dan Anggaran Pendukung Misi 4 Sasaran 1

| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|
| Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah erhadap PDRB | 1 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 415.737.200 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | 2 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 2.625.707.213 | |
| | 3 Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 541.793.950 | |
| | 4 Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 453.280.000 | |
| | 5 Perizinan Usaha Pertanian | 2.138.000 | |
| Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah erhadap PDRB | 6 Pengelolaan Perikanan Tangkap | 3.978.093.078 | Dinas Perikanan |
| | 7 Pengelolaan Perikanan Budidaya | 5.194.895.756 | |
| | 8 Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1.128.394.717 | |



| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU | |
|---------------|---|---------------|--|----------------------------|
| | 9 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 1.766.140.520 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | |
| | 10 Pemasaran Pariwisata | 438.845.000 | | |
| | 11 Pengembangan Ekspor | 5.445.000 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | |
| | 12 Perencanaan Dan Pembangunan Industri | 972.342.257 | | |
| | 13 Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | 29.220.000 | | |
| | 14 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 268.472.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan | |
| | 15 Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | |
| | 16 Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | 0 | | |
| | 17 Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | 21.210.000 | | |
| | 18 Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | 64.402.000 | | |
| | 19 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | 649.511.646 | | |
| | 20 Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | 294.610.000 | | Dinas Pekerjaan Umum, tata |



| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|---|--|---------------|---|
| Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB | (Llaj) | | Ruang, Perhuungan dan Pertanahan |
| | 2 1 Pengelolaan Pelayaran | 0 | |
| | 2 2 Pengembangan Jasa Konstruksi | 12.150.000 | |
| | 2 3 Pengelolaan Persampahan | 8.365.593.620 | Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| | 2 4 Kawasan Permukiman | 371.400.230 | |
| | 2 5 Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | 17.700.000 | |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

2. Menurunnya Jumlah Pengangguran

Pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap perangkat daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah perangkat daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 1 perangkat daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 3 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 82.110.000 . Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Program dan Anggaran Pendukung Misi 4 Sasaran 2

| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|--------------------------------|--|------------|---|
| Menurunnya jumlah pengangguran | 1 Penempatan Tenaga Kerja | 50.350.000 | Dinas Penanaman Modal, pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan |
| | 2 Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 0 | |
| | 3 Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 31.760.000 | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

3. Terkendalnya Laju Inflasi

Pencapaian sasaran terkendalnya laju inflasi didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap perangkat daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah perangkat daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 4 perangkat daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 4 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 2.832.705.000. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Program dan Anggaran Pendukung Misi 4 Sasaran 3

| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|---------------------------|--|---------------|---|
| Terkendalnya laju inflasi | 1 Pengawasan Keamanan Pangan | 16.390.000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | 2 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | 25.773.000 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| | 3 Perekonomian Dan Pembangunan | 2.648.722.000 | Bagian Ekonomi, Sekretariat Daerah |
| | 4 Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | 141.820.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

4. Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin

Pencapaian sasaran menurunnya jumlah masyarakat miskin oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap perangkat daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah perangkat daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 10 perangkat daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 13 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 254.298.281.149. Rincian program dan



anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Program dan Anggaran Pendukung Misi 4 Sasaran 4

| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|-------------------------------------|---|-----------------|---|
| Menurunnya jumlah masyarakat miskin | 1 Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | 3.231.938.720 | Bagian Administrasi pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |
| | 2 Pengelolaan Pendidikan | 95.455.684.601 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 3 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 141.356.753.344 | Dinas Kesehatan |
| | 4 Pengembangan Perumahan | 384.340.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| | 5 Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 1.665.174.979 | Dinas Sosial |
| | 6 Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 669.517.038 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 8 Pendaftaran Penduduk | 421.835.593 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | 9 Pencatatan Sipil | 64.137.300 | |
| | 10 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat | 1.422.630.740 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |



| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|---------------|---|---------------|--------------------------------------|
| | Dan Masyarakat Hukum Adat | | |
| | 1 Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 453.280.000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | 1 Pengelolaan Perikanan Tangkap | 3.978.093.078 | Dinas Perikanan |
| | 2 Pengelolaan Perikanan Budidaya | 5.194.895.756 | |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

MISI 5. MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN PEMERATAAN WILAYAH

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap perangkat daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah perangkat daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 4 perangkat daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 13 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 131.409.237.638. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Program dan Anggaran Pendukung Misi 5 Sasaran 1

| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|--|--|----------------|---|
| Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat | 1 Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | 14.121.839.255 | Dinas Pekerjaan Umum, tata Ruang, Perhuungan dan Pertanahan |
| | 2 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 0 | Dinas Pekerjaan Umum, tata Ruang, Perhuungan dan |



| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|---------------|---|----------------|--|
| | 3 Penyelenggaraan Jalan | 93.197.565.570 | Pertanahan |
| | 4 Penyelenggaraan Penataan Ruang | 1.447.042.603 | |
| | 5 Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | 12.574.906.816 | |
| | 6 Pengelolaan Pelayaran | 0 | |
| | 7 Kawasan Permukiman | 371.400.230 | Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | 8 Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | 327.895.000 | |
| | 9 Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | 17.700.000 | |
| | 10 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 288.754.000 | Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik |
| | 11 Pengelolaan Aplikasi Informatika | 6.020.689.751 | |
| | 12 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 415.737.200 | |
| | 13 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 2.625.707.213 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

MISI 6. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA

1. Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan

Pencapaian sasaran menurunnya tingkat pencemaran lingkungan didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap perangkat



daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah perangkat daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 1 perangkat daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 7 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 8.657.809.602. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Program dan Anggaran Pendukung Misi 6 Sasaran 1

| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|--|---|---------------|---|
| Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan | 1 Perencanaan Lingkungan Hidup | 96.880.000 | Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
| | 2 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 116.337.250 | |
| | 3 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | 129.112.425 | |
| | 4 Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | 13.466.000 | |
| | 5 Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 16.340.000 | |
| | 6 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 5.798.000 | |
| | 7 Pengelolaan Persampahan | 8.279.875.927 | |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

3. Menurunnya Resiko Akibat Bencana

Pencapaian sasaran menurunnya resiko akibat bencana didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap perangkat daerah pengampu



sasaran tersebut. Jumlah perangkat daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 1 perangkat daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 1 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 2.512.202.900. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Program dan Anggaran Pendukung Misi 6 Sasaran 2

| SASARAN RPJMD | PROGRAM PD | ANGGARAN | PD PENGAMPU |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Menurunnya Resiko Akibat Bencana | 1 Penanggulangan Bencana | 489.393.742 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

C. KESIMPULAN

Pada tahun 2024 Kabupaten Maros telah melaksanakan 127 program dengan total anggaran sebesar Rp 1.027.674.855.401 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Maros Tahun 2021-2026. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 103,13 persen, dengan kategori capaian kinerja SANGAT BAIK.



a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Maros Tahun 2024

| No | Indikator | 2024 | | CAPAIAN | ANGGARAN |
|----|---|--------|-----------|---------|-------------------|
| | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Nilai SAKIP | 73,00 | 64,83 | 88,81 | 1.250.580.405.389 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,26 | 3,15 | 96,63 | 4.229.882.231 |
| 3 | Indeks Pendidikan | 64,24 | 64,36 | 100,19 | 250.009.261.561 |
| 4 | Indeks Kesehatan | 76,1 | 82,72 | 108,7 | |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keagamaan | 3,26 | 3,77 | 115,64 | 4.346.505.183 |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,05 | 4,34 | 93,32 | 82.110.000 |
| 7 | Indeks Pembangunan Gender | 90,31 | 89,5 | 99,1 | 821.464.500 |
| 8 | Inflasi | 3,47 | 1,74 | 199,43 | 2.832.705.000 |
| 9 | Indeks Harga Konsumen | 102,99 | 106,13 | 97,04 | 288.620.323 |
| 10 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Minimum Masyarakat | 3,26 | 3,07 | 94,17 | 241.961.068.311 |
| 11 | Persentase Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah | 6,24 | 2,28 | 36,54 | 35.810.859.528 |
| 12 | PDRB Per Kapita | 53,08 | 64,69 | 121,87 | |

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-------|-------|---------------|--------------------------|
| 13 | Angka kemiskinan | 7,99 | 9,32 | 85,73 | 254.298.281.149 |
| 14 | Indeks Kepuasan Masyarakat Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) | 3,26 | 3,14 | 96,32 | 131.409.237.638 |
| 15 | Indeks Kualitas Udara | 87,8 | 93,04 | 105,97 | 8.657.809.602 |
| 16 | Indeks Kualitas Air | 50,4 | 60 | 119,05 | |
| 17 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 53,5 | 53,25 | 99,53 | |
| 18 | Indeks Ancaman Bencana | 15,19 | 16,3 | 107,31 | |
| 19 | Indeks Kerugian | 6,3 | 6,45 | 97,67 | 489.393.742 |
| 20 | Indeks Kapasitas | 0,7 | 0,28 | 40 | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | | | | 100,15 | 2.185.817.604.157 |

Sumber : Bapperida Kab. Maros, 2025

**b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Pada tahun 2024 Kabupaten Maros telah melaksanakan 127 program dengan total anggaran sebesar Rp 1.027.674.855.401 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Maros Tahun 2021-2026. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 103,13 persen, dengan kategori capaian kinerja SANGAT BAIK. Secara Umum, besaran anggaran pada tahun 2024 berdasarkan sasaran tiap-tiap misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.50
Jumlah Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Sasaran Setiap Misi RPJMD

| No | Misi RPJMD | Sasaran RPJMD | Anggaran (Rp) |
|----|--|---|--------------------|
| 1 | Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik | 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 1.250.580.405.389. |
| | | 2 Terciptanya Pelayanan Publik Yang Berkualitas | 4.229.882.231 |
| 2 | Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia | 1 Meningkatkan Kualitas Hidup masyarakat | 250.009.261.561 |
| | | 2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Layanan Keagamaan | 4.346.505.183 |
| | | 3 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan Gender | 821.464.500 |
| 3 | Meningkatkan Keterjangkauan Kebutuhan Dasar dan Pelayana Dasar Secara Inklusif | 1 Meningkatkan Ketersediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Konsumsi Masyarakat | 288.620.323 |
| | | 2 Terpenihinya Standar Pelayanan Minimum Masyarakat | 241.961.068.311 |
| 4 | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal | 1 Meningkatkan Kontribusi Lapangan Usaha Daerah Terhadap PDRB | 27.705.596.137 |
| | | 2 Menurunnya Jumlah pengangguran | 82.110.000 |
| | | 3 Terkendalinya Laju Inflasi | 2.832.705.000 |
| | | 4 Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin | 254.298.281.149 |



| No | Misi RPJMD | Sasaran RPJMD | | Anggaran (Rp) |
|------------------------|--|---------------|--|--------------------------|
| 5 | Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Pemerataan Wilayah | 1 | Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat | 131.409.237.638 |
| 6 | Meningkatkan Kualitas Hidup dan Ketahanan Bencana | 1 | Menurunkan Tingkat Pencemaran Lingkungan | 8.657.809.602 |
| | | 1 | Menurunnya Resiko Akibat Bencana | 2.512.202.900 |
| JUMLAH ANGGARAN | | | | 1.027.674.855.401 |

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2025

c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 ataupun Tahun Terakhir adalah untuk mengetahui Realisasi Kinerja tahun bersangkutan dengan tahun - tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 2.51
Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2023 dan tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA (IMPACT) | | |
|----|--|----------------------------|--------------|--------------|
| | | TOLOK UKUR | CAPAIAN 2023 | CAPAIAN 2024 |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP | B | B |
| | Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | A | A |
| 2 | Meningkatnya kualitas hidup Masyarakat | Indeks Pendidikan | 64,26 | 64,36 |
| | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan keagamaan | Indeks Kesehatan | 76,07 | 82,72 |



| | | | | |
|---|--|---|--------|--------|
| | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan | A | A |
| 3 | Meningkatnya ketersediaan kebutuhan | Indeks harga konsumen | 113,35 | 106,13 |
| | Terpenuhinya standar pelayanan minimum | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar | B | B |
| 4 | Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB Pembangunan Desa | PDRB Perkapita | 64,69 | 64,69 |
| | Menurunnya jumlah pengangguran | Tingkat pengangguran terbuka | 3,64 | 4,34 |
| | Terkendalinya laju inflasi | Laju inflasi | 2,89 | 1,74 |
| | Menurunnya jumlah masyarakat miskin | Angka kemiskinan | 9,65 | 9,32 |
| 5 | Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat | Indeks kualitas layanan infrastruktur | B | 3,14 |
| 6 | Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan | Indeks kualitas Udara | 88,74 | 93,04 |
| | | Indeks kualitas Air | 53,64 | 60 |
| | | Indeks kualitas Lahan | 53,71 | 53,25 |
| 7 | Menurunnya resiko akibat bencana | Indeks Ancaman Bencana | 16,4 | 16,3 |
| | | Indeks Kerugian | 6,81 | 6,45 |
| | | Indeks kualitas kapasitas | 0,63 | 0,28 |



d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Periode terakhir dokumen RPJMD Kabupaten Maros, Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan Jangka menengah Daerah. Perbandingan antara Target RPJMD dengan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.52
Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dibandingkan dengan target RPJMD

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA (IMPACT) | | |
|----|--|---|--------------|--------------------|
| | | TOLOK UKUR | CAPAIAN 2024 | TARGET AKHIR RPJMD |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP | B | A |
| | Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | A | A |
| 2 | Meningkatnya kualitas hidup Masyarakat | Indeks Pendidikan | 64,26 | 65,97 |
| | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan keagamaan | Indeks Kesehatan | 76,07 | 76,45 |
| | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan | A | A |
| 3 | Meningkatnya ketersediaan kebutuhan | Indeks harga konsumen | 113,35 | 98,91 |
| | Terpenuhinya standar pelayanan minimum | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar | B | A |
| 4 | Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB Pembangunan Desa | PDRB Perkapita | 64,69 | 57,44 |
| | Menurunnya jumlah pengangguran | Tingkat pengangguran terbuka | 3,64 | 3,52 |
| | Terkendalinya laju inflasi | Laju inflasi | 2,89 | 3,00 |



| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA (IMPACT) | | |
|----|--|---------------------------------------|--------------|--------------------|
| | | TOLOK UKUR | CAPAIAN 2023 | TARGET AKHIR RPJMD |
| | Menurunnya jumlah masyarakat miskin | Angka kemiskinan | 9,65 | 7,64 |
| 5 | Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat | Indeks kualitas layanan infrastruktur | B | A |
| 6 | Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan | Indeks kualitas Udara | 88,74 | 88,00 |
| | | Indeks kualitas Air | 53,64 | 50,60 |
| | | Indeks kualitas Lahan | 53,71 | 55,30 |
| 7 | Menurunnya resiko akibat bencana | Indeks Ancaman Bencana | 16,4 | 12,26 |
| | | Indeks Kerugian | 6,81 | 5,60 |
| | | Indeks kualitas kapasitas | 0,63 | 0,77 |

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

a. Struktur Organisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, oleh Pemerintah Kabupaten Maros telah dilakukan penyesuaian dan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga pada tahun 2016 telah ditetapkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros dan Peraturan Bupati Maros tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Maros.

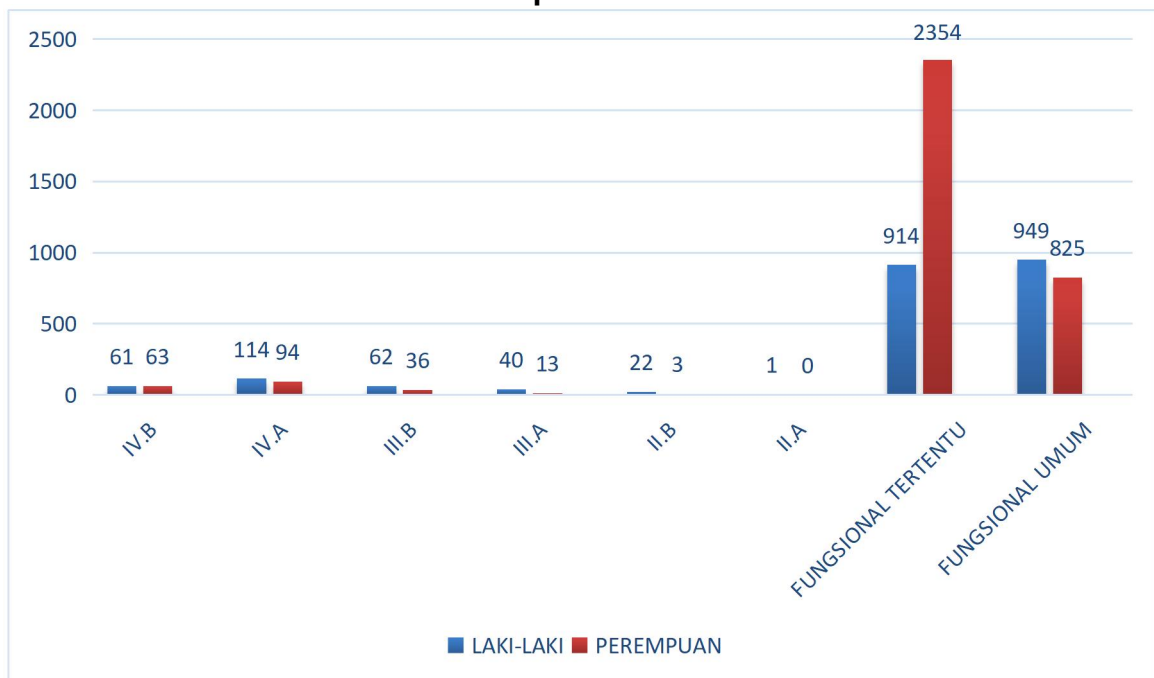
Fungsi aparatur negara/pemerintah dalam menjalankan pelayanan merupakan fungsi penunjang yang bersifat relatif. Fungsi ini ditujukan bagi terlaksananya tujuan negara dalam melayani warga negaranya melalui aparatur pemerintah. Pelayanan merupakan salah satu produk organisasi berupa jasa, sehingga pada dasarnya pelayanan



tidak kasat mata, diraba, dan dimiliki, melainkan hanya sebatas digunakan, dirasakan, dibeli, atau disewa. Sekalipun demikian, dalam kehidupan organisasi, fungsi pelayanan memiliki nilai strategis dibandingkan dengan fungsi organisasi lainnya. Ini karena fungsi pelayanan sangat berpotensi dalam menentukan kelanggengan, perkembangan dan keunggulan bersaing organisasi di masa yang akan datang. Jumlah ASN Negeri Sipil dan PPPK berdasarkan golongan dan pejabat Struktural/Fungsional Kabupaten Maros sebanyak 6.915 orang.

Jumlah ASN berdasarkan eselon Kabupaten Maros sebanyak 124 orang yang terdiri dari 1 Orang yang menduduki eselon II-A, 25 orang yang menduduki jabatan pada eselon II-B, 53 orang yang menduduki jabatan pada eselon III-A, 98 orang yang menduduki jabatan pada eselon III-B, 208 orang yang menduduki jabatan pada eselon IV-A serta 124 orang ASN yang menduduki jabatan pada eselon IV-B. adapun jumlah Pejabat Fungsional tertentu sebanyak 3.268 orang, sedangkan Pejabat Fungsional Umum sebanyak 1.774

Grafik 2.11
Jumlah ASN Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
Kabupaten Maros Tahun 2024



Sumber : BKPSDM Kab. Maros, 2025

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun



2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros memiliki 26 (Dua Puluh Enam) Satuan Kerja Perangkat Daerah, 14 (empat belas) Kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan serta 80 (delapan puluh) Desa.

Berdasarkan uraian jabatan dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diatas yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diurai sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe B;
3. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Dinas Terdiri Dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan merupakan dinas tipe A yang merupakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan dan Pertanahan;
 - 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan pemukiman pertanahan dan lingkungan hidup;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - 6) Dinas Sosial merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan bidang sosial;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 10) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- 11) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, UKM dan perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- 12) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (PTSPK) merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
- 13) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata, Pemuda dan olah raga;
- 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- 15) Dinas Perikanan merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- 16) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;



5. Badan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pembangunan;
 - 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - 3) Badan Pendapatan daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana ;
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerinatahn bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Balai Layanan Umum Daerah (BLUD), terdiri dari :
 - 1) RSUD Salewangang merupakan RSUD Tipe C

Disamping Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta Lembaga Penunjang Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros, terdapat pula 3 (tiga) kelompok jabatan Staf Ahli Bupati yakni :

- a. Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Sumber Daya Alam;

Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan Marusu dengan tipe A
2. Kecamatan Moncongloe dengan tipe A
3. Kecamatan Mandai dengan tipe A
4. Kecamatan Tanralili dengan tipe A

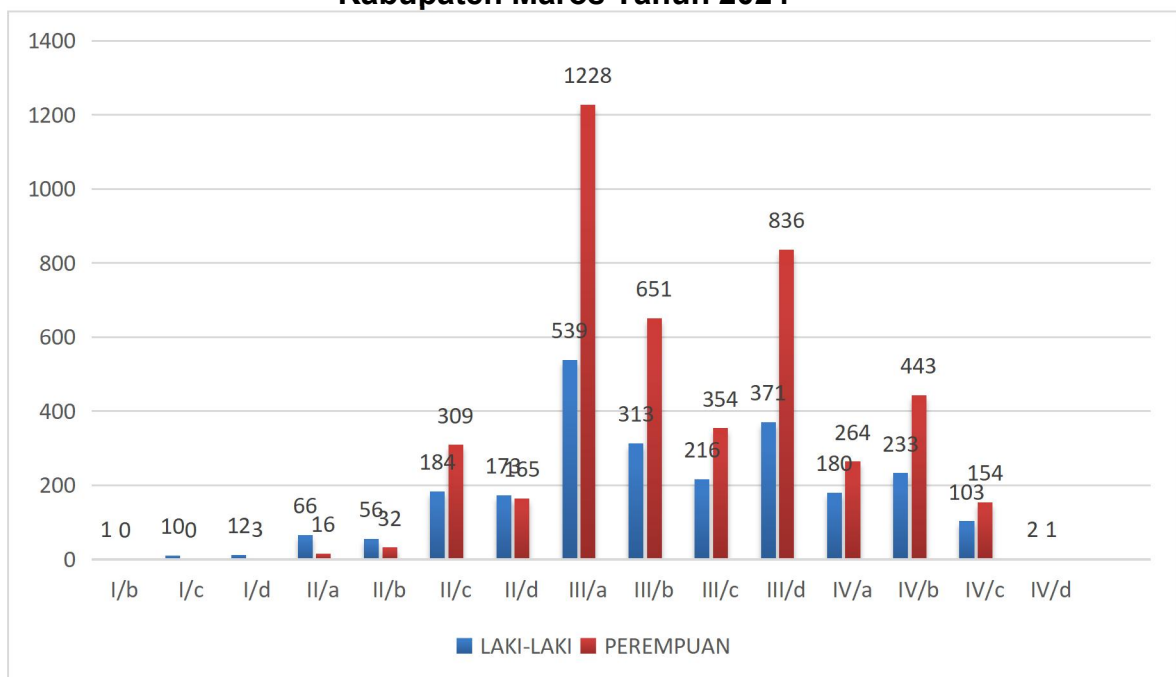


- 5. Kecamatan Tompobulu dengan tipe A
- 6. Kecamatan Turikale dengan tipe A
- 7. Kecamatan Maros Baru dengan tipe A
- 8. Kecamatan Lau dengan tipe A
- 9. Kecamatan Bontoa dengan tipe A
- 10. Kecamatan Bantimurung dengan tipe A
- 11. Kecamatan Simbang dengan tipe A
- 12. Kecamatan Cenrana dengan tipe A
- 13. Kecamatan Camba dengan tipe A
- 14. Kecamatan Mallawa dengan tipe A

2. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah ASN Negeri Sipil berdasarkan golongan dan pejabat Struktural/Fungsional Kabupaten Maros sebanyak 6.915 orang. Jumlah ASN berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin Kabupaten Maros paling besar terdapat pada golongan III/A dengan jumlah ASN sebanyak 1.767 orang, kemudian diikuti oleh golongan III/D dimana pada golongan tersebut terdapat 1.207 orang pegawai, kemudian golongan III/B dengan jumlah ASN sebanyak 964 orang. Secara lengkap jumlah ASN berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Grafik 2.12
Grafik Jumlah ASN
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin
Kabupaten Maros Tahun 2024





f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Secara umum Program/Kegiatan Pemerintah Kabupaten Maros menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Maros, namun demikian program/kegiatan tersebut akan selalu dilakukan Review apakah dalam tahun pelaksanaan terdapat program/ kegiatan yang harus segera dilaksanakan atau dihentikan yang dinilai berdasarkan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Maros.

| NO | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|--|
| Misi 1 | | |
| | Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | |
| | Tujuan : Menciptakan tata Kelola Pemerintahan yang professional, Bersinergi dan Berkinerja Tinggi | |
| 1 | | Seluruh Perangkat Daerah |
| Sasaran : Terciptanya Pelayanan Publik yang Berkualitas | | |
| 1 | | Sekretariat Daerah |
| 2 | | Dinas Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan |
| 3 | | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan |
| 4 | | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 5 | | Dinas Perikanan |
| 6 | | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga |
| 7 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 8 | | Seluruh Kecamatan |
| 9 | | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan |
| 10 | | Bappelitbangda |
| 11 | | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 12 | | Dispenda |
| 13 | | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan |



| NO | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|----------------------------|---|
| | | Lingkungan Hidup |
| 14 | | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Misi 2 | | |
| SASARAN: Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat | | |
| Tujuan : Menciptakan Kualitas SDM yang Mengedepankan Nilai-Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal | | |
| 1 | | Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesra) |
| 2 | | Inspektorat Kabupaten |
| 3 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga |
| 5 | | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 6 | | Seluruh SKPD/OPD |
| Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai Budaya Lokal | | |
| 1 | | Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesra) |
| 2 | | Inspektorat Kabupaten |
| 3 | | Badan Keuangan Daerah |
| 4 | | Dinas Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan |
| 5 | | Bappelitbangda |
| 6 | | Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah |
| 7 | | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 8 | | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan |
| 9 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 10 | | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 11 | | Dinas Kesehatan |
| 12 | | Dinas Administrasi Penduduk Dan Catatan Sipil |
| 13 | | RSUD La Palaloi |
| 14 | | Dinas Perpustakaan Dan Arsip |
| 15 | | Seluruh Kecamatan |
| 16 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Serta Gender dan Kepemudaan | | |



| NO | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---------------|--|---|
| | dalam Pembangunan | |
| 1 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | | Balitbangda |
| 3 | | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga |
| 4 | | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan |
| 5 | | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 6 | | Dinas Kesehatan |
| 7 | | RSUD Salewangang |
| 8 | | Dinas Sosial |
| 9 | | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar |
| 10 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| MISI 3 | | |
| | Sasaran : Terpenuhinya Nilai Tambah Ekonomi Berbasis Keunggulan Sumber Daya Ekonomi Daerah | |
| | Tujuan : Mengoptimalkan Penyelenggaraan urusan Wajib Pelayanan Dasar | |
| 1 | | Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesra) |
| 2 | | Bappeda |
| 3 | | Balitbangda |
| 4 | | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 5 | | Dinas Kesehatan |
| 6 | | Dinas Sosial |
| 7 | | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup |
| 8 | | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 9 | | Dinas Perpustakaan Dan Arsip |
| 10 | | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 11 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 12 | | Dan Keluarga Berencana |



| NO | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|----------------------------|---|
| 13 | | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| 14 | | Dinas Koperasi, UKM, Industri Dan Perdagangan |
| 15 | | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan |
| 16 | | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar |
| 17 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| MISI : 4 | | |
| SASARAN: Meningkatnya Investasi serta Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha bagi Masyarakat | | |
| Tujuan : Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Berbasis Keunggulan Sumber Daya Ekonomi Daerah | | |
| 1 | | Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan) |
| 2 | | Bappeda |
| 3 | | Balitbangda |
| 4 | | Badan Keuangan Daerah |
| 5 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 6 | | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan |
| 7 | | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup |
| 8 | | Dinas Koperasi, UKM, Industri Dan Perdagangan |
| 9 | | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 10 | | Dinas Perikanan |
| 11 | | Dinas Kesehatan |
| 12 | | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 13 | | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 14 | | Dinas Perpustakaan Dan Arsip |
| 15 | | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 16 | | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| 17 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian |



| NO | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---------------|--|---|
| | | Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 18 | | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan |
| 19 | | Seluruh Kecamatan |
| MISI 5 | | |
| | Sasaran : Meningkatkan Taraf Hidup Pelaku Ekonomi Kecil dan Menengah serta Masyarakat Kurang Mampu | |
| | Tujuan : Meningkatkan Dukungan Infrastruktur Ekonomi Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan | |
| 1 | | Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi) |
| 2 | | Bappeda |
| 3 | | Balitbangda |
| 4 | | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 5 | | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan |
| 6 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 7 | | Dinas Koperasi, UKM, Industri Dan Perdagangan |
| 8 | | Dinas Perikanan |
| 9 | | Dinas Sosial |
| 10 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 11 | | Bappeda |
| 12 | | Balitbangda |
| 13 | | Seluruh Kecamatan |
| | Sasaran: Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif di Perkotaan | |
| 1 | | Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi) |
| 2 | | Bappeda |
| 3 | | Balitbangda |



| NO | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|----------------------------|---|
| 4 | | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 5 | | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan |
| 6 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 7 | | Dinas Koperasi, UKM, Industri Dan Perdagangan |
| 8 | | Dinas Perikanan |
| 9 | | Dinas Sosial |
| 10 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 11 | | Bapelitbangda |
| MISI 6 | | |
| Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan untuk Kelestarian Lingkungan Hidup | | |
| Tujuan : Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup | | |
| 1 | | Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi); |
| 2 | | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup |
| 3 | | Badan Keuangan Daerah; |
| 4 | | Bappeda; |
| 5 | | Balitbangda; |
| 6 | | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan; |
| 7 | | Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa |
| 8 | | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar; |
| 9 | | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 10 | | Seluruh Kecamatan |
| Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana | | |
| 1 | | Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi); |



| NO | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|----------------------------|---|
| 2 | | BPBD; |
| 3 | | Dinas Sosial |
| 4 | | RSUD La Palalloi |
| 5 | | Bappelitbangda; |
| 6 | | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan; |
| 7 | | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar; |
| 8 | | Seluruh Kecamatan |

**Program Penunjang Pencapaian Sasaran
Kabupaten Tahun 2024**

Pelaksanaan program tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan kewenangan masing- masing. Dalam Pelaksanaan urusan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, adapun permasalahan tersebut berdasarkan urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

**Tabel Permasalahan dan Solusi
Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

| NO | URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|----------------------------|--|---|
| 1 | PENDIDIKAN | 1 Beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan belum tercapai; | 1 Penganggaran untuk mendukung fungsi pendidikan perlu ditingkatkan dalam rangka mengentaskan dan meningkatkan angka melek huruf serta untuk mendukung dan memberikan jaminan kepada anak-anak usia sekolah di Kabupaten Maros dapat bersekolah sampai pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi |
| | | 2 Angka kelulusan belum mencapai 100 % dari semua tingkatan; | 2 Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan Peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal |
| | | 3 Kapasitas SDM tenaga guru masih perlu ditingkatkan; | 3 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. |
| | | 4 Distribusi penempatan tenaga guru belum merata. | 4 Perlu adanya regulasi dan penataan penempatan guru se Kabupaten Maros |
| | | 5 Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai (Sekolah Dasar) | 5 Penyediaan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerataan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal diseluruh wilayah Kabupaten Maros. |
| | | 6 Tugas guru sebagai ASN yang wajib bekerja selama 37,5 jam per pekan belum terpenuhi | 6 Perlunya adanya regulasi dan penempatan jam-jam belajar untuk memaksimalkan waktu mengajar |



| NO | URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|----------------------------|---|--|
| 2 | KESEHATAN | 1 Beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan belum tercapai | 1 Penganggaran untuk mendukung program yang berkaitan dengan SPM dan Melakukan perhitungan SPM Kesehatan |
| | | 2 Masih kurangnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat; | 2 Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat dan Penciptaan budaya hidup bersih dan sehat dimasyarakat melalui upaya promotif dan preventif. |
| | | 3 Perbaikan gizi balita belum maksimal | 3 Peningkatan cakupan pelayanan gizi bagi ibudan anak |
| | | 4 Masih terdapat beberapa Puskesmas yang belum terakreditasi dan Puskesmas yang sudah terakreditasi perlu dilakukan Reakreditasi untuk mencapai penilaian yang semakin baik dari status Dasar, Madya, Utama dan Paripurna | 4 Mengusulkan dan Menganggaran akreditasi Puskesmas |
| | | 5 Sarana dan prasarana puskesmas harus memenuhi standar SPM | 5 Peningkatan ketersediaan sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan yang berkualitas. Peningkatan ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan. |
| | | 6 Masih terdapat angka kematian bayi baru lahir | 6 Pemetaan wilayah setempat dan pendampingan tenaga kesehatan (bidan) tentang K1 |
| | | 7 Masih terdapat angka kematian ibu pasca melahirkan | 7 Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran Stimulasi makanan tambahan pada Ibu Hamil |
| | | 8 Belum maksimalnya pelaksanaan program pencegahan tumbuh kerdil | 8 Optimalisasi pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk |
| | | 9 Ketersediaan tenaga kesehatan masih kurang. | 9 Penambahan dan distribusi SDM kesehatan sesuai dengan Abk dan ANJAB. |
| 3 | PEKERJAAN UMUM, PENATAAN | 1 Tingkat kerusakan sarana prasarana jalan, jembatan dan irigasi masih Tinggi | 1 Untuk lebih mengoptimalkan Program kegiatan untuk mendukung peningkatan perbaikan dan |



| NO | URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|--|--|---|
| | RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | <p>2 Sarana dan prasarana termasuk bangunan belum memperhatikan hak dan kemudahan bagi penyandang disabilitas dan kaum rentang</p> <p>3 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib</p> <p>4 Banyaknya area hutan produksi yang beralih fungsi menjadi permukiman yang dikelola oleh masyarakat;</p> <p>5 Banyaknya pemanfaatan area sempadan sungai, jalan dan area pantai yang tidak sesuai</p> <p>6 Ketersediaan sumber air bersih pada kawasan pesisir masih sangat kurang;</p> <p>7 Masih tingginya RT yang tidak memenuhi sanitasi yang layak;</p> <p>8 Produk tata ruang yang telah disusun belum disadari sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum;</p> <p>9 Banyaknya sarana prasarana air bersih yang sudah terbangun tetapi dalam kondisi yang rusak;</p> | <p>pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana</p> <p>Perlunya sosialisasi Produk tata ruang sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum</p> <p>Perlunya sosialisasi tentang pemahaman pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur</p> <p>Untuk menerbitkan Perbup tentang alih fungsi lahan dan pemanfaatan area sempadan sungai, jalan dan area pantai</p> |



| NO | URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|--|---|---|
| 4 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 1 Pengelolaan perumahan yang layak huni belum maksimal, khususnya di kawasan pesisir; | 1 Untuk lebih mengoptimalkan Program kegiatan untuk mendukung peningkatan perbaikan dalam bidang perumahan sebagai wujud mencapai target 100 % rumah yang pengguna air bersih, 0 % kawasan kumuh, dan 100 % rumah tangga bersanitasi Peningkatan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang pada seluruh Kawasan Strategis (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan. |
| | | 2 Sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai; | |
| | | 3 Jumlah RT yang tidak memenuhi sanitasi yang layak masih tinggi; | |
| | | 4 Penanganan terhadap kejadian bencana belum sepenuhnya berjalan optimal. | |
| 5 | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1 Ketentraman masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi; | 1 Mengoptimalkan program kegiatan mengenai ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Peningkatan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik, serta memberdayakan modal sosial masyarakat kota yang berbasis TIK |
| | | 2 Belum optimalnya penerapan perda; | 2 Mensosialisasikan penerapan PERDA Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati secara terpadu |
| 6 | SOSIAL | 1 Angka kemiskinan masih tinggi; | 1 Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha Peningkatan pelaksanaan dan peningkatan keterpaduan program/kegiatan pengentasan kemiskinan baik prespektif gender Peningkatan akses dan penerimaan manfaat bagi penduduk miskin perempuan dan laki-laki terhadap pelayanan dasar, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta kesempatan kerja |



| NO | URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|----------------------------|--|---|
| | | | <p>Peningkatan Peluang Kerja dan Berusahabagi penduduk kurang mampu</p> <p>Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu</p> |
| | | <p>2 Tingkat pengangguran terbukamasih terbilang cukup tinggi;</p> | <p>2 Penumbuhan wirausaha muda</p> <p>Peningkatan kerjasama lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pemberi kerja</p> <p>2 Perluasan kesempatan kerja melalui Penciptaan lapangan kerja dan budayamasyarakat bekerja</p> <p>Peningkatkan pelatihan berbasis kompetensi</p> |
| | | <p>3 Penyandang masalah kesejahteraan sosial masihtinggi;</p> | <p>3 Perlu ada program/kegiatan yang difokuskan kepada pembinaan dan pengembangan kompetensi seperti pelatihan kerja.</p> <p>Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi keluarga kurang mampu</p> <p>Peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu</p> |
| | | <p>4 Bencana banjir masih sering melanda pada wilayah-wilayah tertentu;</p> | <p>4 Perlunya sosialisasi tentang menjagalingkungan.</p> |
| 7 | TENAGA KERJA | <p>1 Angka pengangguran masihrelatif tinggi.</p> | <p>1 Menekan angka pengangguran dengan menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Dan Meningkatkan investasi daerah dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta</p> |
| | | <p>2 Sumberdaya manusia tenaga kerja masih rendah dan belum berdaya saing.</p> | <p>2 Melaksanakan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diarahkan sesuai kebutuhanberdasarkan standar kompetensi perusahaan, yang didukung dengan sertifikasi profesi, pemagangan, pelayanan penempatan, peningkatan produktifitas tenaga kerja. Dan Meningkatkan program perluasan kesempatan kerja yang diarahkan untuk kegiatan kewirausahaan</p> |



| NO | URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|--|---|---|
| 8 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1 Masih adanya kejadian kasus kekerasan dalam rumah | 1 Penguatan lembaga perlindungan anak. |
| | | 2 Anak jalanan, anak terlantar, anak korban narkoba dan anak putus sekolah masih ada. | 2 Sosialisasi kepada masyarakat dan generasi muda tentang Narkoba Membuat Pelatihan/keterampilan anak putus sekolah. |
| 9 | PANGAN | 1 Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal | 1 Melakukan sosialisasi Diversifikasi produk pangan lokal |
| | | 2 Menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal | 2 Mengembangkan diversifikasi produk pangan olahan |
| 10 | PERTANAHAN | 1 Penetapan batas wilayah kecamatan belum akurat; | 1 Melakukan pengukuran batas wilayah Menetapkan batas wilayah kecamatan lewat PERBUP |
| 11 | LINGKUNGAN HIDUP | 1 Meningkatnya dampak emis gas rumah kaca; | 1 Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait untuk bersama-sama melakukan pembinaan teknis dalam pengelolaan lingkungan Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati |
| | | 2 Menurunnya ketersediaan dan kualitas sumber air baku; | |
| | | 3 Meningkatnya pencemaran dan pengrusakan lingkungan; | 2 Pengawasan bagi industri/usaha di Kabupaten Maros. Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial |



| NO | URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|---|---|---|
| | | 4 Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan/berkelanjutan; | 3 Sosialisasi menyeluruh terhadap budaya hidup bersih dimasyarakat lebih ditingkatkan. Peningkatan peran serta sekolah, ormas/lembaga, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R secara berkala |
| 12 | ADMINISTRASI KEPENDUDUK ANDAN PENCATATAN SIPIL | 1 Masih adanya masyarakat yang belum memahami pentingnya kepemilikan KTP | 1 Menyusun data kependudukan dengan melibatkan pemerintah ditingkat bawah (kelurahan dan desa). |
| | | 2 Layanan administrasi kependudukan masih belum berjalan secara efisien dan efektif; | 2 System penataan administrasi kependudukan ditingkat kelurahan dan desa agar setiap hari lebih up date. |
| | | 3 Ketersediaan sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan belum maksimal | 3 Penambahan sarana dan prasarana kependudukan |
| 13 | PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA | 1 Masih rendahnya realisasi pelaksanaan program kegiatan Dana Desa. | 1 Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terhadap pemerintah desa tentang pelaksanaan penyusunan perencanaan Melaksanakan Evaluasi dan pemantapan penggunaan aplikasi keuangan Desa Pembinaan terhadap peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa |
| | | 2 Perlunya dilakukan evaluasi atas pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan. | 2 Monitoring dan Evaluasi pengeluaran ADD. |
| | | 3 Belum optimalnya perhatian dan pembinaan terhadap masyarakat desa khususnya masyarakat miskin, marginal dan terpinggirkan. | 3 Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa Melakukan pembinaan masyarakat desa khususnya masyarakat miskin Membentuk Labsite Desa Peningkatan alokasi dana desa dalam APBD sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku Melakukan pelatihan Keterampilan dan membentuk Pos pelayanan |



| NO | URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH | PERMASALAHAN | SOLUSI | | |
|----|--|--------------|--|---|--|
| | | | Teknologi tepat guna Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan | | |
| 14 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1 | Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi akseptor KB; | 1 | Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keluarga berencana Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri |
| | | 2 | Laju pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi; | 2 | Program pemberdayaan keluarga sejaterelebih ditingkatkan. Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten/Kota sekitar untuk pengendalian terhadap dampak negatif dari pertumbuhan penduduk Pengendalian angka Total Fertility Rate (TFR) |
| | | 3 | Masih rendahnya tingkat kapasitas tenaga penyuluh KB; | 3 | Pelatihan kompetensi untuk tenaga penyuluh dan |
| | | 4 | Masih kurangnya sarana prasarana layanan KB. | | Menambah jumlah sarana dan prasarana UPTD KB. |
| 15 | PERHUBUNGAN | 1 | Layanan transportasi angkutan umum belum memberikan jaminan | 1 | Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah Pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan umum (KIR) sesuai ketentuan |
| | | 2 | Terminal angkutan umum belum berfungsi dengan baik. | | |
| | | 3 | Masih rendahnya kedisiplinan masyarakat sebagai pengguna jalan | | |
| | | 4 | Masih rendahnya ketersediaan rambu-rambu lalu lintas | | |
| 16 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 | Implementasi e-government dan pelayanan telekomunikasi belum optimal. | 1 | Peningkatan prasarana dan sarana jaringan IT pada instansi, tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan sekolah-sekolah didukung kompetensi sumber daya manusia di |



| NO | URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|--|--|--|
| | | 2 Infrastruktur sarana dan prasarana data centre harus senantiasa terpelihara. | bidangteknisi IT |
| | | 3 Sarana dan prasarana TIK belum tersedia | |
| | | 4 Pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi belum tersedia | Penyediaan infrastruktur Pengendalian keamanan data dan informasi (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) Program pemeliharaan infrastruktur lebih ditingkatkan Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan publik secara integratif, aman, mudah, murah, dan |
| | | 5 Belum tersedianya jaringan sistem kebencanaan yang terintegrasi | 2 |
| 17 | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 1 Belum tersedianya data pelaku UMKM yang akurat; | 1 Melakukan pencatatan data pelaku UMKM yang sudah terlegalitas (memiliki izin) |
| | | 2 Tingkat kapasitas SDM pelaku UMKM masih rendah | 2 Menyelenggarakan program pelatihan kompetensi SDM Pelaku Koperasi dan UMKM Peningkatan Kualitas SDM Usahamikro dalam usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna |
| | | 3 Masih tingginya koperasi yang tidak aktif | 3 Memfasilitasi kemitraan koperasi dengan perusahaan swasta dan Perbankan. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berkoperasi Peningkatan Pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi Peningkatan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha |
| 18 | PENANAMAN MODAL | 1 Pelayanan investasi masih belum optimal | 1 Meningkatkan informasi penanaman modal yang berbasis Informasi Teknologi dalam mendukung iklim investasi di daerah. Melakukan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan Melakukan Pelayanan Perizinan keliling di 14 Kecamatan |
| | | 2 Pelayanan perijinan berinvestasi belum efektif | |



| NO | URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|---------------------------------|--|---|
| 19 | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 1 Masih terbatas sarana dan prasarana olahraga; | 1 Meningkatkan anggaran pembangunan sarana olahraga. |
| | | 2 Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan masih relatif rendah; | 2 Menggalakkan olahraga di masyarakat dengan penyelenggaraan perlombaan olahraga. |
| | | 3 Pembinaan terhadap peningkatan prestasi olahraga masih kurang | 3 Meningkatkan pembinaan cabang olahraga dengan memberikan insentif bagi cabang olahraga dan atlet. |
| 20 | STATISTIK | 1 Profil daerah yang berkualitas harus senantiasa tersedia | 1 Menyediakan profil daerah yang mudah diakses (pada website daerah) |
| | | 2 Ketersediaan Kabupaten dalam angka dan PDRB harus tepat waktu | 2 Merekrut tenaga dalam pengambilan data untuk penyusunan data Kabupaten Data Membuat jejaring ke instansi untuk mengirimkan data yang dibutuhkan |
| 21 | PERSANDIAN | 1 Jaringan komunikasi persandian belum tersedia | 1 Membuat Jaringan komunikasi persandian |
| | | 2 Belum terdatanya aplikasi OPD secara menyeluruh | 2 Mendata aplikasi OPD secara menyeluruh |
| 22 | PERPUSTAKAAN | 1 Masih rendahnya minat baca masyarakat. | 1 Melakukan sosialisasi Pemasyarakatan literasi Kepada masyarakat dan sekolah tentang Penting Membaca Road Show Gerakan gemar membaca Bagi pelajar |
| | | 2 Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan masih terbatas | 2 Menyediakan sarana dan prasarana penunjang perpustakaan |
| | | 3 Regulasi tentang Perpustakaan belum berjalan secara maksimal | 3 Mengusulkan Regulasi keperpustakaan Membuat peraturan Bupati tentang Perpustakaan |
| 23 | KEARSIPAN | 1 Belum memadainya SDM tentang kearsipan;. | 1 Perlu penambahan petugas arsip daerah dan peningkatan kompetensinya dalam mengelola arsip. |
| | | 2 Sarana prasarana kearsipan masih terbatas | 2 Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kearsipan |



| NO | URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|----------------------------|--|--|
| | | 3 Regulasi tentang kearsipan belum berjalan secara maksimal | 3 Mengusulkan Regulasi kearsipan Membuat peraturan Bupati tentang Kearsipan |
| 24 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 Masih tingginya tingkat kerusakan hutan mangrove. | 1 Sosialisasi sangat dibutuhkan kepada masyarakat dan perlu ditingkatkan intensitasnya agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami penting Hutan mangrove |
| | | 2 Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok- kelompok petani pembudidaya dan nelayan. | 2 Pembinaan Kelompok petani Pembudidayaan nelayan Peningkatan kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan. |
| | | 3 Masih rendahnya pendapatan petani. | 3 Bantuan dana dari pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan Bantuan Pemasaran untuk hasil olah ikan. Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan |
| | | 4 Sarana prasarana jalan produksi masih belum optimal | 4 Menyediakan sarana dan prasarana jalan produksi |
| 25 | KEBUDAYAAN | 1 Nilai – nilai budaya yang ada dalam masyarakat harus senantiasa dijaga dan dilestraiikan. | 1 Perlunya meningkatkan pembinaan dengan sasaran pelaku seni generasi muda melalui berbagai ajang festival seni budaya daerah maupun pengiriman kontingen atau duta seni budaya ke luar daerah untuk menambah wawasan dan kreatifitas serta promosi seni budaya ke luar daerah. |
| | | 2 Ketersediaan dan SDM pelaku budaya masih sangat terbatas | |
| 26 | PARIWISATA | 1 Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata | 1 Perlu adanya dukungan penambahan event/kegiatan pariwisata |
| | | 2 Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan tempat-tempat wisata belum maksimal | 2 Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat baik itu pelatihan/kursus bahasa, pembuatan produk dan kursus pendukung lainnya |
| | | 3 Pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata belum optimal | 3 Lebih meningkatkan promosi wisata baik ditingkat nasional maupun manca negara. |



| NO | URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|----------------------------|---|---|
| 27 | PERTANIAN | 1 Berkurangnya lahan / areal persawahan akibat alih fungsilahan | 1 Perlu dibuat regulasi Peraturan daerah tentang penguatan lahan pertanian dalam rangka mengatasi alih fungsi lahan akibat perkembangan kota maros. dan Cetak sawah baru |
| | | 2 Kontribusi sektor pertanian terhadap | 2 Perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan produksi padi dengan melakukan penerapan |
| | | 3 Wabah antraks masih sering terjadi; | 3 Sosialisasi pencegahan wabah antraks |
| | | 4 Produksi dan produktivitas perkebunan masih rendah | 4 Pemenuhan sarana prasarana infrastruktur pertanian Pembinaan, pemberdayaan dan pendampingan bagi kelompok tani |
| 28 | PERDAGANGAN | 1 Adanya perdagangan bebas yang menjadi tantangan bagi daerah; | 1 Sosialisasi kepada pelaku usaha perdagangan tentang perdagangan bebas dan Bimbingan teknis tentang Daya Saing Pemanfaatan Inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam peningkatan produksi dan pemasaran produk usaha |
| | | 2 Sarana prasarana pasar tradisional belum memadai; | 2 Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional |
| | | 3 Sarana prasarana pasar harus selalu terpelihara dan dalam kondisi yang Baik | 3 Memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang pemeliharaan sarana dan prasarana kepada pedagang pasar serta anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ditingkatkan |
| 29 | PERINDUSTRIAN | 1 Terbatasnya lahan bagi industri berskala menengah dan besar; | 1 Membuat regulasi Pengembangan Sentra Industri sebagai cikal bakal kawasan industri Maros yang terintegrasi dengan sumber bahan baku lokal dan pemasaran produksi hasil industri |



| NO | URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|----------------------------|---|---|
| | | 2 Industri- industri potensial harus senantiasa dikembangkan | 2 Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Produktivitas Pelaku sektor industri kreatif. Pengembangan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat Peningkatan Kualitas SDM Usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna |
| | | 3 Belum terpromosinya industri-industri kecil; | 3 Melakukan promosi hasil produksi masyarakat pelaku IKM (Industri kecil menengah) Pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan. Membangun Show Room Untuk Hasil Olahan Masyarakat Pelaku IKM |
| 30 | TRANSMIGRASI | 1 Animo masyarakat untuk bertransmigrasi lokal relatif rendah dan ketidakpastian transmigrasi; | 1 Menyelenggarakan Bimbingan dan fasilitas serta sosialisasi ketransmigrasian |
| | | 2 Semakin rendahnya transmigrasi umum dan transmigrasi swakarya Mandiri | |
| 32 | KEPEGAWAIAN | 1 Belum optimalnya kompetensi ASN yang sesuai dengan unit kerja Perangkat Daerah; | 1 Peninjauan kembali terhadap kesesuaian lembaga/struktur OPD dengan tugas pokok dan fungsinya. Uji Kompetensi Jabatan struktural dan Fungsional Administrasi Mutasi ASN Peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan, pelatihan, uji kompetensi, pemberian reward, dan penerapan punishment. |
| | | 2 Masih belum optimalnya pembinaan disiplin dan terdapat ASN yang tidak disiplin di setiap unit kerja; | 2 Penanganan kasus- kasus pelanggaran disiplin dan kode etik ASN Penegakan Disiplin Aparatur |



| NO | URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|----------------------------|---|---|
| | | 3 Jumlah ASN yang lebih besar daripada beban kerja yang terdapat pada setiap unit kerja utamanya yang berposisi sebagai tenaga administrator dan pengarsipan, sedangkan disisi lain ASN yang berposisi pada jabatan fungsional terutama tenaga pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan dan tenaga fungsional tertentu belum mencukupi untuk memenuhi beban kerja yang ada. | 3 Penyusunan Dokumen Analisi Beban Kerja Perekrutan/penerimaan CPNS dan P3K untuk jabatan fungsional Peningkatan kualitas, ketersediaan, dan pemanfaatan Data dan Informasi yang terpilah sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan Daerah. |
| 33 | PERENCANAAN | 1 Integrasi perencanaan dan penganggaran yang belum optimal; | 1 Pemanfaatan Teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran |
| | | 2 Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal, disebabkan kurangnya kapasitas SDM perencana; | 2 Peningkatan kapasitas tenaga perencana, baik di Bappeda maupun yang ada di masing-masing OPD melalui Diklat/Bimtek perencanaan |
| | | 3 Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah | 3 Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan lainnya |
| | | 4 Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat | |



| NO | URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|----------------------------|--|--|
| | | 5 Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas | 4 Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah |
| 34 | KEUANGAN | 1 Belum optimalnya pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terlihat dari persentase besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD pada tahun sebelumnya | 1 Mempersingkat Regulasi Pemungutan pajak Membuat Peraturan Tentang Mekanisme pajak BPHTB Pencatatan kembali Pajak Per-Tahun Melakukan Monitoring dan Evaluasi Melakukan sosialisasi Pajak |
| | | 2 Kurangnya penerapan standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah | 2 Dibuatkan aplikasi pelayanan pemungutan pajak (secara Online) Dibuatkan SOP standar pelayanan |
| | | 3 Belum optimalnya kualitas manajemen keuangan dan aset daerah berbasis acrual | 3 Memberikan pelatihan kompetensi tentang manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis acrual |



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran Kementrian/Lembaga yang dialokasikan untuk Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN.

1. Dasar hukum Penyelenggaraan tugas Pembantuan

Dasar hukum atau peraturan yang digunakan secara umum dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan tugas pembantuan adalah :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional;
3. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah; dan



6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Maros

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atau Desa termasuk masyarakatnya dalam rangka mendukung kebijakan nasional, provinsi ataupun kebijakan pemerintah kabupaten dengan pendekatan efisiensi, yaitu dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran-anggaran dalam bentuk dana tugas pembantuan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Pemerintah Kabupaten Maros pada Tahun 2024 melakukan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian ataupun Pemerintah Provinsi yang hanya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

3. Capaian kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Maros menerima anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam rangka penguatan perekonomian dalam sektor pembangunan sarana dan prasarana Pertanian.

3.1.1. Target Kinerja

- a) Terselenggaranya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang dialokasikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000;
- b) Terselenggaranya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perpompaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.594.400.000;



3.1.2. Realisasi

- a) Realisasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang dialokasikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.050.000.000 atau terealisasi 100%;
- b) Realisasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perpompaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.594.400.000 terealisasi sebesar 2.594.400.000 atau terealisasi 100%;

3.1. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros Tahun 2024

| NO | KEMENTERIAN | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----|
| 1 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | | | | |
| | Kementerian Pertanian | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 100 |

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros Tahun 2024

| NO | KEMENTERIAN | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|----|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----|
| 1 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | | | | |
| | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | Irigasi Perpompaan | 2.594.400.000 | 2.594.400.000 | 100 |

**a. Permasalahan dan Kendala**

Tugas pembantuan pada hakekatnya merupakan tugas untuk membantu menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap penerapan kebijakan yang bersifat operasional. Oleh karena itu, berbagai petunjuk pelaksanaan harus

dipersiapkan oleh pihak yang menugaskan. Agar pelaksanaan tugas pembantuan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu disusun rencana tindakan (*action plan*) yang dijadikan pedoman dan petunjuk bagi Pemerintah Daerah dalam proses pelaksanaannya. Permasalahan kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari masalah yang ditunjukkan di lapangan. Diantaranya masih belum optimalnya: aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun manajemen pemerintah.

Hambatan / Permasalahan Tugas pembantuan di Kabupaten Maros menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan pada tahun yang akan datang. Berikut hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2024 serta upaya penyelesaian atas permasalahan tersebut:

Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

| No | Program/Kegiatan | Permasalahan | Upaya Penyelesaian |
|----|---|---|--|
| 1 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Masih ada beberapa kelompok tani yg kurang paham terkait pekerjaan pembangunan Irigasi perpompaan | Perlunya Bimbingan teknis untuk para kelompok tani penerima manfaat |
| | | Penyelesaian Administrasi oleh kelompok tani yg lambat | Perlunya keterlibatan seluruh anggota kelompok untuk membantu menyelesaikan administrasi |



b. Saran dan Tindak Lanjut

Diharapkan untuk tahun 2024 ini, pemerintah melalui Kementerian tetap menganggarkan ataupun menyalurkan anggaran tugas pembantuan sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu hal yang bisa mendorong dan membantu daerah-daerah untuk dapat meningkatkan seluruh aspek yang berdampak baik kepada Masyarakat.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pencapaian dan penerapan SPM yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pusat masing-masing bidang SPM dan diharapkan setiap Perangkat Daerah dapat mengintegrasikan program kegiatan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya. Kegiatan ini sangat penting karena indikator-indikator yang terdapat pada setiap bidang SPM merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

Pencapaian ini juga memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia sesuai amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta secara teknis dijelaskan secara rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Di bawah ini akan diuraikan kompilasi masing-masing bidang SPM yang terdiri atas kriteria indikator yang belum, sudah memenuhi dan melampaui dari target nasional yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisa dalam pengumpulan data dan informasi sesuai dengan indikator bidang masing masing SPM. Hasil analisis untuk kriteria setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM dan setiap indikator sebagai berikut :

A. Bidang Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 dalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan



2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.1
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan | Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan | (%) |
|----|---------------------------|---|--|--|-------|
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD | 14.764 | 14.215 | 96,28 |
| 2 | Pendidikan Dasar | Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) | 67.465 | 67.465 | 100 |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan | 273 | 273 | 100 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2025

3. Anggaran

Alokasi Anggaran untuk pemenuhan SPM urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.4.2
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran | Realisasi | % | Sumber Dana |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini | 16.096.419.400 | 14.461.772.770 | 89,84 | APBD |
| 2 | Pendidikan Dasar | 132.172.319.321 | 126.018.776.774 | 95,34 | APBD |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan | 4.820.274.708 | 4.246.613.072 | 88,10 | APBD |
| Total Anggaran SPM | | 153.089.013.429 | 144.727.162.161 | 94.54 | |
| Total Anggaran PD | | 484.396.360.430 | 469.942.629.372 | 97.02 | |



| | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--|
| Persentase Alokasi Anggaran SPM | 31,60 | 30,80 | | |
|--|--------------|--------------|--|--|

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2025

4. Dukungan Personil

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 4.3
Daftar Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Berdasarkan Golongan

| NO | GOL | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|----|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | L | P | |
| 1 | GOL. IV | 305 | 541 | 846 |
| 2 | GOL. III | 594 | 1.675 | 2.269 |
| 3 | GOL. II | 62 | 38 | 100 |
| 4 | GOL. I | 2 | 1 | 3 |
| | JUMLAH | 963 | 2.255 | 3.218 |

Sumber data : BKPSDM , 2025

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidik PAUD yang ada di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 4.4
Daftar Guru PAUD Kabupaten Maros Berdasarkan Jenis PAUD

| NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDIDIK PAUD | | TOTAL |
|----|-------------|----------------------|----|-------|
| | | TK/KB | RA | |
| 1 | Bantimurung | 45 | 4 | 49 |
| 2 | Camba | 30 | 0 | 30 |
| 3 | Cenrana | 39 | 0 | 39 |
| 4 | Lau | 45 | 6 | 51 |
| 5 | Mallawa | 31 | 0 | 31 |



| | | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|------------|
| 6 | Mandai | 78 | 26 | 104 |
| 7 | Maros Baru | 52 | 6 | 58 |
| 8 | Bontoa | 64 | 5 | 69 |
| 9 | Marusu | 49 | 4 | 53 |
| 10 | Moncongloe | 58 | 4 | 62 |
| 11 | Simbang | 53 | 8 | 61 |
| 12 | Tanralili | 68 | 5 | 73 |
| 13 | Tompobulu | 30 | 2 | 32 |
| 14 | Turikale | 78 | 15 | 93 |
| JUMLAH | | 720 | 85 | 805 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2025

Tabel. 4.5
Daftar Penilik PAUD Kabupaten Maros Berdasarkan Wilayah

| No. | Wilayah Kecamatan | Penilik PAUD | | JUMLAH |
|-----|-------------------|--------------|---|--------|
| | | L | P | |
| 1 | Turikale | - | 1 | 1 |
| 2 | Maros Baru | 1 | - | 1 |
| 3 | Mandai | - | 1 | 1 |
| 4 | Bontoa | 1 | - | 1 |
| 5 | Lau | - | 1 | 1 |
| 6 | Tanralili | 1 | - | 1 |
| 7 | Tompobulu | 1 | - | 1 |
| 8 | Moncongkoe | 1 | - | 1 |
| 9 | Bantimurung | - | 1 | 1 |
| 10 | Simbang | 1 | - | 1 |
| 11 | Cenrana | 1 | - | 1 |
| 12 | Camba | 1 | - | 1 |



| No. | Wilayah Kecamatan | Penilik PAUD | | JUMLAH |
|---------------|-------------------|--------------|----------|-----------|
| | | L | P | |
| 13 | Mallawa | 1 | - | 1 |
| 14 | Marusu | 1 | - | 1 |
| JUMLAH | | 10 | 4 | 14 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2025

Tabel. 4.6
Jumlah Lembaga PAUD Kabupaten Maros

| NO | KECAMATAN | JUMLAH LEMBAGA | | Total |
|---------------|-------------|----------------|-----------|------------|
| | | PAUD/KB | RA | |
| 1 | Bantimurung | 17 | 1 | 18 |
| 2 | Camba | 16 | 0 | 16 |
| 3 | Cenrana | 17 | 0 | 17 |
| 4 | Lau | 16 | 3 | 19 |
| 5 | Mallawa | 14 | 0 | 14 |
| 6 | Mandai | 29 | 5 | 34 |
| 7 | Maros Baru | 18 | 2 | 20 |
| 8 | Bontoa | 25 | 1 | 26 |
| 9 | Marusu | 16 | 1 | 17 |
| 10 | Moncongloe | 23 | 0 | 23 |
| 11 | Simbang | 21 | 4 | 25 |
| 12 | Tanralili | 30 | 2 | 32 |
| 13 | Tompobulu | 12 | 1 | 13 |
| 14 | Turikale | 33 | 7 | 40 |
| JUMLAH | | 287 | 27 | 314 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2025



Tabel. 4.7
Jumlah Peserta Didik PAUD Kabupaten Maros

| NO | KECAMATAN | JUMLAH PESERTA DIDIK | | TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| 1 | Bantimurung | 1001 | 993 | 1994 |
| 2 | Camba | 171 | 179 | 350 |
| 3 | Cenrana | 592 | 620 | 1212 |
| 4 | Lau | 588 | 587 | 1175 |
| 5 | Mallawa | 600 | 596 | 1196 |
| 6 | Mandai | 145 | 160 | 305 |
| 7 | Maros Baru | 667 | 720 | 1387 |
| 8 | Bontoa | 741 | 763 | 1504 |
| 9 | Marusu | 398 | 435 | 833 |
| 10 | Moncongloe | 206 | 219 | 425 |
| 11 | Simbang | 266 | 276 | 542 |
| 12 | Tanralili | 562 | 565 | 1127 |
| 13 | Tompobulu | 466 | 436 | 902 |
| 14 | Turikale | 942 | 870 | 1812 |
| JUMLAH | | 7345 | 7419 | 14764 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2025

2) Pendidikan Dasar

Jumlah guru di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8
Daftar Guru SD Kabupaten Maros

| NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDIDIK SD | | TOTAL | JUMLAH PENDIDIK SMP | | TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|-------------|
| | | L | P | | L | P | |
| 1 | Bantimurung | 37 | 173 | 210 | 23 | 71 | 94 |
| 2 | Camba | 36 | 98 | 134 | 27 | 40 | 67 |
| 3 | Cenrana | 31 | 97 | 128 | 19 | 32 | 51 |
| 4 | Lau | 28 | 113 | 141 | 29 | 77 | 106 |
| 5 | Mallawa | 31 | 87 | 118 | 18 | 19 | 37 |
| 6 | Mandai | 37 | 157 | 194 | 43 | 92 | 135 |
| 7 | Maros Baru | 38 | 121 | 159 | 15 | 47 | 62 |
| 8 | Bontoa | 44 | 149 | 193 | 19 | 44 | 63 |
| 9 | Marusu | 54 | 111 | 165 | 21 | 51 | 72 |
| 10 | Moncongloe | 28 | 74 | 102 | 24 | 37 | 61 |
| 11 | Simbang | 36 | 116 | 152 | 23 | 42 | 65 |
| 12 | Tanralili | 59 | 152 | 211 | 9 | 29 | 38 |
| 13 | Tompobulu | 30 | 74 | 104 | 14 | 21 | 35 |
| 14 | Turikale | 31 | 163 | 194 | 25 | 94 | 119 |
| JUMLAH | | 520 | 1685 | 2205 | 309 | 696 | 1005 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2025



Tabel. 4.9
Daftar Pengawas SD Se-kabupaten Maros Berdasarkan Wilayah

| No. | Wilayah Kecamatan | Pengawas SD | | |
|---------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | L | P | JUMLAH |
| 1 | Mallawa | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Camba | - | 1 | 1 |
| 3 | Cenrana | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Simbang | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Bantimurung | 3 | - | 3 |
| 6 | Turikale | 3 | - | 3 |
| 7 | Tompobulu | 1 | - | 1 |
| 8 | Maros Baru | 1 | - | 1 |
| 9 | Lau | - | 1 | 1 |
| 10 | Bontoa | - | 2 | 2 |
| 11 | Marusu | 1 | - | 1 |
| 12 | Mandai | - | 2 | 2 |
| 13 | Tanralili | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Moncongloe | 1 | - | 1 |
| JUMLAH | | 14 | 10 | 24 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2025

Tabel. 4.10
Daftar Pengawas SMP Kabupaten Maros Berdasarkan Bidang Studi

| No. | Bidang Studi | Pengawas SMP | | |
|-----|--------------|--------------|---|--------|
| | | L | P | Jumlah |
| 1 | Matematika | 1 | - | 1 |
| 2 | IPA | 1 | - | 1 |
| 3 | IPS | 1 | - | 1 |



| No. | Bidang Studi | Pengawas SMP | | |
|---------------|-------------------------|--------------|----------|-----------|
| | | L | P | Jumlah |
| 4 | Bahasa Inggris | 1 | - | 1 |
| 5 | Bahasa Indonesia | 1 | - | 1 |
| 6 | Pendidikan Pancasila | 1 | - | 1 |
| 7 | PAI | 1 | - | 1 |
| 8 | SeniBudaya dan Prakarya | 1 | - | 1 |
| 9 | Informatika/TIK | 1 | - | 1 |
| 10 | MuatanLokal | 1 | - | 1 |
| 11 | Penjaskes | - | 1 | 1 |
| 12 | BK | - | 1 | 1 |
| JUMLAH | | 10 | 2 | 12 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2025

Secara umum kondisi Pendidikan di Kabupaten Maros dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel.4.11
Jumlah Sekolah Kabupaten Maros Tahun 2024

| NO | Uraian | Jumlah Sekolah | Jumlah Peserta Didik | Jumlah Ruang Kelas | Jumlah Rombongan Belajar |
|--------------|--------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | | 246 | 43.501 | 235 | 1.723 |
| 2 | | 27 | 3.592 | | |
| 3 | | 75 | 15.708 | 75 | 576 |
| 4 | | 44 | 4.660 | | |
| TOTAL | | 391 | 67.465 | 310 | 2.299 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2025

3) Pendidikan Kesetaraan

Daftar Tutor Kesetaraan yang ada di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 4.12
Daftar Tutor per-PAKET Kabupaten Maros

| No | Wilayah Kecamatan | Tutor Paket A | | | Tutor Paket B | | | Tutor Paket C | | |
|--------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH |
| 1 | Bantimurung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Camba | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cenrana | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Lau | 1 | - | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Mallawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Mandai | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 9 |
| 7 | Maros Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Bontoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Marusu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Moncongloe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Simbang | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 12 |
| 12 | Tanralili | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 13 | Tompobulu | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 |
| 14 | Turikale | - | - | - | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| Total | | 7 | 17 | 24 | 23 | 35 | 58 | 26 | 41 | 67 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2025

Gambaran Pendidikan Kesetaraan yang ada di Kabupaten Maros, dapat dilihat pada tabel berikut :

- Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan



Tabel. 4.13
Lembaga Yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan
Di Kabupaten Maros

| NO | LEMBAGA | KECAMATAN | STATUS LEMBAGA | |
|----|----------------------|-------------|----------------|--------|
| | | | NEGERI | SWASTA |
| 1 | SKB/SPNF BANTIMURUNG | Bantimurung | √ | - |
| 2 | PKBM MAWAR | Lau | - | √ |
| 3 | PKBM MATTIRO SAWE | Mandai | - | √ |
| 4 | PKBM TANRALILI | Tanralili | - | √ |
| 5 | PKBM TOMPOBULU | Tompobulu | - | √ |
| 6 | PKBM DELIA CENRANA | Cenrana | - | √ |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2025

➤ Warga belajar

Tabel 4.14
Jumlah Peserta Per-PAKET Kabupaten Maros Tahun 2024

| No. | KECAMATAN | JUMLAH PESERTA DIDIK | | | | TOTAL |
|-----|-------------|----------------------|---------|----------------|----------------|-------|
| | | PAKET A | PAKET B | Paket C IPA | PAKET C IPS | |
| 1 | Bantimurung | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 2 | Camba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cenrana | 4 | 5 | 10 | 9 | 28 |
| 4 | Lau | 3 | 16 | 15 | 24 | 58 |
| 5 | Mallawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mandai | 14 | 8 | 17 | 11 | 50 |
| 7 | MarosBaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bontoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marusu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Moncongloe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| No. | KECAMATAN | JUMLAH PESERTA DIDIK | | | | TOTAL |
|-----|---------------|----------------------|-----------|----------------|----------------|------------|
| | | PAKET A | PAKET B | Paket C IPA | PAKET C IPS | |
| 11 | Simbang | 6 | 20 | 15 | 14 | 55 |
| 12 | Tanralili | 4 | 6 | 12 | 8 | 30 |
| 13 | Tompobulu | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | Turikale | 6 | 10 | 8 | 10 | 34 |
| | JUMLAH | 37 | 65 | 84 | 87 | 273 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2025

➤ Ruang kelas dan Rombongan Belajar

Tabel 4.15
Jumlah Ruang Kelas SPNF dan PKBM Kabupaten Maros

| No. | Wilayah Kecamatan | Ruang Belajar | Rombongan Belajar |
|-----|----------------------|---------------|-------------------|
| 1 | SKB/SPNF BANTIMURUNG | 7 | 7 |
| 2 | PKBM MAWAR | 3 | 3 |
| 3 | PKBM MATTIRO SAWE | 7 | 7 |
| 4 | PKBM TANRALILI | 3 | 3 |
| 5 | PKBM TOMPOBULU | 6 | 6 |
| 6 | PKBM DELIA CENRANA | 7 | 7 |
| | JUMLAH | 33 | 33 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2025

5. Hasil Capaian

Realisasi target pencapaian SPM Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel. 4.16
Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Maros Tahun 2024

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan | Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan | Capaian (%) |
|----|---------------------------|---|--|--|-------------|
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD | 14.764 | 14.215 | 96,28 |
| 2 | Pendidikan Dasar | Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) | 67.465 | 67.465 | 100 |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan | 273 | 273 | 100 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2025

6. Kendala yang dihadapi Daerah dalam penerapan SPM

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros, maka telah dilakukan identifikasi permasalahan terkait dengan Pencapaian SPM Urusan Pendidikan sebagai berikut :

| No | Tahapan | Permasalahan | Solusi |
|----|------------------|---|---|
| 1. | Pengumpulan Data | <ul style="list-style-type: none">• Masih belum tersedianya data By Name By NIK• Struktur Pendataan yang belum terstandarisasi• Adanya perbedaan data dari beberapa Indikator | <ul style="list-style-type: none">• Melakukan Pendataan Peserta Didik• Menyiapkan Standarisasi permintaan kebutuhan data pada Organisasi yang terkait dengan SPM Bidang Pendidikan• Verifikasi data berdasarkan |



| No | Tahapan | Permasalahan | Solusi |
|----|------------------------------|--|--|
| | | | indikator yang ada |
| 2. | Penghitungan Kebutuhan | <ul style="list-style-type: none">• Belum Maksimalnya Sasaran Pengampu SPM• Perhitungan Anak tidak Sekolah yang dilakukan by name by adress• Perhitungan kebutuhan biaya Pendidikan yang harus disesuaikan dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola OPD• Perhitungan kebutuhan penanganan sosial bagi anak putus sekolah belum memadai | <ul style="list-style-type: none">• Pemutakhiran data sasaran SPM• Memaksimalkan Data yang bersumber dari Pendataan Anak Tidak Sekolah “Pasti Beraksi” melalui Aplikasi SIPBM ATS Kemendes. |
| 3. | Perencanaan Dan Penganggaran | <ul style="list-style-type: none">• Belum terakomodirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal• Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam penanganan Anak Tidak sekolah | <ul style="list-style-type: none">• Pemetaan Program Kerja Prioritas Pengampu SPM |
| 4. | Pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah• Aspek pelayanan pemenuhan SPM yang terkendala oleh wilayah / lokasi pemenuhan | <ul style="list-style-type: none">• Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah |
| | Pelaporan | | |
| | Lain-lain | | |

B. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita



- e. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- g. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- h. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- i. Cakupan Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- j. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- k. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.17
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan | Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan | % |
|----|--|--|--|--|-------|
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar | 5.397 | 5.168 | 95,75 |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) | 5.397 | 5.158 | 95,57 |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 5.397 | 5.133 | 95,11 |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 28.000 | 27.028 | 96,53 |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 57.521 | 56.044 | 97,43 |



| | | | | | |
|----|--|--|---------|---------|-------|
| 6 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 179.813 | 166.441 | 92,56 |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 30.254 | 28.359 | 93,74 |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 11.065 | 10.938 | 98,85 |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 2.736 | 2.719 | 99,38 |
| 10 | Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 903 | 903 | 100 |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 3.863 | 3.857 | 99,84 |
| 12 | Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV | Jumlah orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 6.220 | 6.012 | 96,66 |

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab.Maros , 2025

3. Anggaran

Anggaran SPM urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel. 4.18
Anggaran SPM urusan kesehatan

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran | Realisasi | % | Sumber Dana |
|----|---|---------------|---------------|-------|---------------------|
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 2.763.070.465 | 1.975.899.500 | 71,51 | PAD, PBH-PR, DAK NF |
| 2 | Pelayanan kesehatan Ibu bersalin | 649.435.000 | 599.975.000 | 92,38 | PBH-PR, DAK NF |
| 3 | Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir | 254.680.000 | 235.280.000 | 92,38 | DAK NF |
| 4 | Pelayanan kesehatan Balita | 2.345.727.000 | 2.075.470.000 | 88,14 | PBH-PR, DAK NF |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 1.039.670.000 | 960.560.000 | 92,39 | PBH-PR, DAK NF |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 410.185.000 | 408.255.000 | 99,53 | DAK NF |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 85.620.000 | 73.420.000 | 85,75 | DAK NF |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi | 0 | 0 | 0,00 | DAK NF |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) | 577.500.000 | 577.500.000 | 100 | DAK NF |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat | 0 | 0 | 0 | |



| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------|-------|---------------------|
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis | 702.630.900 | 677.099.250 | 96,37 | DAK NF |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | 345.940.000 | 312.215.000 | 90,25 | PAD, DAK NF |
| 13 | Dana Pendukung SPM (Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin) | 6.727.936.100 | 6.608.300.280 | 98,22 | PAD, PBH-PR, DAK NF |
| 14 | Dana Pendukung SPM (Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai) | 222.000.000 | 222.000.000 | 100 | PBH-PR |
| 15 | Dana Pendukung SPM (Sub Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Penguatan Layanan Maternal Neonatal di Puskesmas) | 93.800.000 | 81.300.000 | 86,67 | PBH-PR |
| 16 | Dana Pendukung SPM (Sub Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (USG, Antropometri dan Gadar Matneo) | 3.979.205.000 | 2.297.252.972 | 57,73 | PAD |
| Total Anggaran SPM (1) | | 24.167.838.935 | 22.493.296.914 | 93,07 | PAD |
| Total Anggaran Perangkat Daerah (2) | | 377.241.884.464 | | | |
| Persentase Alokasi Anggaran SPM (1 : 2 x 100%) | | 11,73 % | | | |

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab.Maros , 2025

3. Dukungan Personil

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros



digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 4.19
Daftar Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

| NO | GOL | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|----|---------------|---------------|-----------|-----------|
| | | L | P | |
| 1 | GOL. IV | 12 | 14 | 26 |
| 2 | GOL. III | 14 | 32 | 46 |
| 3 | GOL. II | 5 | 5 | 10 |
| 4 | GOL. I | 2 | 7 | 9 |
| | JUMLAH | 33 | 58 | 91 |

Sumber data : BKPSDM , 2025

4. Hasil Capaian

Hasil Capaian atau Realisasi pencapaian SPM bidang urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.20
Realisasi Capaian SPM urusan kesehatan

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan | Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan | % |
|----|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------|
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar | 5.397 | 5.168 | 95,75 |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) | 5.397 | 5.158 | 95,57 |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 5.397 | 5.133 | 95,11 |
| 4 | Pelayanan Kesehatan | Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan | 28.000 | 27.028 | 96,53 |



| | Balita | pelayanan kesehatan | | | |
|----|--|--|---------|---------|-------|
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 57.521 | 56.044 | 97,43 |
| 6 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 179.813 | 166.441 | 92,56 |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 30.254 | 28.359 | 93,74 |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 11.065 | 10.938 | 98,85 |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 2.736 | 2.719 | 99,38 |
| 10 | Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 903 | 903 | 100 |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 3.863 | 3.857 | 99,84 |
| 12 | Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV | Jumlah orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | 6.220 | 6.012 | 96,66 |

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab.Maros , 2025

5. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Maros pada Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:



| No | Tahapan | Permasalahan | Solusi |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | Pengumpulan Data | <p>Faktor Ekseternal: Data Sasaran SPM yang digunakan oleh Dinas Kesehatan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih terdapat perbedaan (selisih) karena tidak semua penduduk yang memiliki KTP, memilih menetap di Kabupaten Maros sehingga mempengaruhi jumlah sasaran masyarakat yang akan dilayani sementara petugas kesehatan hanya akan melayani sesuai dengan data rill yang ditemukan di lapangan.</p> <p>Mobilisasi penduduk yang sangat cepat, khususnya yang berada diantara perbatasan Maros-Makassar sehingga berpengaruh pada proses pengumpulan data sasaran SPM.</p> <p>Faktor Internal: Konsisten para petugas kesehatan yang belum sepenuhnya tepat waktu karena dalam pengumpulan data masih seringkali terjadi perubahan data masih seringkali terjadi perubahan data yang berulang-ulang.</p> | <p>Faktor Ekseternal: Dukungan dan peranan aktif dari pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam Percepatan Pelayanan SPM Bidang Kesehatan, Khususnya Pengaturan Mobilitas yang memiliki hak dalam pelayanan kesehatan.</p> <p>Faktor Internal: Peningkatan pengawasan dan pembinaan Dinas Kesehatan kepada Puskesmas</p> |
| 2. | Penghitungan Kebutuhan | Koordinasi terkait cara perhitungan Kebutuhan dengan Bidang Pengampu SPM dengan Bidang Lintas Program terkait Perhitungan kebutuhan untuk alat kesehatan, bahan habis medis pakai, obat, vaksin dan perlengkapan dalam pelayanan dasar kesehatan untuk SPM yang belum memiliki petunjuk teknis dalam penghitungan kebutuhan sesuai standar. | Peningkatan koordinasi Dinas Kesehatan pada setiap Bidang Pengampu SPM |
| 3. | Perencanaan dan Penganggaran | Kegiatan pelaksanaan pelayanan dasar terkait SPM di Puskesmas belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Pemerintahan Daerah yang bersumber DAU sehingga kegiatan berjalan disuporting oleh DAK Fisik dan Non Fisik berdasarkan menu yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI | Dukungan dan peranan aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam percepatan pelayanan SPM Bidang Kesehatan, Khususnya Penganggaran |
| 4. | Pelaksanaan | Pelayanan kesehatan dasar belum terintegrasi dengan siklus hidup yang berdasarkan dengan indikator mutu SPM karena masih berdasarkan program | Daerah Kabupaten Maros dalam percepatan pelayanan SPM Bidang |



| | | layanan kesehatan saja. | Kesehatan. |
|----|-----------|---|--|
| 5. | Pelaporan | - | - |
| 6. | Lain-lain | <p>Faktor Ekseternal: Dukungan dan peranan lintas sektor yang belum sepenuhnya aktif dalam peningkatan capaian pelayanan SPM.</p> <p>Deteksi dini/pemeriksaan awal yang masih kurang disadari oleh masyarakat akan pentingnya arti kesehatan.</p> <p>Faktor Internal: <i>Maintace</i> beberapa aplikasi Kementerian Kesehatan yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penginputan pelaporan rutin setiap bulan.</p> <p>Peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas kesehatan yang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian maksimal oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Mobilisasi/perpindahan penduduk, khususnya yang usia kerja/produktif yang bersifat dinamis; aktivitas/kesibukan penduduk yang bertepatan; Kondisi kehamilan yang mengalami Abortus/keguguran; kerjasama pihak-pihak guru di beberapa sekolah yang masih kurang aktif dalam jadwal pelayanan kesehatan; Belum semuanya masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses lokasi fasilitas kesehatan yang terdekat; Faktor sosial budaya bagi Sasaran/Populasi kunci pada indikator Orang yang terinfeksi HIV yang enggan untuk dilakukan Screening kesehatan karena jika hasil pemeriksaannya Positif maka mereka takut dijauhi masyarakat sehingga mempengaruhi pencapaian pelayanan SPM sesuai target SPM Sebesar 100%.</p> | Dukungan dan peranan aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam percepatan pelayanan SPM Bidang Kesehatan. |

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab.Maros , 2025



C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2024 terdiri dari :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- b. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.21
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan | Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan | % |
|----|--|---|--|--|-----|
| 1 | Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 627 | 627 | 100 |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik | Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 814 | 814 | 100 |

Sumber data : Dinas PU, tata ruang, perhubungan dan pertanahan Kab.Maros , 2025



3. Anggaran

Anggaran SPM bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.22
Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran | Realisasi | % | Sumber Dana |
|--|--|-----------------|---------------|-------|-------------|
| 1 | Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 6.898.807.000 | 6.836.781.308 | 99,10 | APBD (DAU) |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik | 2.437.175.000 | 2.390.742.960 | 98,09 | APBD (DAU) |
| Total Anggaran SPM | | 9.335.982.000 | 9.227.524.268 | 98,84 | APBD (DAU) |
| Total Anggaran PD | | 158.878.266.881 | | | |
| Persentase Alokasi Anggaran SPM | | | | 5,88 | |

Sumber data : Dinas PU, tata ruang, perhubungan dan pertanahan Kab.Maros , 2025

4. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM bidang urusan pekerjaan umum digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.23
Daftar Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan

| NO | GOL | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|----|----------|---------------|----|--------|
| | | L | P | |
| 1 | GOL. IV | 7 | 5 | 12 |
| 2 | GOL. III | 74 | 45 | 119 |
| 3 | GOL. II | 21 | 5 | 26 |



| | | | | |
|---|---------------|-----|----|-----|
| 4 | GOL. I | 2 | 0 | 2 |
| | JUMLAH | 104 | 55 | 159 |
| | | | | |

Sumber data : BKPSDM , 2025

5. Hasil Capaian

Hasil Capaian atau Realisasi pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.24
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan | Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan | % |
|----|--|---|--|--|-----|
| 1 | Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 627 | 627 | 100 |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik | Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 814 | 814 | 100 |

Sumber data : Dinas PU, tata ruang, perhubungan dan pertanahan Kab.Maros , 2025

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

| No | Tahapan | Permasalahan | Solusi |
|----|------------------|---|--------------------------|
| 1 | Pengumpulan Data | Adanya perbedaan data pada saat di lapangan | Keakuratan data lapangan |



| No | Tahapan | Permasalahan | Solusi |
|----|--|--|--|
| 2 | Penghitungan Kebutuhan | Kurangnya dokumen perencanaan pendukung dan tidak semua data dasar tersedia serta data cenderung kurang update | Data dasar tersedia |
| | | Belum adanya data base keberfungsian dari sarana prasarana penyediaan air minum dan sanitasi yang telah dibangun | Penyusunan data base keberfungsian sarana prasarana air minum dan sanitasi |
| 3 | Perencanaan Dan Penganggaran | Belum optimalnya system perencanaan penyediaan air minum dan terbatasnya pendanaan untuk penerapan SPM | Perencanaan lebih dioptimalkan berbanding lurus dengan pendanaannya |
| | | Perlunya penganggaran yang cukup besar untuk menuntaskan permasalahan air minum dan sanitasi | Anggaran bidang air minum dan sanitasi di optimalkan |
| 4 | Pelaksanaan | Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah | Pelatihan untuk perangkat daerah |
| | | Sarana prasarana bidang sanitasi belum berfungsi secara optimal | Pelatihan untuk kelompok pengelola sarana prasarana air minum dan sanitasi |
| 5 | Pelaporan | Format laporan yang selalu berubah-ubah | - |
| 6 | Penyiapan Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) | Untuk anggaran yang direncanakan berbeda dengan realisasinya | Dalam penganggaran kegiatan untuk program pendukung SPM lebih diprioritaskan |

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten



b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.25
Target SPM Urusan Perumahan Rakyat

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan | Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan | % | KET |
|----|---|--|--|--|-----|-----|
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 70 | 70 | 100 | |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. | 3 | 3 | 100 | |

Sumber data : Dinas PR, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab.Maros , 2025

3. Anggaran

Anggaran urusan perumahan rakyat oleh Pemerintah Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :





Tabel 4.26
Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran | Realisasi | % | Sumber Dana |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|-------|-------------|
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten | Rp. 10.721.000 | Rp. 5.830.000 | 54,38 | APBD |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten | Rp. 350.000.000 | Rp. 350.000.000 | 100 | APBD |
| Total Anggaran SPM | | Rp. 360.721.000 | Rp. 355.830.000 | 98,64 | |

Sumber data : Dinas PR, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab.Maros , 2025

4. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM bidang urusan pekerjaan umum digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.27
Daftar Pegawai Dinas PRPKPLH Kab. Maros

| NO | GOL | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|----|---------------|---------------|-----------|-----------|
| | | L | P | |
| 1 | GOL. IV | 2 | 2 | 4 |
| 2 | GOL. III | 23 | 25 | 52 |
| 3 | GOL. II | 16 | 9 | 25 |
| 4 | GOL. I | 15 | | 15 |
| | JUMLAH | 56 | 36 | 92 |

Sumber data : BKPSDM , 2025

5. Hasil Capaian

Hasil capaian atau realisasi pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.28
Hasil capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan | Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan | % | KET |
|----|---|--|--|--|-----|-----|
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 70 | 70 | 100 | |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. | 3 | 3 | 100 | |

Sumber data : Dinas PR, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab.Maros , 2025

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :



| No | Tahapan | Permasalahan | Solusi |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | Pengumpulan Data | 1. Lokasi Jauh 2. Sulitnya berkoordinasi dengan Aparat Desa 3. Pengumpulan Data ditingkat Desa Masih Kurang | Menyiapkan Standarisasi permintahan kebutuhan data pada Organisasi yang terkait dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat |
| 2. | Penghitungan Kebutuhan | Data yang Masuk Lebih Banyak dari pada rencana Realisasinya | Perhitungan Kebutuhan Rumah Korban Bencana Harus Disesuaikan berdasarkan tingkat kerusakan Rumah Masyarakat |
| | | Perencanaan Pendataan lebih banyak dari pada usulan kegiatan | Menyesuaikan jumlah kebutuhan pemenuhan rumah korban bencana |
| 3. | Perencanaan Dan Penganggaran | Belum terakomodirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. | Memaksimalkan Program dan kegiatan dalam pemenuhan SPM. |
| | | Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam Penanganan Korban Bencana | Mengalokasikan dana/ Anggaran |
| | Pelaksanaan | 1. Pendistribusian Material yang susah dijangkau kendaraan 4 roda 2. Pengurangan Anggaran yang disebabkan oleh bebepa faktor sehingga beberapa layanan tidak dapat dipenuhi. 3. Minimnya sumber daya yang tersedia | Pengalokasian Anggaran dalam pemenuhan layanan SPM perlu dimaksimalkan. |
| | Pelaporan | - | - |
| | Lain-lain | - | - |

E. Bidang Urusan Trantibumlinmas

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 pada 2 (dua) Organisasi Pemerintahan Daerah yaitu :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah



- **Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros terdiri dari :

- a) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

Adapun mutu pelayanan terkait ketentraman dan ketertiban Umum meliputi

- standar operasional prosedur Satpol PP
- standar sarana prasarana Satpol PP;
- standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

- b) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, meliputi:

- layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
- layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.29
Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan | Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan | % |
|----|--|---|--|--|-----|
| 1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada | 86 | 86 | 100 |
| 2 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | 246 | 246 | 100 |

Sumber data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan , 2025

3. Anggaran

Anggaran SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.30
Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran | Realisasi | % | Sumber Dana |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | 712.934.262 | 591.672.000 | 82.99 % | APBD dan Dana Bagi Hasil |
| 2 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 97.014.000 | 80.918.550 | 83.41 % | APBD |
| Total Anggaran SPM | | 809.948.262 | 672.590.550 | 83,00% | APBD dan Dana Bagi Hasil |
| Total Anggaran PD | | 16.135.517.504 | 15.132.355.209 | 93.78% | APBD dan Dana Bagi Hasil |



| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------------------|
| Persentase Alokasi Anggaran SPM | 5.01% | 4.44% | APBD dan Dana Bagi Hasil |
|--|--------------|--------------|--------------------------|

Sumber data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan , 2025

4. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.31
Daftar Pegawai

| NO | GOL | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|----|---------------|---------------|----|--------|
| | | L | P | |
| 1 | GOL. IV | 7 | 1 | 8 |
| 2 | GOL. III | 38 | 10 | 48 |
| 3 | GOL. II | 45 | 5 | 50 |
| 4 | GOL. I | 3 | - | 3 |
| | JUMLAH | 93 | 16 | 109 |

Sumber data : BKPSDM , 2025

5. Hasil Capaian

Hasil capaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



4.32 Hasil Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan | Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan | % |
|----|--|---|--|--|-----|
| 1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada | 86 | 86 | 100 |
| 2 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | 246 | 246 | 100 |

Sumber data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan , 2025

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

| No | Tahapan | Permasalahan | Langkah Penyelesaian |
|----|------------------|--|---|
| | Pengumpulan Data | a. Tidak tersedianya data (tidak terdokumentasi secara baik) sejumlah kegiatan dilaksanakan tetapi tidak tercatat; b. Kurangnya SDM yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan mahir; | a. Memberikan kesempatan kepada perencana dan pelaksana teknis untuk mengikuti pelatihan mengenai Standar Pelayanan Minimal |



| | | |
|------------------------------|---|---|
| Penghitungan Kebutuhan | <p>a. Belum adanya pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran;</p> <p>b. Banyaknya jumlah tenaga honor satpol PP dan Damkar, sehingga anggaran yang ada di peruntukan untuk memenuhi jasa tenaga honor</p> <p>c. Kondisi sarana prasarana masih perlu di tambah utamanya mobil operasional Satdalmas, Patroli dan Armada Damkar masih terdapat beberapa Kecamatan yang belum memiliki Armada dan Penempatan personil Sektor di Kecamatan (Tompobulu, Mallawa, Cenrana, Simbang, Lau, Maros Baru dan Mandai).</p> | <p>a. Perlu adanya pemetaan daerah rawan bencana kebakaran dan penambahan beberapa Wilayah Manajemen Kebakaran;</p> <p>b. Mengajukan untuk melakukan pengangkatan khusus kepada tenaga honor Satpol PP dan Damkar serta melakukan seleksi kembali untuk mengurangi jumlah tenaga honor yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;</p> <p>c. Penambahan jumlah sarana prasaran berupa armada pengangkut petugas</p> |
| Perencanaan Dan Penganggaran | <p>a. Kurangnya Anggaran dalam mendukung program dan kegiatan</p> <p>b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;</p> | Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional; |
| Pelaksanaan | <p>a. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergitas antara dinas/instansi terkait;</p> <p>b. Masih banyaknya Aparatur yang belum memenuhi standar kompetensi sesuai Peraturan Pemerintah 16 tahun 2018 tentang Satpol PP dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah</p> | <p>a. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan trantibumlinmas;</p> <p>b. Mengirim Aparatur untuk mengikuti Diklat pengembangan SDA Aparatur Satpol PP dan Damkar</p> |
| Pelaporan | - | - |



| | | |
|-----------|---|--|
| Lain-lain | <p>a. Tidak adanya Hydran sumber air untuk pemadam kebakaran;</p> <p>b. Masih adanya kondisi jalan yang rusak dan sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran;</p> <p>c. Kurangnya wilayah manajemen kebakaran yang mengakibatkan sulitnya pengendalian kebakaran di lokasi luar WMK;</p> <p>d. Biaya pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran masih terpusat di bagian keuangan daerah sehingga dalam pengurusan perbaikan menjadi terhambat</p> | <p>a. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menambah pos pemadam kebakaran;</p> <p>b. Perbaiki jalan yang tidak bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran;</p> <p>c. Perlu adanya pembuatan sumur penampungan air di beberapa titik yang tersebar di WMK sebagai sumber air bagi pemadam kebakaran;</p> <p>d. Sebaiknya biaya pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran di kelola langsung oleh instansi bersangkutan sehingga proses perbaikan menjadi cepat dan dapat di gunakan apabila terjadi kebakaran</p> |
|-----------|---|--|

- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros terdiri dari :

- a. Pelayanan Informasi rawan bencana, meliputi :
 - penyusunan kajian risiko bencana;
 - Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, meliputi :
 - penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - pembuatan rencana kontinjensi;
 - pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;



- pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, meliputi

- respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
- respon cepat darurat bencana;
- aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.33
Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan | Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan | % |
|----|---|--|--|--|-----|
| 1 | Pelayanan Informasi rawan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 398.866 | 398.866 | 100 |
| 2 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 115713 | 115713 | 100 |
| 3 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 41.250 | 41.250 | 100 |

Sumber data : BPBD Kab.Maros, 2025

3. Anggaran



Anggaran SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.34
Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran | Realisasi | % | Sumber Dana |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| 1 | Pelayanan Informasi rawan bencana | 99.450.000 | 85.770.000 | 86,24 | APBD |
| 2 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 65.600.000 | 61.790.000 | 94,19 | APBD |
| 3 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 199.597.000 | 192.958.100 | 96,67 | APBD |
| Total Anggaran SPM | | 364.647.000 | 340.518.100 | 92,36 | |
| Total Anggaran PD | | 17.472.261.758 | 16.769.068.418 | 95,98 | |
| Persentase Alokasi Anggaran SPM | | 17.107.614.758 | 16.428.550.318 | 96.03 | |

Sumber data : BPBD Kab.Maros, 2025

4. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.35
Daftar Pegawai

| NO | GOL | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|----|----------|---------------|---|--------|
| | | L | P | |
| 1 | GOL. IV | 5 | 2 | 6 |
| 2 | GOL. III | 15 | 4 | 19 |
| 3 | GOL. II | 8 | 1 | 9 |



| | | | | |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 4 | GOL. I | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GOL. V (PPPK) | 4 | 1 | 5 |
| 6 | SATGAS | 34 | 21 | 55 |
| | JUMLAH | 66 | 29 | 94 |

Sumber data : BKPSDM , 2025

5. Hasil Capaian

Hasil capaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.36
Hasil Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan | Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan | % |
|----|---|--|--|--|-----|
| 1 | Pelayanan Informasi rawan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 398.866 | 398.866 | 100 |
| 2 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 115.713 | 115.713 | 100 |
| 3 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 41.250 | 41.250 | 100 |

Sumber data : BPBD Kab.Maros, 2025

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

| No | Tahapan | Permasalahan | Langkah Penyelesaian |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | Pengumpulan Data | Kurangnya personil Satgas Bencana | Proses Pendataan Korban Bencana tidak berjalan dengan baik |
| 2. | Penghitungan Kebutuhan | Jumlah Kerugian tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan | dibutuhkan orang yang berkompeten untuk menghitung jumlah kerugian dilapangan |
| 3. | Perencanaan Dan Penganggaran | Anggaran Terbatas | Pemangku kepentingan harus memanfaatkan anggaran skala proiritas terkait pemenuhan SPM |
| 4. | Pelaksanaan | Perubahan Anggaran 2024 | Data yang diterima dari responden kurang lengkap |
| 5. | Pelaporan | Kurangnya keterampilan atau pengalaman dalam pengumpulan data sehingga berdampak pada data yang di kumpulkan | Dibutuhkan tenaga yang professional dalam pengumpulan data |
| 6. | Lain-lain | | |

F. Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial.
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial.
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan telah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas



sosial Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.37
Target SPM Urusan Sosial

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan | Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan | % |
|----|--|---|--|--|-----|
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 103 | 103 | 100 |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti | 53 | 53 | 100 |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial. | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 21 | 21 | 100 |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti | Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | 68 | 68 | 100 |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota | Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | 619 | 619 | 100 |

Sumber data : Dinas Sosial Kab.Maros , 2025

3. Anggaran

Anggaran urusan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :



Tabel 4.38
Anggaran SPM Urusan Sosial

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Anggaran | Realisasi | % | Sumber Dana |
|----------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------|-------------|
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 169.601.500 | 159.215.000 | 93,88 | APBD |
| 2 | Perlindungan sosial korban bencana Alam dan Sosial Kabupaten | 87.575.000 | 87.263.750 | 99,64 | APBD |
| Total Anggaran SPM | | 87.575.000 | 87.263.750 | 99,64 | APBD |
| Total Anggaran SKPD | | 257.176.5000 | 246.478.950 | 95,84 | APBD |

Sumber data : Dinas Sosial Kab.Maros , 2025

4. Dukungan Personil

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Sosial Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM Urusan Sosial digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.39
Daftar Pegawai

| NO | GOL | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|---------------|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | L | P | |
| 1 | GOL. IV | 8 | 1 | 9 |
| 2 | GOL. III | 7 | 18 | 25 |
| 3 | GOL. II | 5 | 6 | 11 |
| 4 | GOL. I | - | - | - |
| JUMLAH | | 20 | 25 | 45 |

Sumber data : BKPSDM , 2025

5. Hasil Capaian

Hasil capaian atau realisasi pencapaian SPM bidang urusan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.40
Hasil capaian SPM Urusan Sosial

| NO | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan | Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan | % |
|-----------|--|---|---|---|----------|
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 103 | 103 | 100 |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti | 53 | 53 | 100 |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial. | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 21 | 21 | 100 |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti | Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti | 68 | 68 | 100 |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota | Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | 619 | 619 | 100 |

Sumber data : Dinas Sosial Kab.Maros , 2025

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :



| No | Tahapan | Permasalahan | Solusi |
|----|------------------------------|---|--|
| 1. | Pengumpulan Data | <ol style="list-style-type: none">1. Kualitas data yang buruk2. Data tidak lengkap dengan item yang dibutuhkan3. Responden tidak kooperatif | <ul style="list-style-type: none">- Mengaktifkan Tugas dan Fungsi Fasilitator pada tiap Desa/ Kelurahan- Menambahkan Biara atau Insentif petugas pengumpul data |
| 2. | Penghitungan Kebutuhan | <ol style="list-style-type: none">1. Kesalahan estimasi2. Perkiraan kebutuhan yang tidak akurat3. Data tidak lengkap4. Perubahan kebutuhan yang berubah5. Kesalahan interpretasi salah interpretasi data atau informasi6. Kurangnya komunikasi antar tim | Mengidentifikasi sumber pendanaan yang sah selain dari APBD (CSR dunia usaha, Basnas maupun bantuan dari Provinsi dan Pemerintahan Pusat). |
| 3. | Perencanaan Dan Penganggaran | <ol style="list-style-type: none">1. Tujuan dan sasaran tidak spesifik2. Keterbatasan data dan informasi3. Perencanaan yang tidak realistis4. Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan5. Perubahan kebutuhan dan prioritas6. Keterbatasan sumber daya7. Keterbatasan dana8. Pengalokasian dana yang tidak efektif9. Kurangnya pengawasan dan evaluasi | Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait (Organisasi social, Dunia Usaha maupun OPD lain). |
| 4. | Pelaksanaan | <ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya komunikasi antar tim2. Keterbatasan SDM3. Keterbatasan Kemampuan teknis4. Keterbatasan anggaran | <ul style="list-style-type: none">- Melakukan Pendampingan dalam pemberian Pelayanan- Koordinasi dengan Aparat Pemerintah di Desa /Kelurahan |



| | | | |
|----|-----------|--|--|
| 5. | Pelaporan | Sub kegiatan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan tidak terealisasi penyebabnya kegiatan tersebut harus dipihak ketigakan sementara tidakada rekanan yang bersedia disebabkan anggaran sangat minim | Tetap melakukan pelaporan sesuai jadwal meskipun belum ada kegiatan yang di laksanakan. |
| 6. | Lain-lain | Capaian SPM Dinas Sosial tidak Sepenuhnya menggunakan Anggaran APBD Kabupaten. Tetapi sebagian juga di biyai oleh Anggaran APBN / Kemensos RI | Tetap menyusun rencana dan penganggaran pemenuhan SPM dan menjadikannya sebagai Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Sosial dalam Penyusunan APBD Kabupaten. |

Dalam pelaksanaan peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM sebagai berikut :

A. Bidang Urusan Pendidikan

Tabel. 4.41
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan Pendidikan

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| Program Pengelolaan Pendidikan | | | |
| Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | 16,096,419,400 | 14,461,772,770 |
| 1 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 1,907.700.000 | 1,482,886,284 |
| 2 | Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD | 2,533,891,800 | 2,412,963,075 |
| 3 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 238,500,000 | 237,188,863 |
| 4 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 1,850,000,000 | 1,838,050,200 |
| 5 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 151,640,000 | 51,000,000 |



| | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 6 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 4,616,400,000 | 4,224,600,000 |
| 7 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 264,945,000 | 61,545,000 |
| 8 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 738,390,000 | 683,490,000 |
| 9 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 78,470,000 | 70,900,000 |
| 10 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 46,130,000 | 45,703,000 |
| 11 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 104,582,600 | 68,522,000 |
| 12 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 123,045,000 | 60,850,000 |
| 13 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 212,000,000 | 206,313,969 |
| 14 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 211,575,000 | 211,575,000 |
| 15 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 936,000,000 | 781,431,379 |
| 16 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 83,150,000 | 64,950,000 |
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | 81,843,170,786 | 79,476,695,074 |
| 1 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 848,757,000 | 830,185,000 |
| 2 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 247,000,000 | 241,130,900 |
| 3 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1,876,898,900 | 1,826,295,800 |
| 4 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 963,882,000 | 954,417,020 |
| 5 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 987,080,000 | 972,937,800 |
| 6 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 475,500,000 | 463,508,200 |
| 7 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 9,963,784,136 | 9,735,695,000 |



| | | | |
|----|--|----------------|----------------|
| 8 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 1,400,000,000 | 1,279,730,000 |
| 9 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 373,050,000 | 321,650,000 |
| 10 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1,000,420,000 | 747,120,000 |
| 11 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 226,380,000 | 209,730,000 |
| 12 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 41,085,600,000 | 41,085,600,000 |
| 13 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 111,270,000 | 110,770,000 |
| 14 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | 1,365,000,000 | 1,328,573,130 |
| 15 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 26,550,000 | 25,549,000 |
| 16 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 16,950,000 | 15,049,000 |
| 17 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 31,550,000 | 30,599,000 |
| 18 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 52,905,000 | 52,905,000 |
| 19 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 16,950,000 | 15,945,000 |
| 20 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | 78,750,000 | 77,415,524 |
| 21 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 5,016,200,000 | 4,940,920,200 |
| 22 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 7,122,796,000 | 6,638,290,800 |
| 23 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 483,048,000 | 435,744,300 |
| 24 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 94,715,600 | 75,225,600 |
| 25 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta | 119,050,000 | 117,670,000 |



| | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| | Didik | | |
| 26 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 7,859,084,150 | 6,944,038,800 |
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | 50,329,148,535 | 46,542,081,700 |
| 1 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 2,509,000,000 | 0 |
| 2 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 279,478,000 | 277,011,185 |
| 3 | Pembangunan Laboratorium | 820,800,000 | 814,265,650 |
| 4 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 839,900,000 | 836,482,700 |
| 5 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 3,467,636,400 | 3,396,419,480 |
| 6 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 426,700,000 | 421,804,000 |
| 7 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | 626,259,000 | 617,174,250 |
| 8 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 97,140,000 | 94,996,925 |
| 9 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 10,708,666,135 | 10,506,113,000 |
| 10 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 1,240,000,000 | 927,000,000 |
| 11 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 298,970,000 | 276,063,000 |
| 12 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 500,165,000 | 243,865,000 |
| 13 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 163,440,000 | 146,340,000 |
| 14 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 227,740,000 | 221,887,000 |
| 15 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 19,039,100,000 | 19,039,100,000 |
| 16 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 101,382,000 | 100,082,000 |
| 17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU | 318,000,000 | 315,015,700 |



| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| 18 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 30,810,000 | 27,266,000 |
| 19 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 11,350,000 | 9,050,000 |
| 20 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 16,750,000 | 13,633,000 |
| 21 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 114,795,000 | 114,795,000 |
| 22 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 39,200,000 | 0 |
| 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 134,990,000 | 98,940,000 |
| 24 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 3,650,847,000 | 3,443,341,760 |
| 25 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 28,645,000 | 28,645,000 |
| 26 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 4,109,000,000 | 4,056,034,000 |
| 27 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 528,385,000 | 516,757,050 |
| Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | 4,820,274,708 | 4,246,613,072 |
| 1 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 34,950,000 | 0 |
| 2 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 450,000,000 | 450,000,000 |
| 3 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 465,700,000 | 465,700,000 |
| 4 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 26,250,000 | 6,050,000 |
| 5 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 322,680,000 | 22,610,000 |
| 6 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang | 128,150,000 | 61,000,000 |



| | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| | Pendidikan | | |
| 7 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 3,261,974,708 | 3,241,253,072 |
| 8 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 130,570,000 | 0 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2025

B. Bidang Urusan Kesehatan

Tabel. 4.42
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM urusan Kesehatan

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|--|---|---------------|----------------|
| Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | |
| Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota | | | |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 2,817,650,465 | 1,389,118,165 |
| 2 | Pelayanan kesehatan Ibu bersalin | 728,655,000 | 586,235,000 |
| 3 | Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir | 266,440,000 | 182,510,000 |
| 4 | Pelayanan kesehatan Balita | 2,476,897,000 | 1,840,101,000 |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 1,044,320,000 | 773,080,000 |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 455,135,000 | 415,339,182 |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 90,720,000 | 83,734,182 |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi | 0 | 0 |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) | 577,500,000 | 577,500,000 |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat | 0 | 0 |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis | 702,630,900 | 650,671,040 |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | 345,940,000 | 276,920,000 |



| Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Lainnya | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| 1 | Operasional Pelayanan Puskesmas (Kabupaten) | 222,000,000 | 222,000,000 |
| 2 | Operasional Pelayanan (Puskesmas) | 4,123,605,000 | 1,398,455,673 |
| 3 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (DAU) | 6,727,936,100 | 6,727,936,100 |
| 4 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 24,167,838,935 | 22,493,296,914 |

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab.Maros , 2025

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Tabel. 4.43
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM urusan Pekerjaan Umum

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|--|---|---------------|----------------|
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | | | |
| Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 1 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | 1,079,359,000 | 1,078,786,919 |
| 2 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 32,570,000 | 0 |
| 3 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 1,103,397,000 | 1,099,270,858 |
| 4 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 2,088,509,000 | 2,075,755,334 |
| 5 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 2,594,972,000 | 2,582,968,197 |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | | | |
| Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 1 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 2,437,175,000 | 2,390,742,960 |

Sumber data : Dinas PUTRPP Kab.Maros , 2025

**D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat**

Tabel. 4.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM urusan Perumahan Rakyat

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---------------|----------------|
| Program Pengembangan Perumahan | | | |
| Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | |
| 1. | Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota | 10,721,000 | 5,830,000 |
| Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | |
| 1. | Rehabilitasi rumah bagi korban bencana | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 2. | Pembangunan rumah bagi korban bencana | 150,000,000 | 150,000,000 |

Sumber data : Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2025

E. Bidang Urusan Trantibumlinmas

Tabel. 4.45
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM urusan Trantibumlinmas 1

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|--|---------------|----------------|
| Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum) | | | |
| Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota | | | |
| 1 | Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota | 22,490,000 | 21,290,000 |
| 2 | Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum | 484,000,000 | 392,600,000 |
| 3 | Penyusunan SOP ketertiban umum dan | 5,000,000 | 5,000,000 |



| | | | |
|---|---|------------|------------|
| | ketenteraman masyarakat | | |
| 4 | Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan | 27,690,000 | 27,690,000 |
| 5 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 27,000,000 | 26,920,000 |
| Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | |
| 1 | Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 91,348,878 | 84,010,000 |
| 2 | Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 8,015,000 | 4,060,000 |
| 3 | Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 42,208,384 | 25,862,000 |
| Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | |
| 1 | Pengembangan kapasitas dan karier PPNS | 5,182,000 | 4,240,000 |
| Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar) | | | |
| Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 1 | Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota | 13,940,000 | 13,940,000 |
| 2 | Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran | 17,000,000 | 7,420,000 |
| 3 | Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, | 24,408,000 | 24,182,550 |



| | | | |
|--|---|------------|------------|
| | penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | |
| 4 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | 1,800,000 | 0 |
| Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | | |
| 1 | Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran | 12,290,000 | 10,060,000 |
| Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran | | | |
| 1 | Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran | 7,100,000 | 7,100,000 |
| Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | |
| 1 | Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran | 20,746,000 | 20,746,000 |

Sumber data : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab.Maros , 2025

Tabel. 4.46
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM urusan Trantibumlinmas 2

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|--|---------------|----------------|
| Program PenanggulanganBencana | | | |
| Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten | | | |
| 1 | Penyusunan kajian resiko bencana Kabupaten | 154,640,000 | 139,401,492 |
| Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | |
| 1 | Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota | 51,200,000 | 51,200,000 |
| 2 | Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah kabupaten/kota | 87,800,000 | 87,640,250 |
| Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | |
| 1 | Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota | 45,250,000 | 44,367,500 |



| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|--|---|---------------|----------------|
| 2 | Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota | 149,050,000 | 140,475,000 |
| Kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana | | | |
| 1 | Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan | 50,090,500 | 26,309,500 |

Sumber Data : BPBD Kab.Maros , 2025

F. Bidang Urusan Sosial

Tabel. 4.47
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM urusan Perumahan Rakyat

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|--|---|---------------|----------------|
| Program Program Rehabilitasi Sosial | | | |
| Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | |
| 1 | Penyediaan permakanan | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 2 | Penyediaan sandang | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 3 | Penyediaan alat bantu | 44,000,000 | 37,350,000 |
| 4 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 49,450,000 | 49,207,200 |
| 5 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial | 27,650,000 | 25,555,000 |
| 6 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat | 23,276,000 | 23,276,000 |
| 7 | Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | 1,250,000 | 0 |
| 8 | Pemberian layanan data dan pengaduan | 5,975,500 | 5,827,000 |



| Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | |
|---|--------------------------------|------------|------------|
| 1 | Penyediaan makanan | 24,550,000 | 24,400,000 |
| 2 | Penyediaan sandang | 53,625,000 | 53,463,750 |
| 3 | Pelayanan dukungan Psikososial | 9,400,000 | 9,400,000 |

S
u
m
b
e
r
d*ata : Dinas Sosial Kab.Maros , 2025*



BAB V

PENUTUP

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beberapa tahun yang lalu yang telah direvisi melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Semua bentuk penyelenggaraan pemerintahan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik yang pada akhirnya mendorong meningkatnya partisipasi publik. Hal ini sangat diperlukan dan merupakan nilai-nilai dasar yang harus diwujudkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 yang telah disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Maros kepada publik yang menyajikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maros yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Pembahasan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diuraikan secara lengkap pada BAB I menggambarkan tentang informasi tentang profil daerah Kabupaten Maros secara umum, perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan umum penerapan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari : capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. diuraikan secara lengkap pada BAB II. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dijelaskan pada BAB III menguraikan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Adapun penerapan dan pencapaian Standar



Pelayanan Minimal yang dijelaskan pada BAB IV menguraikan tentang pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yaitu : Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Maros.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Maros tahun 2024 diwujudkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh alokasi dana baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun yang berasal dari sumber pendanaan lainnya. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah mampu mendorong perkembangan pembangunan di Kabupaten Maros. Banyaknya program dan kegiatan yang sifatnya strategis dan mendesak sementara sumber pendanaan masih terbatas sehingga, menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan harus didasarkan pada skala prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Maros.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 Kabupaten Maros telah melalui tahapan review dan Evaluasi Mandiri terhadap seluruh capaian indikator kinerja kunci urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maros yang tertuang dalam Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Maros **Nomor 094/47/A.1/ITDA** tanggal 20 Februari 2024 untuk melakukan Review dan Evaluasi terhadap Seluruh Dokumen Pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Kabupaten Maros Tahun 2024 yang berlangsung dari tanggal 20 Februari s/d 05 Maret 2024 di Ruang Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini belum dapat memuaskan semua pihak dan menyelesaikan semua masalah yang ada, namun dengan berbagai usaha dan upaya sungguh-sungguh yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten



Maros saat ini telah membawa perubahan yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 ini kami buat untuk menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2025, dengan harapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini benar-benar menjadi bahan evaluasi Pemerintah dalam mengambil kebijakan secara adil dan bijaksana dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat memberikan manfaat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, dan Pemerintah Kabupaten Maros akan terus melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk lebih mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BUPATI MAROS,

H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.IP., M.H

| Indikator Kinerja Makro | Tahun | | |
|--|---------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Angka Harapan Hidup (Tahun) | 73,38 | 73,55 | 73,77 |
| Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 13,30 | 13,50 | 13,51 |
| Angka Melek Huruf (Persen) | 89,65 | 92,32 | 91,22 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | 8,02 | 8,03 | 8,05 |
| Daya Beli / Pengeluaran Per Kapita (juta Rupiah/Orang/Tahun) | 11,40 | 11,80 | 12,21 |
| IPM | 72,92 | 73,56 | 74,04 |
| Angka kemiskinan | 9,57 | 9,43 | 9,65 |
| Angka Pengangguran | 5,04 | 3,64 | 4,34 |
| Pertumbuhan Ekonomi | 9,13 | 5,00 | 3,79 |
| Gini Ratio | 0,362 | 0,372 | 0,363 |
| Nilai PDRB adhb (Triliun Rp) | 23,54 | 26,38 | 28,62 |
| Jumlah Penduduk (Jiwa) | 403.774 | 410.699 | 423.989 |
| PDRB Per Kapita (Rp juta/jiwa) | 58,55 | 64,69 | 69,21 |

Maros, 04 Maret 2025

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Maros



Ir. Muhammad Kamil

NIP.196804291994011001



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Nasrun Amrullah No.3 Maros Sul-Sel, Telp/Fax : (0411)371256, Kode Pos 90516
Email : Inspektorat@Maroskab.go.id Website : www.maroskab.go.id

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

Menyatakan bahwa kami telah melakukan *reviu* Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Ini.

Maros, 27 Maret 2025


No. Ir H. TAKDIR D., MM *ab*
Pangreh Pembina Utama Muda
NIP : 19671201 199703 1 004